

Mangga

Sejarah Sosial

Daerah Sulawesi Selatan

Mobilitas Sosial Kota Makassar 1900 - 1950

Direktorat
Budayaan

7

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1984 / 1985

959.897
MUC 5

Milik Depdikbud
Tidak diperdagangkan

SEJARAH SOSIAL

DAERAH SULAWESI SELATAN

MOBILITAS SOSIAL KOTA MAKASAR

1900 - 1950

Team Peneliti/Penulis :

1. DR. Muchlis Paeni
2. Drs. Anhar Gonggong
3. Drs M Nur Baso (Ketua)
4. Drs. Sarita Pawiloy

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL
PROYEK INVENTARISASI DAN DOKUMENTASI SEJARAH NASIONAL
1984/1985

SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional (IDSN) yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, telah berhasil menerbitkan seri buku biografi dan kesejarahan. Saya menyambut dengan gembira hasil penerbitan tersebut.

Buku-buku tersebut dapat diselesaikan berkat adanya kerjasama antara para penulis dengan tenaga-tenaga di dalam proyek. Karena baru merupakan langkah pertama, maka dalam buku-buku hasil Proyek IDSN itu masih terdapat kelemahan dan kekurangan. Diharapkan hal itu dapat disempurnakan pada masa yang akan datang.

Usaha penulisan buku-buku kesejarahan wajib kita tingkatkan mengingat perlunya kita untuk menantiasa memupuk, memperkaya dan memberi corak pada kebudayaan nasional dengan tetap memelihara dan membina tradisi dan peninggalan sejarah yang mempunyai nilai perjuangan bangsa, kebangsaan serta kemanfaatan nasional.

Saya mengharapkan dengan terbitnya buku-buku ini dapat ditambah sarana penelitian dan kepustakaan yang diperlukan untuk pembangunan bangsa dan negara, khususnya pembangunan kebudayaan.

Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini.

Jakarta, Juni 1984

Direktur Jenderal Kebudayaan



Prof. Dr. Haryati Soebadio
NIP. 130119123

Sesuai dengan Undang-Undang Desentralisasi 1903 juncto *Algemeene Matregel van Bestuur 1903*, kota Makasar secara resmi ditetapkan sebagai daerah otonom atau Gemeente Makasar yang dinyatakan berlaku tanggal 1 April 1906. Pada tanggal 31 Desember 1938, Gemeente Makasar disahkan menjadi stad Gemeente Makasar yang membawahi beberapa wilayah distrik pemerintahan.

Ujung Pandang adalah nama baru dari kota Makasar yang resmi digunakan sejak tahun 1971. Proses dan akibat perubahan nama ini sudah merupakan pula bagian dari mobilitas sosial, mengapa mesti berubah. Menurut penjelasan lisan dari M. Daeng Patompo (bekas Walikota Makasar/Ujung Pandang) pada acara "Seminar Makasar" dalam usaha mengembalikan nama Makasar menggantikan Ujung Pandang pada tanggal 21–22 Maret 1981 di Hotel Raodah, antara lain beliau mengemukakan: bahwa perubahan itu sesungguhnya bersumber dari perluasan kota Makasar dengan memasukkan sebagian wilayah Maros dan Gowa. Pilihan nama Ujung Pandang, diambil dari penyebutan orang-orang Bugis di luar kota Makasar yang menyebutnya Juppandang atau Ujung Pandang. Pemberian nama ini menunjuk pula pada Benteng Ujung Pandang yang dianggap sebagai pusat kota ketika itu. Demikianlah secara sekilas tentang perubahan nama kota Makasar menjadi kota Ujung Pandang.

1. Tujuan penelitian dan penulisan

- 1.1 Penelitian dan penulisan sejarah sosial khususnya mobilitas sosial kota Makasar merupakan salah satu usaha untuk mengungkapkan beberapa perubahan kegiatan manusia dan bagaimana aspek-aspek sosial yang ditimbulkannya sebagai akibat adanya mobilitas tersebut.
- 1.2 Untuk memperkenalkan kepada generasi penerus, bahwa apa yang nampak sekarang ini khususnya di kota Ujung Pandang, baik dari segi nama, kuantitas dan kualitas sosial sudah berbeda dari kurun waktu sebelumnya (1900 – 1950), sudah melewati beberapa pergeseran nilai.

BAB I

PENDAHULUAN

Kota Makasar tumbuh dari suatu bandar kecil yang pada mulanya didiami oleh orang-orang Makasar asli. Mata pencahariannya terdiri dari petani, pedagang dan nelayan. Perkampungan Makasar menjadi ramai pada masa pembuatan benteng-benteng pertahanan Kerajaan Gowa termasuk benteng Ujung Pandang. Makasar lebih berkembang lagi setelah banyak dikunjungi dan disinggahi pedagang-pedagang dari luar baik dari Asia, Eropa dan pedagang dari daerah-daerah Indonesia lainnya.

Makasar terletak di pesisir pantai, merupakan kota pantai, bercorak maritim baik pada masa Kerajaan Gowa maupun sesudahnya. Bahkan sesudah tahun 1667, Makasar bukan saja sebagai kota pelabuhan tetapi juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan kolonial Belanda. Dalam benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam) berkantor Gubernur Speelman. Dari sinilah dia mengatur pemerintahan dan meluaskan monopoli dagangnya. Sejak VOC dan pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, Jepang dan Republik Indonesia, Makasar berkedudukan pula sebagai ibukota pemerintahan Propinsi Sulawesi, kemudian Propinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara, selanjutnya Propinsi Sulawesi Selatan.

Penyunting :

1. **DR. T. Ibrahim Alfian**
2. **DR. F.A. Sutjipto**

Gambar kulit oleh :

M.S. Karta

KATA PENGANTAR

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional adalah salah satu proyek yang berada pada Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang antara lain menggarap penulisan pesejarahan perihal Sejarah Masyarakat (Sejarah Sosial) di seluruh wilayah Indonesia.

Penulisan Sejarah Sosial dimaksudkan ialah sejarah sekelompok manusia dengan ciri-ciri etnis tertentu yang berperan sebagai pendukung kebudayaan lokal; misalnya masyarakat Betawi di DKI Jakarta. Keadaan masyarakat setiap daerah selalu menjalani perubahan dan pertumbuhan. Karena adanya proses sosialisasi, yang merupakan modal berharga dalam usaha mewujudkan upaya pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhineka.

Dengan tersusunnya Sejarah Sosial tiap-tiap daerah dari wilayah Indonesia untuk mendapatkan gambaran tentang kehidupan masyarakat tersebut; seperti keadaannya pada masa kini, dengan latar belakang masa lampau, yang memberikan proyeksi pada masa datang.

Di samping itu Sejarah Sosial juga sangat berguna bagi pengambilan kebijaksanaan pada berbagai bidang. Selanjutnya pengetahuan sejarah sosial akan membantu menumbuhkan sikap saling mengerti, baik dalam pergaulan untuk masyarakat di Propinsi ataupun dalam skala nasional, yang merupakan modal utama bagi terciptanya kerukunan dan kesejahteraan hidup di masyarakat itu sendiri yang diperlukan untuk pembangunan.

Adapun tujuan penulisan Sejarah Sosial itu sendiri untuk meningkatkan pengetahuan tentang pertumbuhan dan perkembangan kehidupan masyarakat tertentu serta melengkapi bahan untuk penulisan sejarah daerah dan sejarah nasional yang mencakup sektor lokasi, demografi, pola pemukiman, permulaan hidup, kebahasaan, sistem kekerabatan, keagamaan maupun unsur pembangunan.

Dengan demikian proses sosialisasi sebagai kejadian sejarah akan memberikan kesadaran terbinanya jiwa kebangsaan terutama pada generasi muda mengenai kesinambungan ssejarah bangsa dalam rangka pembinaan bangsa.

Jakarta, Juli 1984

Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Sejarah Nasional

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBU- DAYAAN.....	i
PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1. Tujuan penelitian dan penulisan	2
2. Masalah	3
3. Ruang Lingkup	3
4. Pertanggungjawaban ilmiah dan prosedur penelitian/penulisan	4
BAB II PEMUKIMAN DI UJUNG PANDANG	6
1. Latar belakang pertumbuhannya	6
1.1 Pembangunan Benteng-benteng pert- hanan Kerajaan Gowa	7
1.2 Pertumbuhan Bandar-Perdagangan Maka- sar	8
1.3 Perkembangan Kota Makasar (Ujung Pandang).....	9

2. Perkampungan dan Tata Lingkungannya	10
2.1 Nama dan lokasi	13
2.2 Tata Lingkungannya	47
3. Penduduk dan Corak Kehidupannya	63
3.1 Pertumbuhan penduduk	63
3.2 Corak Kehidupannya	64
BAB III STRUKTUR SOSIAL DAN LAPANGAN	
KERJA	68
1. Struktur Sosial	68
1.1 Struktur Sosial Tradisional Makasar	68
1.2 Mobilitas Sosial dalam Birokrasi Kolo- nial	75
1.3 Mobilitas Sosial Sesudah Kemerdekaan Indonesia	82
2. Lapangan Kerja	86
2.1 Gambaran Pembagian Kerja Antar Etnis (Suku)	86
2.2 Mobilitas dalam Lapangan Kerja	95
BAB IV PERKEMBANGAN PENDIDIKAN	99
1. Masa Pemerintahan Hindia Belanda (1900 – 1942)	99
1.1 Munculnya pendidikan formal	105
1.2 Perkembangan sekolah-sekolah asuhan pemerintah	107
1.3 Perkembangan sekolah-sekolah asuhan swasta	122
2. Masa Pemerintahan militer Jepang (1942– 1945)	140
3. Masa Kemerdekaan hingga 1950	145
3.1 Pendidikan Perguruan Islam Datu Mu- seng	148
3.2 Perguruan Nasional Makasar	149
3.3 Pendidikan dan Pers	151

3.4 Organisasi Wanita	152
3.5 Pendidikan pada masa awal RIS	155
BAB V PENUTUP	157
DAFTAR KEPUSTAKAAN	162
DAFTAR INFORMAN	162
DAFTAR RALAT	167

- 1.3 Inventarisasi data perubahan kehidupan sosial termasuk akibat-akibat dalam suatu kurun waktu, dapat dijadikan faktor kebijaksanaan untuk masa kini dan masa yang akan datang terutama dikaitkan dengan usaha pembangunan manusia seutuhnya.

2. Masalah

- 2.1 Perubahan-perubahan yang terjadi pada kehidupan sosial di suatu kurun waktu yang lampau, turut memberikan corak perkembangan lanjut masyarakat. Perubahan itu dapat menimbulkan benturan-benturan nilai, ketegangan-ketegangan sosial antara generasi tua dengan generasi muda.
- 2.2 Mobilitas sosial yang nampak dewasa ini sering hanya dikaitkan dengan meningkatnya pendidikan dan perkembangan ekonomi tanpa memperhatikan latar belakang sosialnya, sehingga penataan sendi-sendi yang berhubungan dengan pelayanan kehidupan masyarakat kadangkala kurang tepat bahkan berakibat fatal.
- 2.3 Salah satu pewarisan sosial dari bangsa kita adalah kebiasaan melayani dan dilayani, sehingga pilihan pendidikan dan pekerjaan sering terbawa pada pendidikan dan pekerjaan yang dapat berkuasa. Akibatnya tidak mustahil bila ada yang cenderung menilai bahwa ada jenis pendidikan yang istimewa yang dapat diandalkan sebagai pemegang hegemoni di masa mendatang.

3. Ruang Lingkup

- 3.1 Mobilitas sosial yang diungkapkan adalah yang terjadi di kota Makasar, sekarang bernama Ujung Pandang.
- 3.2 Kurun waktu diutamakan dalam tahun 1900–1950 dengan tidak mengenyampingkan sebelum dan sesudah kurun waktu tersebut dalam pengkajian tentang latar belakangnya dan sebagai bahan pelengkap.

3.3 Kerangka penelitian dan penulisan meliputi pemukiman dan tata lingkungannya, penduduk dan corak kehidupannya, struktur masyarakat dan mobilitasnya, pendidikan dan beberapa aspek kebudayaan dan keagamaan.

4. Pertanggungjawaban ilmiah dan prosedur penelitian/penulisan

4.1 Pada prinsipnya penulisan ini mempergunakan metoda ilmu sejarah. Berusaha mengungkapkan data tertulis yang sifatnya autentik seperti arsip-arsip (*memori van overgave*), *verslag/rapporten*/laporan-laporan, peraturan perundangan, dan lain-lain). buku, majalah, surat kabar lokal, dan sebagainya. Di samping sumber tertulis juga mengadakan observasi atau pengamatan langsung di lapangan, dan juga menghubungi informan yang mengetahui secara langsung topik yang akan ditulis. Data yang terkumpul disaring, kemudian dibandingkan dengan sumber-sumber lainnya.

4.2 Penyusunan kerangka dan penentuan pilihan obyek penelitian disesuaikan dengan penjelasan pada pertemuan Team Pengarah di Jakarta dan cakupan tugas sejarah sosial daerah.

4.3 Prosedur kerja dilakukan secara bertahap dan setiap tahap dikonsultasikan semua anggota team. Team peneliti dan penulis sebanyak empat orang, satu orang di Jakarta dan tiga orang di daerah. Sebagai tahap pertama, diadakan konsultasi tentang penentuan *draft* atau kerangka penulisan dan pembagian tugas. Tahap kedua, melakukan konsultasi hasil penelitian/pengumpulan data dan pertukaran data antara anggota team yang lebih erat hubungannya dengan tugas penulisannya. Tahap ketiga, konsultasi tentang penulisan, masing-masing anggota menulis satu bab kecuali bab terakhir dipercayakan kepada anggota yang disepakati bersama. Tahap ke-

empat, merupakan tahap terakhir berupa konsultasi hasil penulisan, penggabungan sesuai dengan kerangka yang telah disepakati dan perampungan naskah.

BAB II

PERMUKIMAN DI UJUNG PANDANG

1. Latar belakang pertumbuhannya

Sepintas lalu kita dapat membayangkan bahwa betapa pun sederhananya suatu pemukiman atau perkampungan, ia ada dan tumbuh oleh karena suatu sebab dan tujuan dari pemiliknya. Seseorang yang membangun pondok di lokasi perkebunan adalah untuk menjaga kebun, atau sebagai tempat menyimpan hasil kebunnya, ataupun mungkin dengan maksud sebagai tempat rekreasi. Di tempat lain ada yang membangun rumahnya dekat sungai, dengan tujuan selain sebagai tempat pemondokan juga untuk mempermudah pemenuhan kebutuhan hidupnya, yaitu kebutuhan akan air, lalu lintas dan sebagainya. Mungkin di tempat semula kurang menjamin kebutuhan hidupnya baik dari segi sosial, ekonomi, kebudayaan maupun keamanan sehingga mereka terpaksa pindah. Pada pemukimannya yang baru, mereka mempunyai harapan ingin menjangkau masa depan yang lebih baik dari sebelumnya.

Demikian pula halnya dengan pertumbuhan pemukiman di kota Ujung Pandang (dulu: Makasar), tidak bisa terlepas dari pada faktor-faktor yang menunjang tumbuh dan berkembangnya pemukiman di daerah ini, apalagi dengan melihat keduduk-

an Makasar sebagai salah satu kota yang sudah sejak lama menduduki posisi strategis dan berperan di kawasan timur Nusantara pada khususnya dan di Nusantara pada umumnya.

Karena itu, untuk mengetahui latar belakang pemukiman di Makasar dalam kurun waktu tahun 1900 tahun 1950, memerlukan ulasan singkat pada masa sebelumnya, sebab pemukiman-pemukiman tersebut tumbuh dan berkembang seiring dengan perjalanan sejarahnya.

Kalau kita memperhatikan cerita sejarah mengenai Makasar, akan ditemukan beberapa faktor yang menjadi latar belakang yang mempengaruhi pertumbuhan pemukiman di kota Makasar (Ujung Pandang).

1.1 Pembangunan benteng-benteng pertahanan Kerajaan Gowa

Pada masa pemerintahan raja Gowa ke-X (1545–1565). Kerajaan Gowa mulai banyak melakukan perluasan kekuasaan dengan menaklukkan beberapa daerah di Sulawesi Selatan. Ia mengangkut orang-orang Sawitto, Suppa dan Bacukiki ke Gowa. Raja inilah yang pertama mengangkut orang dan hartanya bila menaklukkan sebuah negeri. Dialah raja yang membuat dinding batu bata di sekeliling negeri Gowa dan Somba Opu.¹⁾ Dialah yang mendirikan Benteng Ujung Pandang.²⁾

Pengangkutan orang-orang dan hartanya ke Gowa, di samping sebagai tawanan perang juga untuk dimanfaatkan tenaganya dalam pembangunan benteng-benteng pertahanan kerajaan Gowa. Hal ini tentunya memerlukan pemondokan atau pemukiman sementara. Karena mereka diangkut bersama dengan hartanya, memungkinkan mereka dengan mudah membangun pe-

-
- 1) Prof. G.J. Wolhoff dan Abdurrahim, *Sejarah Gowa*, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, hal. 25 dan 26.
 - 2) Drs. Aminah Pabittei, *Benteng Ujung Pandang*, Kantor Cabang II Lembaga Sejarah dan Antropologi Ujung Pandang, Ujung Pandang, 1975, hal. 11. Sesudah penaklukan Speelman terhadap Kerajaan Gowa tahun 1667, Benteng Ujung Pandang dirubah namanya menjadi Fort Rotterdam.

mondokan. Mereka tinggal di sekitar benteng yang sementara dibangun, mungkin pula bersama keluarganya.

Sesudah benteng Ujung Pandang selesai, ada di antaranya lebih senang menatap di Ujung Pandang. mereka membangun rumah-rumahnya di sekitar benteng Ujung Pandang. Dengan demikian lama kelamaan kampung-kampung di sekeliling benteng Ujung Pandang itu semakin ramai dan sesudah benteng Ujung Pandang dikuasai Belanda tahun 1667. kampung tersebut diberi nama Makasar.³⁾

Dengan demikian, pada fase awal pertumbuhan pemukiman di Ujung Pandang, selain penduduk asli, adalah orang-orang yang datang dari daerah lain di Sulawesi Selatan yang didatangkan untuk mengerjakan benteng-benteng pertahanan.

1.2 Pertumbuhan bandar perdagangan Makasar

Bandar Makasar adalah pelabuhan Kerajaan Gowa yang terletak di pantai barat sebelah utara Benteng Somba Opu (benteng utama kerajaan Gowa) yang memanjang ke utara di depan Benteng Ujung Pandang sampai ke Benteng Ujung Tanah.

Ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, banyak pedagang-pedagang Indonesia pindah dari Malaka ke tempat-tempat lain, ada pula di antaranya yang pindah ke Makasar⁴⁾. Sejak itulah pedagang-pedagang Melayu masuk di Makasar. Ada yang pergi pulang dan ada pula yang menetap. Seizin dengan raja Gowa ke-10 (1545–1565), Anakoda Bonang bersama dengan orang-orang Melayu lainnya seperti pedagang dari Pahang, Patani, Johor, Campa dan Minangkabau diberi izin tinggal di daerah Gowa.⁵⁾ Jatuhnya Malaka ke tangan Malaka tersebut, sebagai salah satu faktor yang meningkatkan peranan

3) *Memperkenalkan Kota Makasar*, Penerbit Tribakti, Makasar, 1957, hal. 12.

4) Prof.Dr. D.H. Burger, *Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia*, Saduran Prof.Dr. Mr. Prajudi Atmosudirdjo, Pradnya Paramita, Jakarta, 1962, hal. 56.

5) Abd. Razak Daeng Patunru, *Sejarah Gowa*, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, Makasar, 1969. hal. 14.

bandar Makasar sehingga ramai dikunjungi pedagang-pedagang dari daerah lain.

B. Schrieke menulis bahwa pada abad ke-16 bandar Makasar mulai ramai, menjadi penting sebagai lalu lintas perdagangan. Makasar makin bertambah besar dan dikenal oleh pedagang-pedagang dari Timur seperti Borneo (Kalimantan), Jawa, Bali, Solor, Timor, Ambon (Maluku) dan daerah-daerah lainnya.⁶⁾

Peranan bandar Makasar lebih penting lagi pada abad ke-17 setelah terjadi penaklukan dan penghancuran kota pantai di Jawa oleh Mataram sehingga banyak saudagar-saudagar pindah secara besar-besaran ke Makasar dan Banjarmasin.⁷⁾

Meskipun perpindahan pedagang-pedagang dari Malaka dan Jawa serta daerah lainnya tidak mutlak menetap di Makasar, namun di antara mereka ada yang menetap. Mereka yang menetap ini tentunya menimbulkan pemukiman baru.

1.3 Perkembangan kota Makasar (Ujung Pandang)

Pada mulanya, Makasar hanya merupakan suatu bandar kecil, tempat bongkar muat muatan suatu perahu. Selain sebagai pelabuhan dagang, pelabuhan Makasar di Ujung Utara juga difungsikan sebagai pangkalan "armada" (baca: angkatan laut) kerajaan Gowa sebelum ditaklukan Belanda. Bandar ini berkembang dengan pesat pada abad ke-16 dan ke-17.

Dari waktu ke waktu Makasar terbentuk dan semakin meluas sehingga berkembang sebagai kota pantai. Dengan posisinya sebagai kota pantai, mudah berhubungan dan banyak menerima pengaruh dari luar.

Perkembangan Makasar sebagai kota dagang dan sebagai kota yang berfungsi pusat pemerintahan Belanda di Sulawesi pada khususnya dan kawasan timur Nusantara pada umumnya sesudah kejatuhan Gowa 1667, secara otomatis menimbulkan

6) B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*, Volume I, the Hogue-Bandung 1955, 66 dan 68.

7) Prof.Dr. D.H. Burger, *op.cit.*, hal. 56

konsekuensi-konsekuensi logis di bidang pembangunan fisik untuk kebutuhan-kebutuhan di kota, seperti pembangunan perumahan dan gedung-gedung, pembuatan dan perbaikan jalanan, pembangunan sarana-sarana peribadatan dan sarana-sarana sosial lainnya, dan sebagainya. Kesemuanya ini merupakan lapangan kerja yang mengundang penduduk untuk datang ke Makasar mengadu untung. Kemajuan, keramaian dan fasilitas yang ada di kota, merupakan faktor yang ikut menarik perpindahan penduduk baik dari daerah pedalaman maupun antar pulau.

2. Perkembangan dan tata lingkungannya

Perkampungan dan tata lingkungan di kota Makasar (sekarang: Ujung Pandang), dimaksudkan adalah kelompok-kelompok pemukiman yang sudah teratur dalam bentuk kampung-kampung yang penataannya telah memenuhi syarat perkotaan. Dalam hal ini sesuai dengan status kota Makasar dalam kurun waktu tahun 1900-an sampai 1950, yaitu sebagai *standsge-meente*/kotapraja yang antara lain pernah menjadi ibukota *Celebes Onderhorighenden* (Sulawesi dan Daerah Takluknya), *Groote Oost* (Timur Besar), *Residentie Zuid Celebes*, kemudian Negara Indonesia Timur (BIT: 1946–1950).

Dari catatan-catatan yang ada menunjukkan, bahwa sebelum tahun 1921, kota Makasar terbagi dalam enam distrik yaitu: Distrik Makasar, Wajo, Melayu, Ende, Ujung Tanah dan distrik Mariso. Distrik Makasar, Wajo, Melayu dan Ende masing-masing diperintah oleh seorang kepala dengan gelar "Kapitein"⁸), sedangkan Ujungtanah dan Mariso masing-masing dikepalai oleh seorang "Gallarrang"⁹). Khusus untuk orang-orang Cina diperintah oleh seorang pejabat yang disebut *Major Cina* yang dibantu beberapa kepala kampung (Wijkmeesters).

8) Menurut penyebutan dalam dialek lokal Bugis-Makasar disebut *Kapitang*.
9) Dr. J.W. de Klein, *Bestuursmemorie van de Onderafdeeling Makasar*, 1947, hal. 2 Koleksi Arsip Perwakilan Arsip Nasional RI Sulawesi Selatan di Ujung Pandang.

Demikian pula "Orang-orang Timur Asing Bukan Cina mempunyai pemimpin sendiri yang dugelar Kapitein. Kedua pejabat yang disebutkan terakhir ini tidak memperoleh suatu pendapatan yang pasti dari *gouvernement*/pemerintah"¹⁰⁾

Pada tahun 1921, Distrik Melayu dan Distrik Ende dihapuskan. Distrik Melayu seluruhnya digabungkan ke dalam distrik Wajo, sedangkan bekas wilayah Distrik Ende dibagi ke dalam wilayah Distrik Makasar dan Distrik Wajo.¹¹⁾ Dengan demikian pada tahun 1921 dan sesudahnya itu hanya ada empat distrik di kota Makasar, yaitu Distrik Makasar, Wajo, Ujungtana dan Mariso.

Di dalam distrik-distrik tersebut di ataslah terdapat sejumlah kampung-kampung yang masing-masing diperintah oleh seorang kepala kampung yang dipilih di antara dan oleh laki-laki dewasa yang berada di kampung itu, dengan gelar *Matowa*¹²⁾

Ketika Pemerintah Jepang, "struktur pemerintahan yang ada tetap dimanfaatkan dengan mengambilnya sebagai model misalnya hubungan kerjasama dengan para raja-raja tetap dipelihara. Wilayah administrasi mengenai *afdeeling* tetap dipertahankan"¹³⁾ Begitu juga dengan pengaturan tata perkotaan dan pemukiman tidak terlalu mengalami perubahan. Namun di kota Makasar, terjadi suatu peristiwa yang perlu dicatat dalam masa penjajahan Jepang (1942–1945) ini, yaitu dilakukannya "rasionalisasi batas-batas kampung, pada waktu itu akibat perintah Jepang agar pindah rumah maka beberapa kampung terpaksa digabungkan dan yang lain harus pula dipisahkan".¹⁴⁾ Salah

10) *Ibid.* hal. 3

11) *Ibid.* hal. 2

12) *Ibid.* hal. 3

Matowa adalah istilah lokal dari bahasa Bugis-Makasar. Jadi matowa artinya yang dituakan atau yang dihormati, maksudnya pemimpin atau kepala.

13) Sarita Pamiloy dan Muh. Abduh, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Sul. Sel.* 1980, hal. 12.

14) Dr. J.W. de Klein, *op. cit.*, hal. 3

seorang informan menjelaskan antara lain bahwa: "pindahan penduduk yang terjadi pada zaman Jepang yaitu dari Distrik Ujungtanah, antara lain dari Kampung Ujung Tanah dan Kampung Tamalabba. Mereka dipindahkan antara lain ke kampung Kalukuang bagian timur, yaitu di sebelah timur Jalan Pongtiku sekarang, berbatasan dengan Kampung Rappojawa".¹⁵⁾

Sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17-8 1945, kemudian Negara Indonesia Timur (NIT) terbentuk yang wilayahnya termasuk di antaranya Sulawesi yang ibukotanya Makassar, perubahan penting yang terjadi sehubungan dengan penataan struktur kota Makassar, ialah keluarnya surat keputusan Residen Celebes Selatan Nomor 427 tanggal 3 Juni 1947 yang menetapkan. "Seluruh daerah dari *Onderafdeeling* Makassar yang berada di daratan (maksudnya di luar daerah pulau-pulaunya) dijadikan Kotapraja Makassar"¹⁶⁾ Dalam pemekaran kotapraja Makassar ini, termasuk kampung Tallo. Kalukubodoa. Rappokalling. Rappojawa dan sebagian dari Kalukuang. Kelima kampung tersebut termasuk wilayah distrik Ujung Tanah yang sebelumnya belum masuk ke dalam Kota-praja Makassar.

Adalah tidak dapt disangsikan lagi, bahwa di dalam kurun waktu tersebut, bahkan jauh sebelumnya, di kota Makassar sudah terdapat perkampungan-perkampungan yang secara umum telah memenuhi syarat perkotaan sesuai dengan fungsinya sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan pendidikan di daerah Sulawesi pada khususnya dan wilayah Indonesia Timur umumnya.

Kota Makassar yang dimaksudkan di sini adalah yang wilayahnya di sebelah utara berbatasan dengan Selat Makassar, di sebelah timur berbatasan dengan daerah Swapraja Gowa (Kampung Rappocini, kampung Karuwisi dan kampung Panaikang)

15) Wawancara dengan Zainuddin Daeng Manye, di Kelurahan Kahukuang Ujung Pandang.

16) Dr. J.W. de Klein, *op.cit.* hal. 3

serta sungai Tallo, di sebelah selatan juga berbatasan dengan wilayah Swapraja Gowa, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makasar.

Berikut ini secara lebih terperinci, akan dikemukakan nama-nama kampung, lokasi dan tata lingkungan perkampungan tersebut di kota Makasar. Penguraian mengenai kampung-kampung itu disesuaikan dengan pembagian distrik dan perkembangannya sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan untuk kurun waktu 1900–1950 tersebut.

2.1 Nama dan Lokasi

2.1.1 Distrik Makasar

2.1.1.1 Kampung Maricaya

Penamaannya berasal dari kata *marica* artinya marica, salah satu jenis rempah-rempah. Bentuk merica kecil tetapi keras dan rasanya agak pedas. Mengandung makna sebagai watak yang keras, konsekwen, sportif dalam menghadapi sesuatu. Di samping itu, dikaitkan pula dengan peranan bandar Makasar sebagai salah satu pusat perniagaan rempah-rempah pada masa kebesaran kemaharajaan Gowa.

Kampung Maricaya terletak di kedua sisi Maradekaya-weg (sekarang Jalan Rusa) bagian selatan, di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Maradekaya, di sebelah timur berbatasan dengan *SS-weg*¹⁷, di sebelah selatan berbatasan dengan Dadiweg (sekarang Jalan Lanto Daeng Pasewang). Wilayahnya sama dengan wilayah kelurahan Maricaya sekarang. Penduduknya adalah orang-orang Makasar asli, bukan pendatang.

2.1.1.2 Kampung Maradekaya

Maradekaya adalah bahasa daerah Makasar yang artinya 'yang merdeka'. Menurut ceritera, disebut demikian karena

17) SS. adalah singkatan dari "Staats-Spoorwagen", jalanan kereta api negara. Diberi nama demikian, karena dari bekas jalanan kereta api inilah yang kemudian dijadikan/dirubah menjadi jalan raya. Sekarang jalan ini terbagi dua, yaitu dari utara ke selatan sampai ke perempatan jalan Mesjid Raya bernama jalan Bandang, dan lanjutannya terus ke selatan sampai ke Pabbaeng-baeng bernama Jalan Veteran.

dulu kampung ini terkenal sebagai tempat pertemuan dan tempat tinggal dari pendekar-pendekar yang tidak mau kompromi dengan penjajah. Kampung ini mulai tumbuh pada waktu "Benteng Ujung Pandang yang kemudian diberi nama Fort Rotterdam dikuasai dan ditempati Belanda pada tahun 1667".¹⁸⁾ Kampung Maradekaya juga diartikan sebagai kampung yang merdeka, karena dulu jikalau ada buronan dari daerah lain, setelah memasuki wilayah ini diterima dengan baik, diberikan perlindungan.

Wilayah Kampung Maradekaya di sebelah utara dibatasi oleh Schijfberg-weg (sekarang Jalan Sungai Saddang), di sebelah barat dibatasi oleh Maradekaya-weg (Jalan Gunung Latimojong), disebelah selatan berbatasan dengan Kampung Larangbangi (batasnya pada sekitar Jalan Gunung Salahutu sekarang), dan di sebelah timurnya berbatasan dengan wilayah *Zelfbestuur* Gowa, dibatasi oleh *SS-weg*.

Pada mulanya penduduk yang tinggal di kampung ini hanya terdiri dari orang-orang Makasar asli, kemudian juga datang menetap orang-orang Bugis, Jawa dan beberapa orang Cina.

2.1.1.3 Kampung Beru

Beru -adalah bahasa Makasar yang artinya baru. Dari namanya sudah menunjukkan bahwa kampung ini bukanlah kampung tua seperti halnya dengan kampung-kampung lainnya di Makasar. Sebagai mana halnya dengan Kampung Maradekaya, perkampungan inipun mulai tumbuh dan berkembang sesudah benteng Ujung Pandang dikuasai Belanda.

18) Penyerahan Benteng Ujung Pandang dari Kerajaan Gowa kepada Belanda, berdasarkan Perjanjian Bungaya pada tanggal 18 Nopember 1667, Pasal 11 dari perjanjian tersebut menyatakan :

Benteng Jumpandang bersama perkampungan dan tanah yang termasuk lingkungannya akan diserahkan kepada Kompeni. Dikutip dari Het Bungaisch Verdrag tulisan Dr. W. Stapel.

Sumber: Abd. Razak Daeng Patunru, *Sejarah Gowa*, Yayasan Kebudayaan Sul.Sel. dan Tenggara, Makasar 1667 hal. 52.

Pusat Kampung Beru berada di sekitar Jalan Somba Opu (dulu Strands-weg), Jalan Pattimura, Jalan Samiun, Jalan Wahab Tarru, Jalan Andi Makkasau, Jalan Bau Massepe dan Jalan Haji Bora sekarang. Adapun batas-batas wilayahnya. Di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Balandaya, dibatasi oleh Prince Hendrikpad dan Hogepad (sekarang Jalan Riburane dan Jalan Jenderal Ahmad Yani; di sebelah timur dibatasi oleh Jalan Jenderal Sudirman (dulu Hospital-weg), di sebelah selatan bagian timur berbatasan dengan Kampung Mangkura dan di sebelah selatan bagian baratnya berbatasan dengan Kampung Maloku, batasnya di sekitar Jalan Ranggong dan Jalan Ince Nurdin sekarang, di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makasar. Di sebelah barat Kampung Beru yakni di tepi pantai membujur dari utara ke selatan terdapat Fort-weg (sekarang Jalan Benteng), Stalstraat dan Bolevaard (Jalan Penghibur atau Losari sekarang).

Di kampung ini terdapat Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam), beberapa kantor pemerintahan antara lain Balai Kota dan Kantor Gubernur. Juga terdapat Gereja Emmanuel, Gereja Katedral dan Sekolah Frater. Dalam wilayah ini juga terdapat *Koningsplein*, yaitu lapangan Karebosi.

Penduduknya adalah beberapa keluarga Belanda/Eropah. Baba-baba atau Cina peranakan dan Pakistan, orang-orang Makasar, Bugis dan Jawa.

2.1.1.4 Kampung Pisang

Diberi nama demikian, karena dulu kampung ini merupakan penghasil pisang yang terkenal di kota Makasar. Terletak di sekitar *Friedenburg-weg* (sekarang Jalan Gunung Lompobattang), sebelah selatan Maros-weg (Jalan Gunung Bawakaraeng), Ladjangiru-weg (Jalan Gunung Merapi), dan sekitar Pisang-weg (Jalan Gunung Tinggimae).

Kampung ini di utara dibatasi oleh Maros-weg, di sebelah timur dibatasi *Ladjangiru-weg*, di sebelah selatan dibatasi oleh Shijfberg-weg dan di sebelah barat dibatasi oleh selokan yang Hospital-weg (sekarang Jalan Jenderal Sudirman). Sekarang

wilayahnya dibagi ke dalam dua kelurahan yaitu Kelurahan Pisang Utara dan Kelurahan Pisang Selatan.

Penduduknya terdiri dari orang-orang Makasar asli, Selayar, Bugis dan beberapa keluarga *Ince* atau Melayu.

2.1.1.5 Ambonkamp

Merupakan perkampungan kecil yang didiami oleh orang-orang Ambon yang sebagian besar adalah pegawai-pegawai pemerintahan dan militer. Perkampungan ini baru ada pada sekitar tahun 1946, yaitu pada masa revolusi kemerdekaan Republik Indonesia.¹⁹⁾

Wilayah Ambonkamp di sebelah utara berbatasan dengan kampung Gotong-gotong, batasnya sekitar Jalan Gunung Nona sekarang; di sebelah timur berbatasan dengan Kampung Maradekaya, dibatasi oleh *Maradekaya-weg* (Jalan Gunung Latimojong); di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Maricaya, dibatasi oleh *Schiffberg-weg* (Jalan Sungai Saddang) dan di sebelah barat dengan Kampung Pisang, dibatasi oleh Ladjangiruweg (Jalan Gunung Merapi).

2.1.1.6 Kampung Gotong-gotong

Kampung terletak di sekitar Jalan Sungai Limboto, Jalan Sungai Cendana, Jalan Sungai Pareman dan Jalan Sungai Poso sekarang. Wilayahnya di sebelah utara dibatasi oleh Marosweg, di sebelah timur dibatasi *Maradekaya-weg*, di sebelah selatan berbatasan dengan Ambonkamp, dan di sebelah barat dibatasi Ladjangiruweg. Sekarang dimasukkan ke dalam wilayah Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Makasar.

Penduduknya kebanyakan orang Makasar, Selayar dan beberapa keluarga Bugis.

2.1.1.7 Kampung Renggang

Wilayah Kampung Renggang terletak di sisi utara Marosweg bagian barat. Di sebelah utara dan timurnya berbatasan de-

19) Wawancara dengan Muh. Kasim Jahja, di Ujung Pandang, tanggal 7 September 1983.

ngan wilayah distrik Wajo. Batas di sebelah utaranya adalah selokan yang membatasinya dengan Kampung Pattunuang. Selokan ini menyusur dari *Hospital-weg* menyusur ke timur melintasi *Friedenburg-weg* (Jalan Gunung Lompobatang) sejajar dengan Jalan Sungai Kelara sekarang. Batas sebelah timurnya sekitar Jalan Sungai Calendu sekarang. Di sebelah selatan dibatasi oleh *Maros-weg*. Di sebelah barat berbatasan dengan lapangan Karebosi (*Koningsplein*), dibatasi oleh *Hospital-weg*.²⁰⁾

Penduduk yang tinggal di sini umumnya adalah orang-orang Makasar dengan mata pencaharian bertani dan ada juga yang berjualan di pasar.

2.1.1.8 Kampung Maluku

Penamaan kampung ini dengan *Maloku*, dimaksudkan adalah kepulauan Maluku yang sejak dulu terkenal sebagai daerah penghasil rempah-rempah. Kampung ini diperkirakan sudah ada sejak terbuka dan terjalinnya hubungan dagang antara Kerajaan Gowa dan Maluku sekitar awal abad ke-17. Bagi orang-orang Maluku yang datang dan ingin menetap di Gowa ditempatkan di kampung ini. Jadi pada mulanya merupakan perkampungan orang-orang yang berasal dari Maluku.

Wilayah Kampung Maluku di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Beru, batasnya di sekitar Jalan Ranggong sekarang, di sebelah timur berbatasan dengan Kampung Mangkura, dibatasi *Generaal Van Dalen-Weg* (sekarang Jalan Sultan Hasanuddin) di sebelah timur bagian utara dan *Bessi-weg* (sekarang Jalan Arief Rate) di sebelah timur bagian selatan. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Kokolojin – Distrik Mariso, dibatasi oleh *Klapperlaan* (sekarang Jalan Haji Bau). Di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makasar.

20) Wawancara dengan M. Udin, di Ujung Pandang, pada tanggal 19 Nopember 1983.

2.1.1.9 Kampung Mangkura

Wilayah Kampung Mangkura dilintasi Hospital-weg Di sebelah utaranya berbatasan dengan Kampung Beru batasnya di sekitar Jalan Ince Nurdin sekarang. Di sebelah timur berbatasan dengan Kampung Pisang dan Kampung Maricaya, dibatasi oleh got/selokan besar.^{2 1)} Di sebelah selatan bagian timur berbatasan dengan Kampung Dadi Distrik Mariso, dibatasi oleh *Dadi-weg*, di sebelah selatan bagian barat berbatasan dengan Kampung Kunjungmae Distrik Mariso, dibatasi oleh Klapperlaan. Di sebelah barat berbatasan dengan Kampung Maluku dibatasi Generaal *Van Dalen-Weg* dan *Bassi-weg*.

Penduduknya adalah orang-orang Makasar, Bugis, beberapa Cina, Eropah/Belanda.

2.1.1.10 Kampung Lariangbangngi

Penanamannya diambil dari bahasa Makasar *lariang* artinya membawa lari dan *bangi* artinya malam. Jadi kata lariangbangngi berarti "membawa lari pada waktu malam". Dimaksudkan di sini *silariang* atau *annyala* (=minggat atau kawin lari).^{2 2)}

Konon menurut ceritera, kampung ini dulu terkenal dengan dara-dara jelitanya. Karena kejelitaan dari dara-dara itulah, maka sampai sekarang masih sering disenandungkan dalam syair-syair Makasar dengan *Bombongna Larangbangngi*, dara jelita dari Lariangbangngi.

Dimaklumi bahwa ketika itu adat demikian ketat, terutama dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan syarat-syarat dapat terselenggaranya suatu perkawinan secara wajar. Akibat inilah, sehingga banyak gadis-gadis dari kampung ini yang *nilariang* (= dibawa lari) oleh pria yang ingin mempersun-

21) Lebih jelasnya lihat kembali batas sebelah barat Kampung Pisang dalam uraian 2.1.1.4.

22) Terjadinya suatu peristiwa seperti ini, merupakan suatu kasus adat yang menimbulkan konsekwensi *siri*, yaitu malu bagi pihak keluarga perempuan. Apabila keduanya ditemukan pada saat minggat itu, tebusannya adalah maut. Eksees yang timbul karena siri dalam kalangan suku Bigus-Makasar, pengaruhnya sampai sekarangpun masih terasa.

tingnya. Lebih lanjut diceriterakan, bahwa pria membawa lari perempuan itu pada umumnya ke kampung. Maradekaya, karena sesudah mereka berada di sana sudah menganggap dirinya bebas atau "merdeka" karena mendapatkan perlindungan dari konsekuensi siri dari pihak keluarga perempuan (*tuninakisiri* = orang yang dipermalukan). Dari Kampung Maradekaya inilah kemudian diurus sesuai dengan adat yang berlaku.

Wilayah Kampung Lariangbangngi, di sebelah timur berbatasan dengan Kampung Maccini, di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Tompobalang dan Kampung Bontoala, di batasi oleh Maros-weg, di sebelah barat berbatasan dengan Kampung Pisang, dibatasi oleh *Maradekaya-weg*, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Maradeka. batasnya di sekitar Jalan Gunung Salahutu sekarang.

Penduduknya mayoritas orang-orang Makasar asli, kemudian menyusul penduduk dari daerah lainnya di Sulawesi Selatan yang menetap di sini.

2.1.1.11 Kampung Maccini

Kampung Maccini merupakan wilayah distrik Makasar pada bagian timur. Terletak pada sisi selatan *Maros-weg* bagian timur. "Pada sebelah utara bagian timur berbatasan dengan Kampung Kawaka, dibatasi oleh *Maros-weg*"²³), pada sebelah utara bagian barat berbatasan dengan Kampung Tompobalang, juga dibatasi oleh *Maros-weg* pada sebelah timur dan selatannya berbatasan dengan wilayah *Zelfbestuur Gowa*, pada sebelah barat berbatasan dengan Kampung Lariangbangngi.

Penduduk yang tinggal di sini umumnya adalah orang-orang Makasar dan Bugis. Mata pencaharian mereka bercocok tanam dan ada juga beberapa orang di antaranya yang berjualan kecil-kecilan.

23) Wawancara dengan Abdullah, di Kalukuang Ujung Pandang, pada tanggal 26 Nopember 1983.

2.1.2 Distrik Wajo

2.1.2.1 Kampung Bontoala

Kampung ini terletak pada kedua sisi *Pattunuang-weg*^{2 4)}, yaitu pada sisi sebelah utara dan selatan Jalan Gunung Bulusa-raung dan Jalan Mesjid Raya sekarang. Di sebelah timur berbatasan dengan Kampung Baraya dan Kampung Tompobalang, batasnya di sekitar *SS-weg* (Jalan Veteran) menyusur ke timur kemudian ke utara yaitu di sebelah barat kampus lama Universitas Hasanuddin. Di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Layang dan Kampung Macciniayo, dibatasi oleh *Wijnveld-weg* (Jalan Diponegoro) pada bagian barat dan sekitar Jalan Bunga Ejaya sekarang pada bagian timur. Di sebelah barat berbatasan dengan Kampung Patunuang dan Kampung Gaddong, dibatasi oleh selokan besar yang mengalir ke utara melintasi *Pattunuang-weg*. Selokan tersebut sekarang berada tidak jauh pada arah sebelah barat Jalan Pajenekang. Dalam kampung inim melintas *Lajang-weg*.

Penduduknya adalah Makasar asli dan orang-orang Makasar yang berasal dari Takalar, Jebeponto dan Bantaeng. Selain itu juga terdapat orang Bugis.^{2 5)} Penduduk di sini selain mata pencahariannya berdagang/berjualan, bertani, banyak yang bekerja sebagai buruh pelabuhan.

2.1.2.2 Kampung Wajo

Penamaannya diambil dari nama salah satu kerajaan Bugis di Sulawesi Selatan pada zaman lalu yaitu "Kerajaan Wajo"^{2 6)} Diberi nama demikian, karena pada mulanya kampung ini dihuni dan dikembangkan oleh orang-orang yang berasal dari Wajo. Sampai sekarangpun, penduduknya masih kebanyakan keturunan Bugis-Wajo.

Sejak dulu, memang orang Bugis khususnya yang berasal dari Wajo terkenal sebagai pedagang keliling dan suka mengem-

24) *Ibid.* hal. 2

25) Wawancara dengan Daeng Sutte, di Ujung Pandang, tanggal 30 Oktober 1983.

26) Raja dari Kerajaan Wajo disebut dengan nama gelaran Arung Matowa Wajo.

bara. Faktor lain yang menyebabkan mereka berdatangan di Makasar, antara lain dapat kita lihat pada keterangan berikut ini : "Sekitar tahun 1670, di daerah Wajo terjadi peperangan dan kelaparan, sehingga masyarakatnya ada yang pindah ke daerah lain" ²⁷), termasuk ke Makasar. ²⁸)

Kampung Wajo terletak di kedua sisi *Van Schelleg-weg* (sekarang Jalan Irian) bagian utara dan kedua sisi *Rumbia-weg* (Jalan Seram) bagian barat. Di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Malimongang, di sebelah timur berbatasan dengan Kampung Macciniayo, di sebelah selatan berbatasan dengan "Kampung Ende Caddia" ²⁹), di sebelah barat berbatasan dengan Kampung Melayu dan kampung Butung.

2.1.2.3 Kampung Melayu

Merupakan perkembangan lanjut dari perkampungan "orang-orang Melayu yang telah ada di Makasar sejak abad ke-16" ³⁰) Mereka adalah pedagang-pedagang Islam yang kemudian membentuk perkampungan sendiri.

Suatu sumber mengemukakan sebagai berikut: Kampung Melayu di kota Makasar ini baru ada pada masa pemerintahan Belanda. Namun jauh sebelumnya itu orang Melayu sudah ada yang menetap di Gowa/Makasar. Tempat pemukiman mereka yang terakhir sebelum menempati Kampung Melayu ialah di Kampung Ujung Tanah yang banyak didiami orang-orang Bugis. Oleh karena sering tidak ada kecocokan dan selalu diganggu

-
- 27) Prof.Dr. POL. Tobing. *Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa*, hal. 23.
 - 28) Abdurrazak Daeng Patunru, *Sejarah Wajo*, Cetakan II, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, Ujung Pandang, 1983, hal. 57.
 - 29) Wawancara dengan Haji Husain dan Muhayang Daeng Situju, di Ujung Pandang, pada tanggal 17 Juli 1983.

Disebut Kampung *Ende Caddia* karena ada juga yang disebut *Ende Lompoa* artinya Ende Besar. Ende Caddia artinya Ende Kecil, karena wilayahnya lebih kecil dibandingkan dengan Ende Lompoa. Kedua wilayah ini diperrintah seorang Kepala Kampung yaitu Kepala Kampung Ende. Lebih jelasnya lihat uraian 2.1.2.13. mengenai Kampung Ende.

oleh orang-orang Bugis ketika itu, maka atas permintaan mereka dan seizin pemerintah Hindia Belanda di Makasar, maka kepada mereka diberikan suatu tempat yang masih merupakan hutan untuk ditinggali. Hutan ini bernama Bulekang yang kemudian ditebas dijadikan perkampungan. Inilah yang menjadi Kampung Melayu. Pemimpin Kampung Melayu yang pertama diangkat bernama Incik Cukka Abdul Rasul pada tanggal 28 Mei 1706.³¹⁾

Berdasarkan sumber di atas, maka Kampung Melayu yang dimaksudkan di sini diperkirakan ada pada sekitar awal abad ke-18. Ini didasarkan pada pengangkatan Incik Cukka Abdul Rasul sebagai kepala kampung Melayu yang pertama dengan gelar "Kapitein" pada tahun 1706. Pemimpin Kampung Melayu lainnya yang dikenal sesudah Incik Cukka Abdul Rasul ialah "Kapitein Moehamat Hasjang tahun 1814"³²⁾

Selanjutnya dikemukakan: Sesudah tahun 1906, penduduk Kampung Melayu sudah bercampur dengan suku bangsa lain.³³⁾ Mereka bekerja sebagai pedagang, pegawai pemerintahan dan guru syara atau guru agama seperti guru mengaji dan imam.

Kampung Melayu terletak di sebelah barat *Van Schelleweg* (Jalan Irian) bagian tengah, sekitar Banda-straat (sekarang Jalan Banda), *Templestraat* (Jalan Sulawesi) dan sekitar jalan Sangir sekarang. Wilayahnya di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Butung, di sebelah timur berbatasan dengan Kampung Wajo, di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Cina dan

-
- 30) Kutipan bebas dari buku: Mattulada, *Agama Islam Di Sulawesi Selatan*. Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1976, hal. 3.
 - 31) Abdoerahim, "Kedatangan Orang Melayu di Makasar", *Buku Peringatan Persatuan Tionghoa Indonesia Peranakan (Pertip) Makasar 1946-1953*, Makasar, 1953 hal. 138-139.
 - 32) *Translaat Maleijds geschrift voor zien van en kap van den Capitein Maleijdsch Moehamat Hasjang geboek in de Register van Kampong Malajoe Onder No. 262, Voor de Translatie: Muller, 1814, Koleksi Arsip Perwakilan Arsip Nasional RI. Di Daerah Tingkat I Sul.Sel. Ujung Pandang.*
 - 33) Abdoerahim, *op.cit.* hal. 139.

Kampung Kecak, di sebelah barat berbatasan dengan wilayah pelabuhan Makasar, dibatasi oleh Passar-straat (sekarang Jalan Nusantara).

2.1.2.4 Kampung Pattunuang

Kata *Pattunuang* berasal dari bahasa daerah Makasar yaitu *tumu* artinya bakar. Pattunuang berarti tempat pembakaran. Ada keterangan yang mengatakan, disebut demikian karena di tempat ini dulu dipotong dan dibakar/dimasak hewan pada waktu diselenggarakan upacara-upacara adat di lapangan Karebosi, misalnya acara-acara syukuran karena panen berhasil atau secara minta hujan akibat kemarau panjang dilanjutkan dengan kurban. Apakah benar demikian, masih memerlukan penelitian yang seksama.

Kampung Pattunuang terletak pada kedua sisi Pattunuangweg bagian barat dan sisi barat *Friedenburgweg* (Jalan Gunung Lompobatang) bagian utara. Wilayahnya di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Ende, di sebelah timur berbatasan dengan Kampung Bontoala dan Kampung Gaddong, di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Renggang, di sebelah barat berbatasan dengan lapangan Karebosi, dibatasi oleh *Hospital-Weg* (Jalan Jenderal Sudirman) bagian utara.

Sebelum pendudukan Jepang, di kampung ini ada pasar buah-buahan, sayur-mayur, ikan dan daging. Letaknya kira-kira pada bangunan Kantor Bank Indonesia sekarang.^{3 4)}

Penduduk Kampung Pattunuang terdiri dari beberapa suku bangsa antara lain Makasar-Bugis, Madura, Jawa dan Cina. Mata pencaharian mereka berdagang/berjualan, beberapa orang pandai emas, usaha pertukangan dan tukang cukur.

2.1.2.5 Kampung Butung

Penanaman wilayah ini dengan Kampung Butung, berasal dari kata Buton yaitu nama dari sebuah pulau yang berdasarkan

34) Wawancara dengan Abdullah, di Kampung Kalukuang Ujung Pandang, pada tanggal 26 Nopember 1983.

pembagian wilayah administrasi pemerintahan sekarang ini berbentuk daerah tingkat II/kabupaten termasuk dalam wilayah Daerah Tingkat I Propinsi Sulawesi Tenggara. Dulu Buton berbentuk kesultanan dan pada masa kekuasaan Belanda termasuk dalam wilayah *Afdeeling Boeton en Laiwui*.

Kampung ini diberi nama demikian, karena pada mulanya merupakan perkampungan pelaut-pelaut yang berasal dari Buton. Dimaklumi, bahwa orang-orang Buton sejak dahulu memang terkenal sebagai pengembara/pelaut-pelaut ulung dalam mengarungi samudera di kawasan Nusantara. Pada tempat-tempat yang didatanginya yang memungkinkan kehidupan mereka selanjutnya dapat berkembang, mereka menetap, membentuk kelompok pemukiman, di antaranya di Makasar.

Namun demikian, di kampung ini terdapat juga orang-orang Makasar dan Bugis. Mata pencaharian mereka sebagian besar pelaut, nelayan dan ada pula yang berjualan di pasar-pasar. Di sini terdapat sebuah pasar yang cukup ramai dan terkenal sejak lama yaitu Pasar Butung. Dulu pasar ini selain berfungsi sebagai tempat perbelanjaan penduduk, juga menjadi tempat perdagangan gelap barang-barang selundupan. Hal ini disebabkan antara lain karena letak kampung ini berdekatan dengan daerah pelabuhan Makasar: Juliana Cade (sekarang Pangkalan Sukarno).

Letak kampung ini di sebelah utara dibatasi oleh *Rumbia-Weg* (Jalan Seram), di sebelah timur dibatasi oleh *Van Scheeleeg-weg* (Jalan Irian), di sebelah selatan dibatasi oleh *Banda-straat* (Jalan Banda). Pada sebelah baratnya dilintasi oleh *Templestraat* (Jalan Sulawesi) yang menjadi batas kampung ini dengan Kampung Cangirak.

2.1.2.6 Kampung Malimongang

Kampung ini di sebelah utara berbatasan dengan Distrik Ujung Tanah, dibatasi oleh Jalan Satando sekarang, di sebelah timur berbatasan dengan Kampung Tabaringang, dibatasi oleh *Lajang-weg* bagian utara (Jalan Jos Sudarso), di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Maccini Ayo dan Kampung Wajo,

dibatasi oleh *Rumbia-weg* (Jalan Seram) dan di sebelah barat berbatasan dengan Kampung Mampu dan Kampung Rompegading.

Pada mulanya penduduknya terdiri dari orang-orang Makassar asli, kemudian datang orang-orang Bugis yang tinggal menetap di daerah ini. Pada umumnya mata pencaharian mereka berdagang kecil-kecilan hasil bumi, berkebun sedangkan beberapa orang Bugis berjualan.

2.1.2.7 Kampung Layang

Kampung ini di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Patingalloang, di sebelah timur berbatasan dengan Kampung Baraya, dibatasi oleh kali, di sebelah selatan berbatasan dengan kampung Bontoala, dibatasi oleh Jalan Bunga Ejaya sekarang, di sebelah barat berbatasan dengan Kampung Maccini Ayo, dibatasi oleh Lajang-weg (Jalan Andalas).

Penduduk yang tinggal di sini adalah orang-orang Makassar, kemudian datang menetap orang-orang Bugis. Dulu di sini terdapat sebuah pasar pribumi yang cukup ramai, juga terdapat Penjara Makasar yang lebih populer ketika itu dengan nama Penjara Layang. Rumah penjara ini pada kemudian hari dipindahkan ke sebelah utara lapangan Karebosi pada sudut sebelah timur: *Schelleg-weg* dan sebelah utara Hogepad.

2.1.2.8 Kampung Macciniayo

Kampung ini di sebelah utaranya berbatasan dengan Kampung Malimongang, dibatasi oleh *Rumbia-weg* (Jalan Seram) pada sebelah barat berbatasan dengan kampung Layang, dibatasi Lajang-weg, pada sebelah selatan berbatasan dengan kampung Bontoala, dibatasi oleh *Wijnveld-weg*, dan pada sebelah barat berbatasan dengan Kampung Wajo, dibatasi oleh Jalan Muhammadiyah sekarang.

Penduduk kampung ini dulu sangat kurang, karena merupakan daerah perkebunan, pada umumnya mereka yang tinggal

di sini adalah orang-orang Makasar dengan mata pencaharian sebagai petani dan buruh/kuli.

2.1.2.9 Kampung Mampu

Kampung ini pada sebelah utaranya berbatasan dengan Kampung Rampegading, batasnya sekitar Jalan Tarakan sekarang, di sebelah timurnya berbatasan dengan Kampung Malimongang, dibatasi oleh *Van Schelleg-weg*, di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Butung, dibatasi oleh *Rumbia-weg*, dan di sebelah baratnya berbatasan dengan Kampung Cangirak, dibatasi oleh *Temple-straat*.

Mampu adalah nama salah satu daerah dalam wilayah Kabupaten Bone sekarang. Dulu, daerah Mampu ini merupakan kerajaan kecil yang merupakan salah satu kerajaan *palili* (=bagian/bawahan) dari Kerajaan Bone. Penduduk dari sinilah yang menumbuhkan Kampung Mampu pada mulanya. Namun demikian, di samping itu terdapat juga penduduk orang-orang Makasar yang jumlahnya relatif lebih kecil.

Mata pencaharian mereka, ada yang berjualan atau berdagang kecil-kecilan dan ada juga yang bekerja sebagai buruh/kuli.

2.1.2.10 Kampung Rompegading

Kata *Rompegading* adalah bahasa Makasar yang berasal dari kata *Rampe* artinya terdampat dan *gading* diartikan bambu kuning. Jadi arti sebenarnya dari rompegading ialah bambu kuning yang terdampar. Dugaan kuat yang menyebabkan sehingga disebut demikian, karena fungsi daerah ini dulu sebagai salah satu pelabuhan dalam wilayah Pelabuhan Makasar. Dalam hal ini rompe diterjemahkan dalam pengertian berlabuh dan gading dilambangkan sebagai perahu.

Wilayah kampung ini di sebelah utara berbatasan dengan wilayah Distrik Ujung Tanah, batasnya di sekitar Jalan Satando sekarang, di sebelah timur berbatasan dengan kampung Malimongang, dibatasi oleh *Van Schelleg-weg*, di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Mampu, dibatasi oleh Malimongang-

weg (sekarang Jalan Tarakan), dan di sebelah barat berbatasan dengan Kampung Cangirak, dibatasi oleh *Temple-straat*.

Penduduk di sini adalah orang-orang Makasar asli dan Bugis. Mata pencaharian mereka di antaranya ada yang berjualan dan ada pula sebagai buruh/kuli antara lain di pelabuhan.

2.1.2.11 Kampung Kecak

Kecak adalah penamaan orang-orang Makasar terhadap kecap. Menurut salah seorang informan, kampung ini diberi nama demikian. karena mata pencaharian penduduknya umumnya adalah membuat dan berjualan kecap. Haji Husain mengemukakan. kampung ini mulai ada dan berkembang sesudah tahun 1940 an.

Kampung Kecak merupakan perkampungan kecil dalam wilayah Kampung Cina. Terletak di antara sebelah utara Jalan Lembe dan sebelah selatan Jalan Sangir sekarang. Di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Melayu, batasnya di sekitar Jalan Sangir sekarang, di sebelah timur berbatasan dengan Kampung Ende Caddia, batasnya pada sekitar sisi sebelah barat *Van Schelleg-weg*, di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Arab dan Kampung Cina, dibatasi oleh Jalan Lembe sekarang, di sebelah barat berbatasan dengan Kampung Cina.

Penduduknya pada umumnya adalah orang-orang *Cinatotok* (Cina asli) dan *Baba-baba* (Cina peranakan). Diperintah seorang kepala kampung (*Wijkmeesters*) yang merupakan pembantu dari Major Cina.

2.1.2.12 Kampung Arab

Diberi nama Kampung Arab karena merupakan perkampungan dari orang-orang Arab, baik Arab asli maupun yang sudah berdarah campuran atau peranakan Arab³⁵). Kampung ini terletak antara Kampung Ende dan Kampung Cina di sebelah

35) Wawancara dengan Muhayang Daeng Situju, di Ujung Pandang, pada tanggal 20 Juli 1983.

selatan dengan Kampung Kecak di sebelah utara. Di sebelah timurnya berbatasan dengan Kampung Ende (Ende Lompoa) dan di sebelah barat berbatasan dengan Kampung Cina. Di sini terdapat sebuah mesjid tua yang oleh masyarakat sekarang populer dengan sebutan nama Mesjid Arab.

Mata pencaharian penduduk yang tinggal di sini umumnya adalah berjualan bahan pakaian/kain.

2.1.2.13 Kampung Ende

Diberi nama Kampung Ende, karena penduduknya kebanyakan orang-orang dari pulau Ende (Nusatenggara) dibandingkan dengan orang-orang Makasar.³⁶⁾

Wilayahnya di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Kecak dan Kampung Wajo, di sebelah timur bagian selatan berbatasan dengan Kampung Pattunuang, batasnya pada sekitar Jalan Akademis sekarang, pada sebelah timur bagian utara dibatasi oleh *Van Schelleg-weg*, di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Cina, di sebelah barat juga berbatasan dengan Kampung Cina.

Kampung Ende dilintasi oleh *Van Schelleg-weg*. Pada sisi sebelah barat *Van Schelleg-weg* oleh masyarakat setempat disebut Kampung Ende Lompoa, pada sisi sebelah timur disebut Kampung Ende Caddia. Di sini terdapat kompleks pekuburan yang cukup luas yang kemudian oleh masyarakat setempat diberi nama dengan "Kampung Jarak". Jarak adalah bahasa Makasar yang artinya kuburan.

2.1.2.14 Kampung Cina

Diberi nama Kampung Cina, karena pada umumnya penduduknya adalah *Cina Totok* (Cina asli)³⁷⁾ Kapankah perkampungan orang-orang Cina ini ada di Makasar? Belum diketahui dengan pasti. Untuk menelusuri masalah ini, di dalam salah satu

36) Wawancara dengan Haji Husein dengan Muhayang Daeng Situju, di Ujung Pandang, pada tanggal 17 dan 20 Juli 1983.

37) Wawancara dengan Haji Husain dan Mahayang Daeng Situju, di Ujung Pandang, tanggal 17 dan 20 Juli 1983.

sumber yaitu Pengumuman Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1847 mengenai dinyatakannya Pelabuhan Makasar sebagai pelabuhan bebas, antara lain dikemukakan sebagai berikut.

4. dat van de Chinesche jonken, welke te Makasar worden gelost, niet meer goverderd zullen worden de recognitiegeden, bedoeld bij art. 20 van de publikatie van 28 Augustie van 4 October 1810 no. 20 (Staatsblad no. 76). nooh ook de belasting ten behoeve van het Chinesche hospital, voorgeschreven bij Resolutie van 5 Maart 1832 no. 1 (Staaatsblad no. 11).

(4. bahwa tidak lagi akan dituntut uang rekognasi dari jung-jung Cina yang dibongkar di Makasar, yang dinyatakan pada ayat 20 dari publikasi 28 Agustus 1818 (Lembaran Negara no. 58), dan Resolusi 4 Oktober 1819 No. 20 (Lembaran Negara no. 76), tetapi juga pajak yang berhubungan dengan rumah sakit orang Cina, yang dinyatakan pada Resolusi 5 Maret 1832 No. 1 (Lembaran Negara no. 11)³⁸⁾

1. Pada tahun 1818, jung-jung (perahu-perahu dagang) Cina telah banyak berlabuh di Makasar
2. Pada tahun 1832 sudah ada rumah sakit orang-orang Cina di Makasar

Berdasarkan hal ini, dapat dipastikan bahwa dalam tahun 1818 orang-orang Cina telah datang ke Makasar. Dalam tahun 1832 jumlah mereka sudah banyak karena telah mempunyai rumah sakit sendiri, dengan kata lain Kampung Cina sudah ada pada waktu itu.

Wilayah Kampung Cina terletak di sekitar *Muurstraat* (Jalan Timor) bagian barat, *Templestraat* (Jalan Sulawesi) sebelah selatan Jalan Sangir, sekitar Jalan Lembeh dan Jalan Bali sekarang. Pada bagian utaranya berbatasan dengan Kampung Melayu, batasnya di sekitar Jalan Sangor sekarang di sebelah timur berbatasan dengan Kampung Kecak, Kampung Arab, Kampung Ende dan Jalan Irian (dulu *Van Schelleweg*) di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Balandaya, batasnya sekitar Jalan

38) Publikatie van Wege In Naam Des Konings, De Minister van Staat, Gouverneur General van Nederlandsch Indie, 1846. *Koleksi Arsip Perwakilan Arsip Nasional RI Di Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan*, Ujung Pandang.

Sumba sekarang di sebelah barat berbatasan dengan wilayah pelabuhan Makasar, dibatasi oleh *Passaarstraat* (Jalan Nusantara).

Mata pencaharian penduduknya ialah tukang kayu, berjulan kebutuhan sehari-hari antara lain perabot rumah tangga sayur-mayur, daging dan beberapa pengusaha warung/kedai minuman.

2.1.2.15 Kampung Cangirak

Kampung ini terletak di sepanjang *Passarstraat* bagian utara (Jalan Nusantara) mulai dari sebelah barat Kampung Butung ke utara sampai ke *Goehorn-weg* (Jalan Satando). Wilayahnya di sebelah utara berbatasan dengan Distrik Ujung Tanah, dibatasi oleh *Coehorn-weg*, di sebelah timur dari utara ke selatan berbatasan dengan Kampung Rompegading, Kampung Mampu dan Kampung Butung, di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Melayu, dan di sebelah barat berbatasan dengan daerah pelabuhan Makasar, Juliana Cade (Pelabuhan Sukarno).

Di Kampung Cangirak terdapat pasar yang merupakan pusat perbelanjaan dan perdagangan yang paling ramai di kota Makasar pada sekitar tahun 1920–30 an. Banyak barang-barang dari luar negeri yang dipasarkan di sini. Penduduknya adalah orang-orang Makasar, Bugis dan Cina.

2.1.2.16 Kampung Balandaya

Disebut demikian karena merupakan perkampungan khusus orang-orang Belanda/Eropah. Selain itu, pada masa kemudian di lokasi ini bertempat tinggal pula *Baba-baba* (Cina peranakan) yang berhasil menduduki status sosialekonomi yang memadai.³⁹⁾

Pada sebelah utara kampung ini berbatasan dengan Kampung Cina, pada sebelah timur berbatasan dengan Kampung Pattunuang, pada sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Baru, Sitrik Makasar, dibatasi oleh *Prince Hendrikpad* dan

39) Wawancara dengan Haji Husain dan Muhayhang Daeng Situju.

Hogepad (sekarang dalam Riburane dan Jalan Jenderal Ahmad Yani), dan di sebelah baratnya berbatasan dengan daerah pelabuhan Makasar, dibatasi oleh Pasar-straat (Jalan Nusantara).

Mata pencaharian penduduknya adalah pegawai pemerintah, militer dan beberapa pedagang.

2.1.2.17 Kampung Baraya

Kata *baraya* adalah bahasa Makasar yang artinya 'kandang'. Disebut demikian karena dulu di lokasi ini terdapat kandang untuk peternakan sapi dan kerbau.

Kampung Baraya terletak disisi utara *Pattunuang-weg* (Jalan Mesjid Raya) bagian timur, di sisi sebelah timur Oude *Tello-weg* bagian selatan (sekarang Jalan Sembilan terus ke Jalan Tinumbu menyusur ke utara kemudian membelok ke timur), di sisi sebelah barat *Tello-weg* (Jalan Sunu), atau di sekitar kampus lama Universitas Hasanuddin sampai ke kompleks Peku-buran Beroangong di utara.

Penduduk di sini masih sangat kurang, merupakan daerah rawa-rawa yang cukup luas. Penduduk umumnya adalah orang Makasar yang mata pencahariannya bercocok-tanam dan beternak.

2.1.2.18 Kampung Kawaka

Penamaan Kampung ini berasal dari bahasa Makasar, *kawa* artinya kawat. Disebut demikian karena wilayahnya dikelilingi dengan pasar kawat. Kampung ini termasuk wilayah kampung Baraya.⁴⁰⁾

Wilayah Kampung Kawaka di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Kalukuang, di sebelah timur berbatasan dengan wilayah *Zelfbestuur Gowa*, di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Maccini, dibatasi oleh *Maros-weg*, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kampung Tompobalang (Wajo Baru).

40) Wawancara dengan M. Udin di Ujung Tanah, tanggal 20 Nopember 1983, Abdullah dan Tima di Kalukuang Ujung Pandang, tanggal 26 Nopember 1983.

Pada masa pemerintahan Jepang, terjadi pemindahan penduduk dari Kampung Malimongang ke wilayah ini, maka sejak itu namanya dirubah menjadi Kampung Malimongang Baru. Penduduknya adalah orang Makasar dan Bugis dengan mata pencaharian bertani, buruh/kuli dan ada pula beberapa yang berjualan.

2.1.2.19 Kampung Tompobalang

Terletak antara Pattunuang-weg dan *Maros-weg* bagian timur. Di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Bontoala dan Kampung Baraya, dibatasi oleh *Pattunuang-weg* di sebelah timur berbatasan dengan Kampung Kawaka, di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Maccini dan Kampung Lariang-banggi, dibatasi oleh *Maros-weg*, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kampung Bontoala, dibatasi oleh *SS-weg*.

Kampung ini berada di tepian kali, karena itulah diberi nama *Tompobalang*. Dalam bahasa Makasar, *tompo* artinya terletak di atas dan *balang* artinya kali. Dimaksudkan kampung yang terletak di tepian kali atau sungai. Di kampung ini terdapat ranch atau peternakan sapi dan kerbau.

Dalam masa Jepang dan sesudahnya, akibat dipindahkannya penduduk dari Kampung Wajo ke sini, namanya kemudian dirubah menjadi Kampung Wajo Baru. "Pada waktu itu, Kam-

pung Tompobalang merupakan salah satu pusat kota di samping Kampung Bontoala"⁴¹⁾ Di sini terdapat sebuah pasar sebagai tempat perdagangan dan perbelanjaan yang sudah agak ramai, yaitu Pasar Kalimbu. Sampai sekarang pasar ini masih ada.

Kebanyakan penduduknya adalah suku Makasar dan Bugis, termasuk yang berasal dari daerah lain. Di samping itu terdapat juga beberapa suku bangsa lainnya di Indonesia dan juga Cina.

2.1.2.20 Kampung Gaddong

Gaddong adalah penyebutan orang-orang Makasar yang

41) Dr. J.W. De Klein, *op. cit.* hal. 2

berarti gedung tempat penyimpanan harta kekayaan atau gedung perbendaharaan. Kampung ini diberi nama demikian, karena dulu di sini terdapat sebuah bangunan gedung perbendaharaan milik Kerajaan Gowa yang berada di bawah pengawasan Karaeng Karunrung, penguasa wilayah ini sebelum perjanjian Bungaya 1667. Pada fase kemudian gedung ini difungsikan untuk menyimpan barang-barang dagangan terutama hasil hutan sebelum diekspor.

Wilayah Kampung Gaddong terletak di sisi selatan *Pattunuang-weg* (sekarang Jalan Gunung Bulusaraung), di sisi sebelah timur *Friedenburg-weg* (Jalan Gunung Lompobatang) bagian utara. Di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Bontoala, di sebelah timur juga berbatasan dengan Kampung Bontoala, di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Renggang, di sebelah barat berbatasan dengan Kampung Pattunuang.

Penduduknya kebanyakan adalah orang-orang Makasar dan beberapa keluarga *Ince* atau keturunan Melayu. Mata pencaharian mereka terdiri dari beberapa pedagang, selain itu buruh atau pekerja kasar.

2.1.3 Distrik Ujung Tanah

Distrik Ujung Tanah merupakan distrik yang terletak pada wilayah sebelah utara Makasar. Kampung-kampung yang ada dalam distrik ini ialah :

2.1.3.1 Kampung Ujung Tanah

Wilayahnya terletak pada sekitar *Coehorn-weg* (Jalan Sattando) dan *Lajang-weg* sebelah utara (sekarang Jalan Jos Sudarso) serta sebelah utara *Smalle-laan* (sekarang Jalan Cakalang). Batas-batas wilayahnya ialah: Pada sebelah utara berbatasan dengan Selat Makasar, pada sebelah barat berbatasan dengan Kampung Panampu, dibatasi oleh kali, pada sebelah selatan berbatasan dengan wilayah Distrik Wajo yaitu Kampung Tabaringang, Kampung Malimongang dan Kampung Rompegading, dibatasi oleh *Coehorn-weg*, dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makasar.

Dalam distrik ini terdapat pelabuhan perahu layar/niaga yaitu Paotere yang sampai sekarang masih tetap berfungsi.

Penduduknya terdiri dari orang-orang Makasar dan Bugis.⁴²⁾ Matapencaharian mereka sebagian besar adalah nelayan dan buruh/kuli. Pada umumnya penduduk laki-laki dewasa di sini, sebelum kejatuhan Kerajaan Gowa, merupakan lasykar-lasykar dari armada laut *Kerajaan Gowa-Tallo*⁴³⁾

2.1.3.2 Kampung Tabaringang

Kampung ini terletak pada sisi sebelah timur Lajang-weg bagian utara dan pada sekitar kedua sisi *Oude Tello-weg* bagian tengah. Pada sebelah utara berbatasan dengan Kampung Ujung Tanah dan Kampung Panampu, dibatasi oleh Smalle-iaan dan *Oude Tello-weg*, pada sebelah timur berbatasan dengan Kampung Baraya, dibatasi oleh kali, di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Layang, pada sebelah barat berbatasan dengan Kampung Malimongang, dibatasi oleh *Lajang-weg*.

Dalam masa kebesaran Kerajaan Gowa-Tallo, kepala pemerintahan wilayah ini menduduki pula jabatan sebagai salah seorang laksamana dari armada laut Kerajaan Gowa-Tello. Sebagaimana halnya dengan penduduk Kampung Ujung Tanah, penduduk dewasa kampung inipun merupakan lasykar armada laut Kerajaan Gowa.

42) Abdurrahim, *op. cit.* hal. 138

43) Disebut *Gowa Tallo*, karena Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo pada hakekatnya merupakan dua buah kerajaan yang terikat dalam suatu persekutuan yang erat, kokoh. Dalam persekutuan tersebut, Gowa menduduki posisi yang lebih diatas karena dianggap sebagai kakak, dalam arti membawahi Tallo yang dianggap sebagai adik.

Sepanjang sejarahnya, didalam struktur pemerintahan Kerajaan Gowa, maka setiap raja yang memerintah di Kerajaan Tallo secara otomatis menduduki pula jabatan *Baligauk* yaitu semacam mahapatih atau mengkubumi, juga merangkap sebagai panglima atau laksamana dari pada seluruh armada laut Kerajaan Gowa.

Persekutuan Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo ini, dilambatkan dalam kalimat Makasar: *ruwa karaeng sekreat*, dua raja tetapi rakyatnya adalah satu. Penulis-penulis asing (Belanda) menyebutnya *Zusterstaten*, dua kerajaan bersaudara.

Pada umumnya penduduk yang ini pada sekitar tahun 1900 an sampai tahun 1950 an, adalah orang-orang Makasar asli, suku Makasar yang berasal dari Takalar dan Jeneponto. Selain itu juga terdapat orang-orang Bugis. "Mata pencaharian mereka adalah nelayan, sedangkan orang-orang Makasar yang berasal dari daerah lain kebanyakan bekerja sebagai buruh pelabuhan. Sebagian kecil berjualan".⁴⁴⁾

2.1.3.3 Kampung Panampu

Terletak pada sisi sebelah utara Oude Tello-weg bagian utara. Wilayah kampung ini pada sebelah utara berbatasan dengan Selat Makasar, pada sebelah timur berbatasan dengan Tallo, pada sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Baraya, dibatasi oleh *Oude Tello-weg*, dan pada sebelah barat berbatasan dengan Kampung Ujung Tanah, dibatasi oleh kali.

Penduduk yang tinggal di sini umumnya adalah orang-orang Makasar dengan mata pencaharian sebagai nelayan dan petani garam.

2.1.3.4 Kampung Kalukuang

Penamaan kampung Kalukuang berasal dari kata *kaluku* artinya kelapa. Diberi nama demikian karena dulu kampung ini merupakan daerah perkebunan kelapa yang dikuasai orang Cina.⁴⁵⁾

Wilayahnya terletak di sebelah tim. *Tello-weg* (Jalan Sunu). Pada sebelah utaranya berbatasan dengan Kampung Tallo, pada sebelah timurnya berbatasan dengan Kampung Rappokalling dan Kampung Rappo-Jawa, pada sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Kawaka, dan pada sebelah baratnya berbatasan dengan Kampung Baraya.

Penduduk di sini kebanyakan orang-orang Makasar termasuk yang berasal dari daerah Gowa dan Takalar. Selain itu orang

44) Wawancara dengan Daeng Sutte, di Ujung Pandang, tanggal 30 Oktober 1983.

45) Wawancara dengan Salam Daeng Sekre tanggal 7 Nopember 1983.

Bugis, antara lain dari daerah Maros dan Pangkajene. Dalam masa Jepang, sebagian penduduk dari Distrik Ujung Tanah dipindahkan ke sini. Kepala Kampung Kalukuang yang pertama bernama Daeng Gassing.⁴⁶⁾

Mata pencaharian penduduknya adalah bertani sawah dan berkebun, buruh dan di antaranya ada pula yang berjualan kecil-kecilan.

2.1.3.5 Kampung Tallo

Dulu, Kampung Tallo merupakan pusat dari Kerajaan Tallo. Mengapa disebut Tallo? dapat dilihat dalam kutipan berikut ini:

Beberapa waktu berselang, maka Karaeng Loeri Bentang bersama Karaeng Loeri Bira berseia-sekata untuk mengakui dan memperlakukan Karaeng Loeri Sero sebagai raja yang kedudukannya lebih tinggi dari kedudukan mereka.

Karaeng Loeri Bira bersama Karaeng Loeri Bentang disuruhnyalah rakyatnya menebas sebuah hutan yang dinamai "Tolloang", dekat Sungai Bira, dan di tempat itu didirikanlah sebuah istana untuk Karaeng Loeri Sero.

Tempat itu kemudian dinamai "Tallo". Pada waktu itulah mulai berdiri Kerajaan Tallo⁴⁷⁾

Berdasarkan kutipan di atas, maka penamaan Tallo berasal dari kata *Tolloang* yaitu nama sebuah hutan yang ditebas untuk dijadikan pusat kerajaan.

Raja Tallo yang pertama ialah Karaeng Loeri Sero saudara dari raja Gowa "Batara Gowa", putera Tunatangkak Lopi Raja Gowa ke-16.⁴⁸⁾

Dari kerajaan Tallo inilah sejak tahun 1605 yaitu pada masa pemerintahan raja Tallo I Mallinggaang Daeng Nyonri Karaeng Katangka Sultan Abdullah Awwalul Islam" dan raja

46) Wawancara dengan Salam Daeng Sekre tanggal 7 Nopember 1983.

47) Abd. Raak Daeng Patunru, *Sejarah Gowa*, op.cit. hal. 9.

48) *Ibid.* hal. 7 dan 8.

Gowa I Mangngakrangngi Daeng Manrabbia Sultan Alaudin⁴⁹⁾, agama Islam secara resmi diterima di Kerajaan Gowa dan diserukan ke seluruh daerah Sulawesi Selatan. Peristiwa ini terjadi dengan kedatangan tiga orang ulama dari Minangkabau yakni: Abdul Makmur Khatib Tunggal alias Datok Ri Bandang, Khatib Sulaiman alias Datok Ri Patimang dan Khatib Bungsu alias Datok Ri Tiro.

Adapun wilayah Kerajaan Tallo yang pusatnya berkedudukan di Kampung Tallo, kurang lebih adalah sama dengan wilayah Kecamatan Tallo ditambah dengan wilayah Kecamatan Ujung Tanah Kotamadya Ujung Pandang sekarang. Sedangkan wilayah Kampung Tallo dalam periode yang dikemukakan ini juga adalah kurang lebih sama dengan wilayah Kampung Tallo pusat Kerajaan Tallo, yaitu pada sebelah utaranya berbatasan dengan Selat Makasar, pada sebelah timurnya berbatasan dengan Sungai Tallo, pada sebelah selatan dan baratnya masing-masing berbatasan dengan Kampung Kalukubodoa dan Kampung Rappokalling.

Penduduk di kampung ini adalah orang-orang Makasar (Gowa), mata pencaharian mereka adalah nelayan, bertani sawah, kebun dan selain itu buruh/kuli.

2.1.3.6 Kampung Rappokalling

Penamaan kampung ini diambil dari kata Makasar. *rappo* artinya buah dan *kalling* yaitu nama salah satu tumbuhan atau pohon. Jenis pohon ini lebih populer dalam bahasa Makasar dengan nama *Kalli-kalli*. Diberi nama demikian, karena di kampung ini banyak terdapat pohon tersebut.⁵⁰⁾

Wilayah Kampung Rappokalling di sebelah utara dan baratnya berbatasan dengan Kampung Rappojawa, di sebelah timur berbatasan dengan Kampung Lakkang dan di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah *Zelfbestuur Gowa*.⁵¹⁾ Daerah yang

49) Ibid. hal. 19

50) Wawancara dengan Salam Daeng Sekre, di Ujung Pandang, tanggal 7 Nopember 1983.

51) Arsip pada Kantor Camat Tallo Kotamadya Ujung Pandang.

berbatasan dengan Kampung Rappokalling di sebelah selatan ini, sekarang sudah dimasukkan dalam wilayah Kecamatan Panakkukang Kotamadya Ujung Pandang.

Penduduknya adalah orang-orang Makasar dengan mata pencaharian bertani sawah/bercocok tanam.

2.1.3.7 Kampung Rappojawa

Menurut ceritera, penamaan kampung ini diambil dari bahasa Makasar: *Rappojawa* yaitu pohon Jomblang. Diberi nama demikian, karena dulu di sini banyak tumbuh pohon tersebut.^{5 2)}

Keterangan bekas Gallarrang Rappojawa yang terakhir mengemukakan: Dulu kampung ini termasuk dalam wilayah Kampung Rappokalling yang kemudian dijadikan kampung tersendiri dalam wilayah Kerajaan Tallo. Gallarrang Rappojawa yang pertama bernama Masaking Daeng Mappunna.^{5 3)}

Wilayahnya di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Tallo, di sebelah timur dan selatannya berbatasan dengan Kampung Rappokalling dan di sebelah baratnya berbatasan dengan Kampung Kalukubodoa.^{5 4)}

Penduduknya adalah orang-orang Makasar dengan mata pencaharian bertani.

2.1.3.8 Kampung Kalukubodoa

Penamaannya berasal dari kata *kaluku* artinya kelapa dan *bodo* artinya pendek. Kalukubodoa artinya kelapa yang pendek, jenis kelapa hibrida. Diberi nama demikian karena dulu di daerah ini terdapat jenis kelapa tersebut dan juga merupakan daerah perkebunan kelapa yang diusahakan pemerintah Hindia-Belanda.^{5 5)}

52) Wawancara dengan Azis Amdan, Lurah Rappojawa, di Ujung Pandang, tanggal 7 Nopember 1983.

53) Wawancara dengan Salam Daeng Sekre, di Ujung Pandang, tanggal 7 Nopember 1983.

54) Arsip Peta pada Kantor Camat Tallo Kotamadya Ujung Pandang.

55) Wawancara dengan Salam Daeng Sekre, di Ujung Pandang, tanggal 7 Nopember 1983.

Wilayah Kampung Kalukubodoa di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Tallo, di sebelah timur berbatasan dengan Kampung Rappojawa dan di sebelah baratnya berbatasan dengan Kampung Panampu.

Penduduknya adalah orang Makasar yang mata pencahariannya bercocok tanam.

2.1.3.9 Kampung Lakkang

Penamaan kampung ini sebenarnya berasal dari kata *lakka*, kemudian berubah menjadi *lakkang*. Kata *lakka* mengandung pengertian membuka, mengeluarkan dan mengangkat sesuatu yang melengket atau melekat dengan keras. Dalam hubungannya dengan penamaan kampung ini, dimaksudkan adalah membuka, mengeluarkan dan mengangkat batu. Menurut riwayat, bahwa sebagian besar batu-batu yang digunakan untuk membangun benteng-benteng pertahanan di Makasar dulu diambil dari sini.^{5 6)}

Wilayah kampung Lakkang di sebelah utara, timur dan selatannya dibatasi oleh Sungai Tallo dan di sebelah baratnya berbatasan dengan Kampung Rappokalling.

Penduduknya adalah orang-orang Makasar dengan mata pencaharian sebagai nelayan.

2.1.3.10 Kampung Gusung

Gusung adalah bahasa Makasar yang artinya tanah yang agak menjorok ke laut. Diberi nama Kampung Gusung, karena dalam wilayahnya ada yang agak menjorok ke laut.

Wilayah kampung Gusung di sebelah utara berbatasan dengan Selat Makasar, di sebelah timur berbatasan dengan kampung Pattingalloang, di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Tabaringang, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kampung Ujung Tanah.

Penduduknya adalah orang-orang Makasar. Mata pencaharian mereka ada yang bertani dan juga nelayan.

56) Wawancara dengan Salam Daeng Sekre.

2.1.3.11 Kampung Pattingalloang

Perkampungan ini telah ada pada tahun 1639 yaitu "pada masa awal pemerintahan raja Gowa ke-15" I Mannuntungi Daeng Mattola Karaeng Lakiung Sultan Malikussaid"^{5 7}) Hal ini didasarkan bahwa raja Tallo yang sekaligus juga berfungsi sebagai mangkubumi yang mendampingi beliau ketika itu diberi nama gelaran dari nama kampung ini yaitu: "I⁴Mangngadacinna Daeng Sitaba Karaeng Pattingalloang. Mangkubumi ini terkenal sebagai cendekiawan, mahirdalam bahasa-bahasa asing seperti bahasa Portugis, Spanyol, Inggris, Perancis dan Arab.^{5 8}) Apakah I⁴Mangngacinna Daeng Sitaba Karaeng Pattingalloang lahir di Kampung Pattingalloang ini, belum dapat dipastikan.

Wilayah Kampung Pattingalloang di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Gusung, di sebelah timur berbatasan dengan Kampung Cambaya, di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Layang dan Kampung Bontoala, di sebelah barat berbatasan dengan Kampung Tabaringang dan Kampung Gusung.

Sebelum Kerajaan Gowa-Tallo ditaklukkan Belanda tahun 1667, maka seperti halnya dengan penduduk Kampung Tabaringan, Ujung Tanah, Tallo dan Kampung Panampu, penduduk Kampung Pattingalloang pun merupakan inti kekuatan armada laut Kerajaan Gowa-Tallo.

Penduduknya umumnya adalah orang-orang Makasar dengan mata pencaharian sebagai petani/bercocok tanam dan nelayan.

2.1.3.12 Kampung Cambaya

Penamaan kampung ini berasal dari bahasa Makasar: *Camba* yang artinya pohon asam. Diberi nama demikian, karena dalam wilayah ini dulu terdapat banyak pohon asam.

Wilayah Kampung Cambaya di sebelah utara berbatasan dengan Selat Makasar, di sebelah timur berbatasan dengan Kam-

57) Abd. Razak Daeng Patunru, *Sejarah Gowa, op. cit.* hal. 30.

58) *Ibid.* hal. 30.

pung Kalukubodoa, di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Panampu, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kampung Pattingalloang.

Penduduk umumnya adalah orang Makasar dengan mata pencaharian bertani/bercocok tanam dan nelayan.

2.1.4 Distrik Mariso

2.1.4.1 Kampung Dadi

Kata *dadi* adalah bahasa Makasar yang artinya susu. Diberi nama demikian karena dulu di kampung ini terdapat perusahaan susu sapi.⁵⁹⁾

Wilayahnya terletak di sekitar sisi sebelah selatan *Dadi-weg* (sekarang Jalan Lanto Daeng Pasewang) terus ke timur sampai ke *SS-weg* bagian selatan, di sisi sebelah utara Jalan Onta dan di sisi sebelah timur *Gowa-weg* (Jalan Dr. Ratulangi). Di kampung ini terdapat Rumah Sakit "Dadi" dan kompleks pekuburan Islam "Dadi". Sekarang wilayahnya sebagian masuk Kelurahan Mamajang Luar dan sebagian lagi masuk wilayah Kelurahan Mamajang Dalam.

Penduduk yang tinggal di sini umumnya asli Makasar dan beberapa keluarga suku Makasar dari luar kota Makasar antara lain dari daerah Jeneponto dan Takalar.

2.1.4.2 Kampung Mamajang

Kampung ini terletak di antara sisi sebelah barat *SS-weg* dan sisi sebelah timur *Gowa-weg* bagian selatan. Di sebelah utaranya berbatasan dengan Kampung Dadi dan di sebelah selatan berbatasan dengan kampung Parang. Kampung ini sekarang terbagi dua yaitu Mamajang Dalam dan Mamajang Luar.

Penduduknya adalah orang-orang Makasar dengan mata pencaharian pada umumnya sebagai petani, buruh/kuli dan beberapa pegawai pemerintah ketika itu.

59) Wawancara dengan M. Kasim Yahya, di Ujung Pandang, tanggal 7 September 1983.

2.1.4.3 Kampung Parang

Parang adalah bahasa daerah Makasar yang berarti tanah lapang. Diberi nama demikian, karena daerah dulunya merupakan tanah lapang atau padang alang-alang yang kemudian dijadikan perkampungan. Dalam sebagian wilayah kampung ini, kemudian dibuka usaha perkebunan kelapa dan persawahan.

Wilayahnya terletak pada kedua sisi *Gowa-weg* an selatan. Wilayah pada sisi timur Gowa-weg sampai ke *SS-weg* dan yang pada sisi barat sampai ke *Sambungdjawa-weg* (sekarang Jalan Cenderawasih). Di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Mamajang dan Kampung Mario, di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Balangboddong dan Kampung Jongaya.

Penduduk Kampung Parang ketika itu masih sangat kurang. Mereka adalah orang-orang Makasar dengan mata pencaharian bercocok tanam, berjualan di pasar dan beberapa orang sebagai buruh/kuli.

2.1.4.4 Kampung Sambungjawa

Menurut ceritera, dulu kampung ini bernama *Sambung Nyawa* kemudian di belakang hari entah apa sebabnya berubah menjadi Sambungjawa. Wilayah ini pada mulanya merupakan tempat pelarian orang-orang Gowa buronan yang melakukan kesalahan di daerahnya. Seteah mereka tiba di sini, mereka sudah selamat yang sesungguhnya apabila diketemukan di daerahnya kemungkinan besar akan dibunuh; Karena itulah disebut Sambung Nyawa, maksudnya dipanjangkan umurnya.

Wilayah Kampung Sambungjawa terletak pada kedua sisi Sambungjawa-weg bagian selatan. Pada sebelah utaranya berbatasan dengan Kampung Parang dan Kampung Balangboddong, di sebelah timur berbatasan dengan Kampung Jongaya, di sebelah selatan berbatasan dengan wilayah *Zelfbestuur Gowa* dan di sebelah barat berbatasan dengan muara Sungai Jenebarang. Di sini terdapat sebuah pasar yang sampai sekarang masih ada yaitu pasar Sambungjawa.

Penduduknya umumnya adalah orang Makasar dengan mata pencaharian sebagai petani, nelayan, kuli/buruh dan ada juga beberapa orang yang berjualan kecil-kecilan.

2.1.4.5 Kampung Jongaya

Penamaan Kampung Jongaya berasal dari kata *Jonga* artinya rusa. Memang dulu sebagian wilayahnya merupakan kawasan hutan yang banyak terdapat, sehingga dijadikan tempat *ajjonga* atau berburu rusa.

Wilayahnya di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Balangboddong dan Kampung Parang, di sebelah timur dan selatan berbatasan dengan wilayah *Zelfbestuur Gowa*, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kampung Sambungjawa. Penduduknya adalah orang-orang Makasar (Gowa) yang sebagian besar adalah keluarga bangsawan. Mata pencaharian mereka adalah bertani sawah dan ladang.

2.1.4.6 Kampung Balangboddong

Balangboddong berasal dari kata *balang* artinya kali atau sungai, dapat juga diartikan dengan genangan air, *boddong* artinya bulat. Dimaksudkan di sini adalah daerah yang digenangi air berbentuk bulatan, merupakan kubangan besar. Memang wilayah ini dulu merupakan daerah rawa-rawa yang cukup luas, sedikit sekali tanah kering di bagian pinggirannya yang dapat didiami untuk pemukiman penduduk.

Wilayahnya di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Parang, di sebelah timur berbatasan dengan Kampung Jongaya, di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Sambungjawa dan Kampung Jongaya dan di sebelah barat berbatasan dengan Kampung Sambungjawa.

Penduduknya adalah orang-orang Makasar dengan mata pencaharian bercocok tanam, kuli/buruh.

2.1.4.7 Kampung Kokolajia

Penamaannya berasal dari bahasa Makasar. *koko* artinya kebun, dan *loji*. Diberi nama demikian karena dulu di wilayah

ini terdapat tanah perkebunan yang di dalamnya terdapat bangunan loji. Bangunan loji ini telah ada jauh sebelum tahun 1900.

Wilayah kampung Kokolojia terletak di sisi selatan *Klapperlaan* (Jalan Haji Bau) bagian barat. Di sebelah utaranya berbatasan dengan Kampung Maluku Distrik Makasar, dibatasi oleh *Klapperlaan*, di sebelah timur berbatasan dengan Kampung Kunjungkae, dibatasi oleh Sambung-djawa-weg bagian utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Panambungang, dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makasar, dibatasi oleh *Zuide Strands-weg*. Kampung ini sekarang termasuk wilayah Kalurahan Mamajang.

Penduduknya umumnya adalah orang-orang Makasar dengan mata pencaharian bertani/bercocok tanam dan nelayan.

2.1.4.8 Kampung Kunjungmae

Wilayah kampung ini terletak di sisi sebelah timur *Sambungjawa-weg*. Di sebelah utaranya berbatasan dengan Kampung Maluku Distrik Makasar, dibatasi oleh *Klapperlaan*, di sebelah timur bagian utara berbatasan dengan Kampung Maricaya dibatasi oleh *Gowa-weg*, di sebelah timur bagian selatan berbatasan dengan Kampung Mario, di sebelah baratnya berbatasan dengan Kampung Panambungang dan Kampung Kokolojia.

Penduduknya umumnya adalah orang-orang Makasar dengan mata pencaharian bertani dan ada juga beberapa orang berjualan kecil-kecilan.

2.1.4.9 Kampung Mario

Penamaan kampung ini berasal dari bahasa Bugis *Mario*, artinya menyenangkan atau menggembirakan. Menurut dugaan, bahwa yang membuka dan menumbuhkan daerah ini dulu menjadi perkampungan adalah orang-orang yang berasal dari daerah Bugis. Karena tempat ini lebih menyenangkan dari tempat kediaman mereka sebelumnya, maka dinamainya adalah Kampung Mario.

Wilayahnya di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Kunjungmae, di sebelah timurnya berbatasan dengan Kampung Dadi dan Kampung Mamajang, dibatasi oleh *Gowa-weg*, di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Parang, dibatasi oleh *Mattoanging-weg* (sekarang Jalan Kakatua), dan di sebelah barat berbatasan dengan Kampung Panambungang, dibatasi oleh *Sambungjawa-weg*. Sekarang wilayah Kampung Mario dimasukkan ke dalam wilayah Kelurahan Kunjungmae dan Kelurahan Mattoanging.

Penduduknya adalah orang-orang Bugis-Makasar dengan mata pencaharian bertani/bercocok tanam, berjualan kecil-kecilan dan buruh.

2.1.4.10 Kampung Panambungang

Kata *Panambungang* adalah bahasa Makasar yang artinya timbunan. Disebut demikian mungkin karena dulu ditimbuni terlebih dahulu baru dijadikan perkampungan. Kampung ini terletak sekitar antara Sambungjawa-weg dengan *Zuide-Strands-weg* (Jalan Rajawali).

Wilayah kampung Panambungang di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Kokolojia, batasnya di sekitar Jalan Garuda sekarang, di sebelah timur berbatasan dengan Kampung Kunjungmae, dibatasi oleh *Sambungjawa-weg*, di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Mariso dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makasar.

Penduduknya umumnya adalah orang-orang Makasar dengan mata pencaharian nelayan, bertani dan ada juga beberapa yang berjualan kecil-kecilan.

2.1.4.11 Kampung Lette

Kata *lette* adalah bahasa Makasar yang artinya pindah. Dinamakan demikian, kemungkinannya bahwa penduduk kampung ini pada mulanya adalah orang-orang yang pindah atau dipindahkan dari kampung lain.

Wilayah Kampung Lette di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Panambungang. di sebelah timur berbatasan dengan Kampung Kunjungmae dan Kampung Mario. di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Mariso dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makasar.

Penduduk kampung ini umumnya adalah orang Makasar dengan mata pencaharian sebagai nelayan dan beberapa di antaranya berjualan.

2.1.4.12 Kampung Mariso

Kampung ini adalah tempat berkedudukannya Kepala Distrik Mariso yaitu Gallarrang Mariso. Wilayahnya di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Lette, di sebelah timur berbatasan dengan Kampung Mario (sekarang masuk ke dalam wilayah Kalurahan Kunjungmae). dibatasi oleh *Sambungjawa-weg*. di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Mattoanging dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makasar.

Penduduknya umumnya adalah orang-orang Makasar dengan mata pencaharian bertani, nelayan dan beberapa di antara berjualan. Di kampung ini terdapat sebuah pasar yaitu pasar Kampung Mariso.

2.1.4.13 Kampung Mattoanging

Penamaan kampung ini dengan *Mattoanging* diambil dari bahasa Bugis yang dapat diartikan berangin-angin atau mendapatkan bahwa segar dan sejuk.

Wilayahnya di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Mariso, di sebelah timur berbatasan dengan Kampung Parang, dibatasi oleh *Sambungjawa-weg*, di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Bontorannu dan di sebelah barat berbatasan dengan Kampung Buyang.

Penduduknya adalah orang-orang Makasar, Bugis, kemudian datang beberapa orang Jawa menetap di kampung ini. Mata pencahariannya adalah bertani, buruh/kuli dan ada pula yang berjualan.

2.1.4.14 Kampung Buyang

Buyang adalah bahasa Makasar yang artinya kertas. Mengapa diberi nama demikian, belumlah diketahui.

Wilayah kampung Buyang terletak antara Kampung Mariso dan Kampung Bontorannu. Di sebelah timurnya berbatasan dengan Kampung Mattoanging dan di sebelah baratnya berbatasan dengan Selat Makasar.

Penduduknya adalah orang-orang Makasar dengan mata pencaharian sebagai buruh/kuli, nelayan.

2.1.4.15 Kampung Bontorannu

Penamaannya berasal dari bahasa Makasar: *bonto*, artinya tanah ketinggian dan *rannu* artinya gembira atau senang. Jadi dimaksudkan tanah ketinggian yang membawa atau memberikan kebahagiaan. Di sini terdapat pula sebuah tempat bersukaria atau berekreasi penduduk khususnya acara makan-makan sambil menikmati hawa laut pada suatu tempat berupa *gusung* (=tanjung) sambil mandi-mandi air laut. Sesuai dengan pola berfikir masyarakat ketika itu yang masih tradisional dan masih sangat dipengaruhi oleh mitos, sehingga ada juga ke tempat ini untuk melepaskan nazar atau sesajen.

Wilayah kampung Bonotrannu di sebelah utara berbatasan dengan Kampung Buyang, di sebelah timurnya berbatasan dengan Kampung Mattoanging, di sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Sambungiawa dan pesisir timur muara Sungai Jeneberang, di sebelah barat juga berbatasan dengan pesisir timur muara Sungai Jeneberang dan Selat Makasar.

Penduduknya umumnya adalah orang-orang Makasar dengan mata pencaharian nelayan, dan bertani.

2.2 Tata Lingkungannya

Sebagai salah satu realisasi berlakunya *Desentralisasi Wet* (Undang-undang Desentralisasi) yang pertama tahun 1903, *juncto Algemeene Matregel van Bestuur (A M V B)* tahun

1903.⁶⁰⁾ kota Makasar secara resmi ditetapkan sebagai daerah otonom atau *Gemeente Makasar* pada tanggal 1 April 1906.⁶¹⁾ Kemudian pada tanggal 31 Desember 1938, *Gemeente Makasar* barulah disahkan menjadi Stad *Gemeente Makasar*.⁶²⁾

Dalam wilayah *Gemeente Makasar* bahkan jauh sebelum itu, sebagaimana telah disebutkan di muka bahwadi Makasar terdapat enam distrik (setingkat kecamatan). Pada tahun 1921 mengalami perubahan wilayah, yaitu Distrik Melayu dan Distrik Ende dihapuskan. Bekas wilayah distrik Melayu digabungkan ke dalam Distrik Wajo dan bekas wilayah Distrik Ende dibagi dua, sebagian digabung ke dalam wilayah distrik Makasar dan sebagian menjadi wilayah Distrik Wajo. Dengan demikian, dari tahun 1921–1950 dalam wilayah pemerintahan kota Makasar terdapat hanya empat distrik yaitu Distrik Makasar, Wajo, Mariso dan Ujung Tanah. Dalam distrik-distrik itu terdapat sejumlah kampung sebagaimana yang diuraikan pada Bab II.1.

Keempat distrik dan kampung-kampung yang telah dikemukakan, antara satu dengan yang lainnya tidak persis sama tata lingkungannya. Sehubungan dengan hal ini, berdasarkan uraian terdahulu mengenai kampung-kampung, sepintas kilas kita sudah dapat melihat bahwa pada awal mula pertumbuhan kampung-kampung itu lebih banyak didasari oleh faktor kesamaan etnis penduduknya. Misalnya saja: Kampung Wajo dan Kampung Mampu, merupakan perkampungan orang-orang Bugis, Kampung Butung, perkampungan orang-orang Buton, Kampung Ende, perkampungan orang-orang Ende/Nusatenggara, Kampung Cina, perkampungan orang-orang Cina, Kampung Balandaya, perkampungan orang-orang Belanda, Kampung Melayu, perkampungan orang-orang Melayu. Di luar daripada itu merupakan perkampungan mayoritas orang-orang Makasar.

60) Staatsblad No. 137, 1903.

61) Staatsblad, 1906.

62) Staatsblad No. 718, 1938.

Menurut keterangan salah seorang informan, bahwa pemerintah Belanda ketika itu membagi juga wilayah pemukiman di kota Makasar ini antara lain :

- *Europeasch Eijk* : Perkampungan orang-orang Eropah/ Belanda dan penduduk lainnya yang dipersamakan statusnya dengan orang Eropah. Wilayahnya di sekitar *Prince Hendrikpad* dan *Hogepad* (Jalan Riburane terus ke Jalan Jenderal Ahmad Yani sekarang) di utara, membelok ke *Hospital-weg* (Jalan Jenderal Sudirman) terus ke selatan, membelok ke Klapperlaan (Jalan Haji Bau), kemudian membelok ke utara yaitu *Bessi-weg* (Jalan Arief Rate) terus ke *General Van Dalen-Weg*. (Jalan Sultan Hasanudin), menyusur *Raveleins-weg* (Jalan Slamet Riyadi).
- *Chinesch Wijk* : Perkampungan orang-orang Cina.
- *Arabisch Wijk* : Perkampungan orang-orang Arab dan Timur Asing lainnya, antara lain Pakistan dan India.

Di luar daripada itu merupakan perkampungan *Inlanders* atau bumiputra. ⁶³⁾

Akan tetapi stel perkampungan-perkampungan itu (di luar *Europeasch Wijk*) yang berdasarkan kelompok etnis tidak bertahan lama, karena terjadinya proses pembauran antar suku-suku bangsa di kota Makasar. Sebagai contoh: "Di Kampung Melayu misalnya, sesudah tahun 1906 penduduknya sudah bercampur dengan suku bangsa lain".⁶⁴⁾

Jelas bahwa dalam penataan lingkungan pemukiman di Makasar bahkan di daerah manapun juga, banyak ditentukan oleh corak kehidupan dan tingkat kemajuan penduduknya. Kalau penduduknya berpenghasilan cukup, berendidikan, banyak melihat daerah-daerah yang lebih maju, maka lingkungan-

63) Wawancara dengan Muh. Kasim Yahya, di Ujung Pandang, pada tanggal 30 Oktober 1983.

64) Abdurrahim, op.cit. hal. 139.

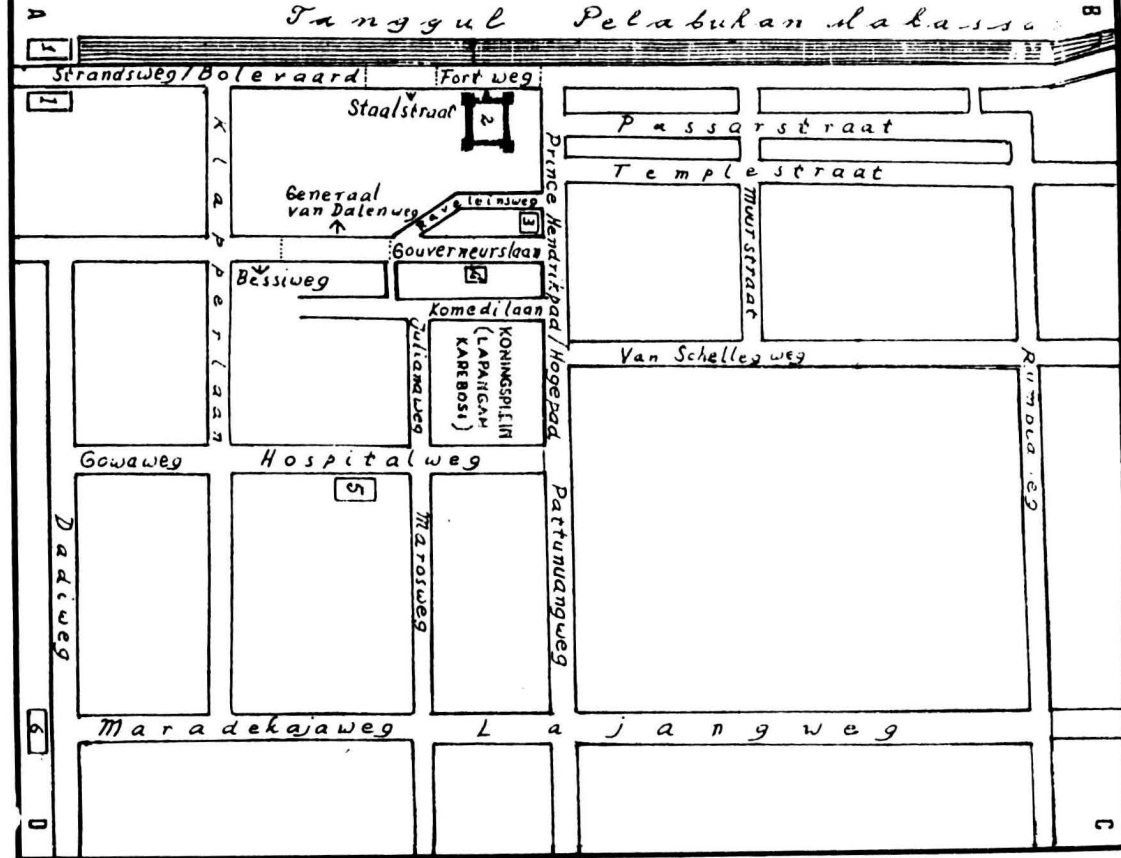
nyapun akan ditanya sedemikian rupa baik untuk faktor kesehatan maupun untuk keindahan. Bagi Makasar, penghasilan yang cukup, pengalaman dan pengamatan pada daerah-daerah yang lebih maju, merupakan potensi yang telah dimiliki oleh banyak penduduknya jauh sebelum tahun 1900. Akan tetapi potensi pendidikan, dalam arti penyerapan teknologi modern melalui pendidikan formal di sekolah-sekolah, baru dikenal sesudah tahun 1910-an. Oleh karena itulah, di luar daripada konteks penataan lingkungan secara modern yang telah ditangani secara khusus oleh pemerintah kolonial Belanda sejak mereka berkedudukan di Maksiar maka penataan pemukiman dengan memanfaatkan teknologi modern dalam konstruksi bangunan, baru dikenal agak lebih meluas di kalangan penduduk Makasar sesudah tahun 1910-an itu.

Dari pengamatan terhadap geografis kota Makasar, menunjukkan bahwa perkampungan-perkampungan yang sudah mempunyai tata lingkungan yang baik ialah yang terletak di wilayah barat, mulai dari sebelah selatan asrama "KIS (*Kweekschool voor Inlandsche Scheppelingen*)"⁶⁵) menyusur pinggir pantai ke utara sampai ke *Juliana Kade* (sekarang Pelabuhan Makasar, Pangkalan Sukarno), membelok ke timur menyusur *Rumbia-weg* (Jalan Seram), membelok ke selatan sepanjang *Lajang-weg* dan *Maradekaja-weg* (Jalan Andalas dan Jalan Gunung Latimojong) sampai ke *Dadi-weg* (Jalan Lanto Daeng Pasewang, membelok ke barat sampai ke asrama KIS. Untuk jelasnya lihat sekt berikut ini:

65) KIS: Adalah Sekolah Marinir atau awak kapal perang Belanda, pada tahun 1933 sekolah ini ditutup dan dijadikan asrama serdadu/tentara Belanda. Sejak tahun 1933 itu, namanya yang populer adalah KIS Kampement. Wawancara dengan Muh. Kasim Jahya, 30 Oktober 1983.

Selat Makassar

Tanjung Pelabuhan Makassar



Keterangan :

1. Asrama KIS
2. Fort Rotterdam
3. Kantor Gubernur
4. Balai Kota
5. Rumah Sakit Militer
6. Rumah Sakit Dadi

Nama Jalan :

Bessiweg	=	Jln. Arief Rate
Dadiweg	=	Jln. Lanto Daeng Padsawang
Fortweg	=	Jln. Bendang
Generaal van Dalenweg	=	Jln. Sultan Hasanuddin
Gouverneurslaan	=	Jln. Balai Kota
Gowaweg	=	Jln. DR. Ratulangi
Hospitaalweg	=	Jln. Jenderal Sudirman
Klapperlaan	=	Jln. Haji Bau dan Jln. Monginsidi
Komedilaan	=	Jln. Kajao Laliddo
Lajangweg	=	Jln. Andalas
Maradekajaweg	=	Jln. Gunung Latimojong
Marosweg	=	Jln. Gunung Bawakataeng
Muurstraat	=	Jln. Timor
Passarstraat	=	Jln. Nusantara
Pattunuangweg	=	Jln. Gunung Bulusaraung dan Jln. Mesjid
Prince Hendrikpad/Hogepad	=	Jln. Riburane dan Jln. Jend. Ahmad Yani
Reveleinweg	=	Jln. Slamet Riyadi
Rumbiaweg	=	Jln. Seram S.
Sambungawaweg	=	Jln. Cenderawasih
Staalstraat	=	
Strandsweg/Bolewaard	=	Jln. Penghibur/Lofau
Templestraat	=	Jln. Sulawesi
Van Schelleweg	=	Jln. Irian

Sumber: Peta Pusat Kotamadya Ujung Pandang, Wawancara dengan Muh. Kasim Yahya, Salam Daeng Sekre, M. Uddin.

Wilayah yang digambarkan dalam denah ABCD di atas penataan lingkungannya sudah mulai teratur. Pemukiman-pemukiman penduduk yang terletak di sepanjang kedua sisi Templestraat (Jalan Sulawesi), Muurstraat (Jalan Timor), begitu juga di kedua sisi Pattunuang-weg sampai keperempatan *SS-weg* merupakan kompleks pemukiman yang termasuk sudah tua di Makasar.

2.2.1 Perumahan, jalanan dan got (saluran air)

Sebelum tahun 1900, rumah tinggal permanent (rumah batu) di Makasar masih sangat kurang. Seperti halnya di Templestraat atau Jalan Kelenteng yang merupakan perkampungan orang-orang Cina, pada tahun 1889 masih berderet-deret rumah-rumah bambu beratapkan daun nipa.⁶⁶) Rumah-rumah permanent yang ada ketika itu antara lain beberapa rumah pejabat Hindia Belanda di Kampung Balandaya, beberapa buah terpencah dalam wilayah yang digambarkan pada sket di atas termasuk satu di antaranya di Kampung Gaddong dan "rumah sobat" di *Rumbia-weg*.

Mengenai model rumah tradisional Bugis-Makasar adalah berbentuk rumah panggung. Kemudian dengan munculnya pemukiman-pemukiman baru dari pendatang-pendatang yang menetap di Makasar, model rumah mulai bervariasi. Rumah bawah atau rumah-rumah petak dengan letak yang agak dekat ke jalanan mulai dikenal, rupanya dikembangkan oleh orang-orang Cina. Rumah petak yang berandanya dapa terbuka lebar, sampai sekarang masih merupakan dasar bentuk toko atau usaha yang bagian belakangnya dijadikan tempat tinggal.

Sesudah tahun 1910 an penggunaan bangunan atau rumah-rumah permanen sudah mulai meningkat, namun dalam jumlah yang masih juga sedikit. Rumah tinggal permanen masih terba-

66) Teng Tjong Hae, "Riwayatnya Kelenteng-Kelenteng Tionghoa di Makasar", *Buku Peringatan Persatuan Tionghoa Peranakan (PERTIP) Makasar 1946-1953*, hal. 149.

tas pada beberapa pejabat pemerintah Belanda, pedagang atau pengusaha berkapital besar dan beberapa pribumi kaya. Bentuk-bentuk dasar dari rumah-rumah tersebut baik rumah panggung, rumah bawah/petak untuk tempat tinggal ataupun pertokoan/usaha, dan juga rumah tinggal permanen yang pekarangan depannya agak luas atau letaknya agak jauh dari jalanan, tidak banyak mengalami perubahan sampai sekarang.

Di samping bentuk rumah yang sudah mengalami perkembangan, penataan lingkungannya pun lebih teratur dibandingkan dengan perkampungan-perkampungan di luar wilayah ABCD. Dikatakan teratur karena rumah-rumah sudah menghadap ke jalan raya dan umumnya mempunyai sumur, jalanan-jalanan utama sudah diaspal, dan saluran pembuangan air termasuk got atau selokan permanent sudah ada. Khususnya got-got besar dalam kota antara lain:

1. Got yang melintas dari timur ke barat di sepanjang sisi *Klapperlaan* di selatan
2. Got yang melintas dari timur ke barat di pinggir selatan Pattunuang-weg, menyusur ke barat di pinggir utara Koningsplein (lapangan Karebosi) terus ke pantai
3. Got yang melintasi dari timur ke barat dari Kampung Layang, melintasi Layang-weg menyusur Rumbiaweg ke barat menuju pantai
4. Got yang melintas dari selatan ke utara yang melintasi *Pisang-weg* (Jalan Gunung Tinggimae sekarang), *Maros-weg-Pattunuangweg-Wijnveldweg-Rumbiaweg* terus ke utara.

2.2.2 Instansi/lembaga/kantor pemerintah, militer dan beberapa perusahaan.

Di bagian barat kota, berdiri dengan megah menghadap ke Selat Makasar Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam) di Fortweg (sekarang Jalan Benteng). Selain itu, bangunan-bangunan pemerintah yang ada dalam periode itu antara lain:

- *Kantor Gouverneur Celebes Onderhorigheden* (Gubernur Sulawesi dan Daerah takluknya), kemudian di tempati juga sebagai kantor *Gouverneur Grote Oost* (Gubernur Timur Besar), kantor Residen *Zuid Celebes* (Selebes atau Sulawesi Selatan), Kantor Presiden Negara Indonesia Timur (NIT), dan juga kantor pemerintah kota Makasar (Balai Kota) yang terletak di *Gouverneurslaan* (sekarang Jalan Balai Kota).
- Penjara Makasar, terletak di sebelah utara lapangan Karebosi menghadap ke Hogepad dan Karebosi. Rumah penjara ini berfungsi sejak masa Hindia Belanda, kemudian Jepang dan selanjutnya sesudah masa kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tahun 1977, penjara ini dibongkar dipindahkan ke Gunung Sari Baru Ujung Pandang.
- Kantor Kejaksaan dan Pengadilan di Justisilaan (Jalan Ammanna Gappa sekarang) membelakangi lapangan Karebosi, di antara Julianallan (Jalan Kartini). Letaknya sejajar dengan Penjara Makasar. Sekarang tetap digunakan sebagai kantor Pengadilan Negeri Ujung Pandang.
- Kantor/bangunan militer antara lain:
 - Kantor *Troepen Commandant* (TPC), yaitu kantor militer Belanda, terdapat di Pisangweg (Jalan Gunung Tinggimae).
 - Kantor "Sirebu", yaitu kantor Panglima Angkatan Laut Jepang, terdapat di kantor Komando Daerah Kepolisian XIV Sulawesi Selatan dan Tenggara di Jalan Jenderal Ahmad Yani sekarang.
 - KIS Kampement, yaitu asrama tentara Belanda yang terdapat di Jalan Rajawali sekarang. Asrama ini sampai sekarang masih merupakan kompleks militer.
 - Stasiun Radio Makasar, terletak di tepi barat ujung utara Jalan Rajawali.

Di samping itu terdapat beberapa kantor dagang/perusahaan, di antaranya: *Nigieo*, *Bataavsche Petroleum Maatschappij*

(BPM) yaitu perusahaan Minyak di Ujung Tanah, sekarang Pertamina, *Celebes Transport Maatschappij* (Cetram), yaitu perusahaan pengangkutan milik seorang Yahudi terdapat di sudut *Wijnveldweg* dan *Lajangweg*. Beberapa Bank yaitu Bankenpool, dan *Volkscredietbank* di *Raveleinsweg* (Jalan Slamet Riyadi) yang sekarang ditempati Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Rumah Sakit/Lembaga lembaga kesehatan.

2.2.3 Mengenai rumah sakit atau lembaga-lembaga kesehatan telah terdapat beberapa buah di Makasar sebelum Jepang yang tetap berfungsi sampai sesudah kemerdekaan yaitu:

- *Militair Hospital* (Rumah Sakit Militer) di sisi utara *Hoospitalweg*, sekarang ditempati Rumah Sakit Angkatan Darat "Pelamonia".
- Rumah Sakit "dadi" dan Klinik dari Bala Keselamatan di sisi selatan *Dadiweg* yang sebelum Jepang berfungsi khusus sebagai tempat perawatan orang Gila. Pada zaman kekuasaan Jepang dan sesudah kemerdekaan, selain berfungsi sebagai tempat perawatan orang gila, dikembangkan menjadi rumah sakit umum. Sekarang menjadi rumah sakit umum "Dadi" Ujung Pandang.
- Rumah Sakit "Santa Melania" yang juga merupakan tempat perawatan orang-orang gila di sisi timur *Ladjangiru-weg*. Sekarang masih digunakan sebagai balai kesehatan tetapi bukan lagi untuk orang-orang gila.
- Rumah Sakit "Labuang Baji" di sisi timur Gowa-weg, sampai sekarang masih ada.
- Klinik *Zuster Oehsle* di *Maradekayaweg*.
- Rumah Sakit "Stela Maris" yang letaknya menghadap ke *Strandsweg - Bolewaard*, pantai Losari atau Jalan Penghibur sekarang.

- Poliklinik-poliklinik terdapat di Rumah Sakit Stella Maris, Poliklinik Kotapraja di Pattunuangweg, sekarang Rumah Sakit "Pattunuang", Poliklinik Persatuan Islam di *Marosweg*, Poliklinik Rumah Sakit Labuang Baji dan Palang Merah Cina di Jalan Ende.

Dari sejumlah rumah sakit dan poliklinik yang dikemukakan, menunjukkan bahwa masalah kesehatan pada waktu itu sudah mendapatkan perhatian yang cukup. Namun harus diakui, bahwa pola berfikir tradisional sebagian besar anggota masyarakat yang diliputi unsur mitos dan magic masih kuat, sehingga kepercayaan terhadap mantera-mantera dan ramuan dukun juga masih tetap kuat.

2.2.4 Tempat-tempat peribadatan

Adapun sarana-sarana peribadatan di Makasar ketika itu yang dapat dikemukakan ialah :

- Sampai dengan tahun 1950, mesjid-mesjid sudah terdapat hampir di setiap kampung di Makasar Di dalam memori Dr. J.W. de Klein (1947) dikemukakan: Di setiap kampung di mana terdapat mesjid, terdapat seorang imam yang dipilih oleh orang-orang yang memiliki hak pilih yang sama bagi mereka yang memilih kepala kampung. Imam diangkat dengan surat keputusan dari kepala afdeeling dan memilih sendiri pejabat keagamaan lainnya.⁶⁷⁾
- Mesjid-mesjid tua yang sudah termasuk permanent ketika itu antara lain: Mesjid Tallo, Mesjid Maloku, Mesjid Ende, Masjid Arab dan Masjid Wajo. Penamaannya disesuaikan dengan nama kampungnya.
- Gereja-gereja, di antaranya ialah: Gereja Emmanuel di *Gouverneurslaan*, Gereja Cathedral di Komedilaan atau sebelah barat lapangan Karebosi dan yang terdapat di *Maradekajaweg*.

67) Dr. J.W. de Klein, *op. cit.* hal. 9

- Beberapa kelenteng terdapat di *Templestraat*: kelenteng yang termasuk tua dan bangunannya permanent ialah kelenteng Dewi Ma Tjo Poh, kelenteng Tjo Soe Kong dan kelenteng Kanton Bean Gie Koan.⁶⁸⁾

2.2.5 Pemakaman

Ketika itu, pemakaman pun sudah diatur penempatannya dalam lokasi-lokasi tertentu. Dapat dilihat sebagai berikut:

- Pekuburan Belanda dan orang-orang Eropah lainnya: Terletak di sisi utara *Pattunuangweg* bagian barat dan Hogepad bagian timur, di Ujung utara *Hospital-weg*. Komplek ini mulai dari sisi timur Rumah Sakit Gigi sekarang ke barat sampai ke Jalan Nusakambangan kemudian ke utara, membelok ke timur kira-kira sejajar dengan sisi utara Rumah Sakit Akademis sekarang. Komplek ini sudah dirombak, di atasnya didirikan beberapa bangunan antara lain Rumah Sakit Gigi, Rumah Sakit Paru-Paru dan Rumah Sakit "Akademis".
- Pekuburan Cina: Terletak di sebelah utara pekuburan Belanda sampai ke Kampung Ende Caddia. Di sebelah timur batasnya sekitar Jalan Haji Agussalim sekarang dan di sebelah barat sampai ke *Van Schelleg-weg*. Kompleks ini sekarang sudah tidak ada, di atasnya dibangun Pasar Sentral, Pusat Pertokoan dan Kantor NV Haji Kala. Setelah dirombak, pekuburan Cina dipindahkan ke luar kota Ujung Pandang yaitu ke Panaikang.
- Pekuburan Dadi: Merupakan pekuburan orang-orang Islam. Terletak di bagian selatan pusat kota, persis di belakang Rumah Sakit Dadi. Sampai sekarang masih digunakan.
- Pekuburan Arab: Merupakan pekuburan orang-orang Arab. Terletak di kampung Bontoala, di sebelah timur *Oude Telloweg*. Oleh masyarakat setempat (pribumi) juga me-

68) Teng Tjong Hae, "Riwayatnya Kelenteng-Kelenteng Tionghoa di Makasar", Buku Peringatan Pertip Makasar, 1946-1953, Makasar, 1953, hal. 149.

nyebutnya *Jerak Sayye*, kuburan Sayid atau Syekh. Sekarang masih digunakan.

- Pekuburan Beroanging: Merupakan pekuburan orang-orang Islam. Terletak di kedua sisi *Oude Telloweg* pada sebelah utara kampung Baraya. Sekarang masih digunakan.
- Pekuburan Buttatianang: Merupakan pekuburan orang Islam. Terletak di sebelah timur kota, yaitu di kampung Rappojawaya dekat perbatasan dengan Kampung Kalukuang. Sekarang masih digunakan.
- Pekuburan Tallo: Merupakan pekuburan orang Islam yang terletak di Kampung Tallo Distrik Ujung Tanah. Sekarang masih. Selain itu, di kampung Tallo ini terdapat dua kompleks makam yang cukup terkenal yaitu kompleks makam raja-raja Tallo dan makan penganjur Islam Syekh Makmur Khatib Tunggal alias Datok Ri Bandang.

Perlu dikemukakan, bahwa khusus mengenai wilayah kompleks pemakaman orang-orang Belanda/Eropa dan orang Cina, oleh masyarakat setempat disebut juga dengan nama *Kampung Jerak*, kampung kubur.

2.2.6 Tempat hiburan

Untuk hiburan dalam kota terdapat beberapa gedung bioskop yang ketika itu umumnya masih mempertontonkan film bisu, yaitu:

- Bioskop Luxor yang kemudian namanya diubah menjadi Empres dan Bioskop Sintje di Komedilaan. Sekarang bioskop Empres menjadi bioskop Madya, bioskop Sintje sudah tidak ada.
- Bioskop Sirene, terletak di Kampung Gaddong, sisi timur *Friedenburgweg* bagian utara, yaitu di sebelah utara bioskop Artis sekarang. Sekarang sudah tidak ada, ditempati sebagai Kantor Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPN).
- Bioskop Lok Siang Sia yang merupakan bioskop khusus untuk orang-orang Cina, terletak di Muurstraat.

Di samping itu, bagi orang-orang Belanda dan Eropa lainnya terdapat tempat hiburan khusus, yang terkenal ialah Societeit di Harmony. Bangunan ini terletak di Prince Hendrikpad, sekarang ditempati Dewan Kesenian Makasar (DKM). Fasilitas hiburan yang ada di sini antara lain: bar, musik dan bola sodok (bilyard).

2.2.7 Hotel

Adapun hotel yang cukup terkenal ialah :

- Speelman Hotel di Hogepad. sebelah utara lapangan Karebosi. Sekarang ditempati KODAM XIV/Hasanuddin.
- Grand Hotel juga di Hogepad. Sekarang masih ada yaitu di depan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.
- Empres Hotel, di Komedilaan, sebelah barat lapangan Karebosi. Sekarang sudah tidak ada.

2.2.8 Pasar

Pasar-pasar yang cukup besar dan termasuk ramai ketika itu ialah :

- Pasar Cangirak: Merupakan pasar yang paling ramai ketika itu di Makasar. Terdapat di kampung Cangirak, di bagian utara *Passarstraat*. Di sini banyak diperjualbelikan barang-barang luks dari luar negeri yang dibawa oleh kapal-kapal dagang. Letaknya sangat berdekatan dengan pelabuhan.
- Pasar Butung: Terletak di Kampung Butung. Pasar ini sekarang masih ada.
- Pasar Bontoala: Terletak di Kampung Bontoala.
- Pasar Kalimbu: Terletak di Kampung Tompobalang, di sisi timur SS-weg. Sekarang masih ada.

Selain itu terdapat pula pasar di beberapa kampung yang berfungsi utama untuk melayani keperluan sehari-hari penduduk yang diam di sekitarnya, yaitu Pasar Mariso di Kampung Mariso, Pasar Sambungjawa di Kampung Sambung-jawa, Pasar

Ujung Tanah di Kampung Ujung Tanah, pasar Layang di kampung Layang, Pasar Maricaya di kampung Maricaya, Pasar Mamajang di Kampung Mamajang dan Pasar Beru di Kampung Beru.

2.2.9 Pelabuhan Makasar

Kedudukannya sebagai kota pelabuhan turut menentukan dan memberi corak penataan kota Makasar. Sebelum Kerajaan Gowa ditaklukkan imperialisme Belanda tahun 1667, pelabuhan Makasar merupakan pelabuhan bebas. Sesudah Belanda berkuasa, pelabuhan Makasar dinyatakan kembali sebagai pelabuhan bebas nantilah pada tanggal 1 Januari 1847 sebagaimana dinyatakan dalam butir 1 pengumuman gubernur jenderal Hindia Belanda:

1. dat. te rekenen van den eersten Januarij 1847, de stad Makasar eene vrijhaven zal zijn, alwaar alle goederen zonder onderscheid, en om het even onder welke vlag, vrijelijk zullen kunnen worden inen uitgevoerd, zonder betaling, hetzij van regten op de lading, hetzij van tonnen, haven of ankerage-gelden op de scheppen, en zonder dat de handelaren aan eenige formaliteit ter zake van in en uitgaande regten zullen onderworpen zijn.⁶⁹⁾

Terjemahannya :

1. bahwa, terhitung 1 Januari 1847, kota Makasar akan menjadi pelabuhan bebas, di mana semua barang-barang tanpa keciali, dan untuk kapal-kapal yang berbendera manapun akan dapat mengimport dan mengekspor dengan bebas, tanpa membayar, baik pajak muatan, maupun bea-bea masuk, berlabuh atau ke luar, kecuali pedagang-pedagang akan mentaati beberapa aturan/formalitas dalam hubungan dengan peraturan pajak barang-barang ekspor dan import.

Dengan dinyatakannya sebagai pelabuhan bebas dalam tahun 1847 itu, bahwa jumlah kapal dan muatannya yang keluar masuk pelabuhan bertambah banyak. Data kapal-kapal yang masuk ke pelabuhan Makasar dari tahun 1904–1913 dapat di-

69) Publikatie van wege en in naam des Konings, de Minister van Staat, Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie 9 September 1846, *Koleksi Arsip Perwakilan Arsip Nasional RI. di Ujung Pandang*. Copy.

kemukakan sebagai berikut:

- Tahun 1904 sebanyak 380 buah
- Tahun 1905 sebanyak 519 buah
- Tahun 1906 sebanyak 511 buah
- Tahun 1907 sebanyak 507 buah
- Tahun 1908 sebanyak 512 buah
- Tahun 1909 sebanyak 476 buah
- Tahun 1910 sebanyak 497 buah
- Tahun 1911 sebanyak 476 buah
- Tahun 1912 sebanyak 491 buah
- Tahun 1913 sebanyak 549 buah.⁷⁰⁾

Data di atas tidak termasuk perahu dagang yang hanya menggunakan layar yang berlabuh di pelabuhan bagian utara di Paotere sekarang.

Konsekuensinya, penataan pelabuhan harus lebih dimantapkan, fasilitasnya harus diperluas dan ditingkatkan antara lain konstruksi dermaga harus diperbaiki, gudang-gudang penyimpanan barang yang akan dimuat dan dibongkar harus ditambah, pokoknya fasilitas pelayanan bongkar muat harus ditingkatkan. "Pada tahun 1912, Pelabuhan Makasar dibangun secara modern⁷¹⁾ sesuai dengan statusnya sebagai pelabuhan internasional, sehingga kpapal-kapal dalam ukuran apapun dapat merapat di dermaga. Tempat berlabuhnya kapal dipisahkan dengan jelas dari pelabuhan perahu-perahu dagang yang hanya menggunakan layar.

Kesemuanya itu memerlukan tenaga kerja. Banyak penduduk pedalaman ke kota untuk memperoleh pekerjaan. Hal ini mengakibatkan pula bertambahnya perumahan dan semakin ramainya kota Makasar.

70) *De Buitenbezittingen 1904 tot 1914*, Koleksi Buku Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan di Ujung Pandang, hal. 49.

71) *Ibid*, hal. 49.

3. Penduduk dan corak kehidupannya

3.1 Pertumbuhan penduduk

Bagaimanakah pertumbuhan penduduk di kota Makasar pada tahun 1900–1950, sukar untuk dipastikan karena ketika itu belum ada sensus penduduk seperti sekarang ini. Namun pada tahun 1922 dalam suatu ensiklopedia⁷²⁾ disebutkan bahwa penduduk Makasar pada tahun 1916 berjumlah lebih kurang 39.000 jiwa orang yang terdiri dari golongan Cina 6.900 jiwa, Eropa 1.500 jiwa, Timur Jauh 300 jiwa dan pribumi sisanya (lebih kurang 30.300 jiwa, penduduk).

Kemudian menurut laporan J W de Klein, bahwa pada tahun 1947 penduduk Makasar lebih kurang dari 165.000 jiwa yang didalamnya terdapat Cina 32.000 jiwa dan Eropa 5.000 jiwa⁷³⁾. Sedangkan menurut Adi Negoro, penduduk Makasar pada tahun 1954 berjumlah lebih kurang 200.000 jiwa.⁷⁴⁾

Kalau kita bandingkan antara jumlah penduduk antara tahun 1916 dengan tahun 1947, maka selama 31 tahun terdapat selisih penduduk sebanyak 126.000 jiwa. Dengan demikian rata-rata penambahan penduduk setiap tahun lebih kurang 4.000 jiwa atau sekitar 3%. Dapat diperkirakan bahwa sampai tahun 1950, penduduk Makasar berjumlah lebih kurang $165.000 + 3 \times 4.000$ jiwa = lebih kurang 177.000 jiwa.

Laju penambahan penduduk di kota Makasar tidak semata-mata disebabkan oleh faktor kelahiran, tetapi juga faktor urbanisasi yakni berpindahnya penduduk dari pedalaman terutama untuk maksud mencari pekerjaan. Sesudah tahun 1930-an, selain pencari kerja beberapa yang datang untuk melanjutkan pelajaran. Ditambah lagi dengan pendatang-pendatang dari berbagai daerah di luar Sulawesi Selatan, di antara mereka adalah bekas romusha-romusha yang didatangkan dan ditinggal-

72) Oosthoeks Geillustreerde, *Encyclopaedie*, Deel VIII, 1922, hal. 4.

73) DR. J.W. de Klein, *op. cit.* hal 4.

74) Adi Negoro, *Ensiklopedi Umum Dalam Bahasa Indonesia*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1954, hal. 231.

kan oleh Jepang. Sebagaimana dikemukakan dalam laporan J.W. de Klein, pada waktu NICA datang ke Makasar, dijumpai di sini sekitar 8.000 orang romusha yang sakit, kotor dan setengah kelaparan yang terdiri dari orang-orang Jawa, Madura, Batak, Minangkabau dan beberapa orang Aceh⁷⁵). Selain itu, pada sekitar tahun 1946/1947 orang-orang Timor pencari kerja berdatangan lagi di Makasar⁷⁶). Sebagian di antara mereka itu ada yang tidak kembali lagi ke daerah asalnya, menetap di Makasar. Jadi suatu hal yang wajar kalau pada tahun 1954 penduduknya sudah mencapai 200.000 jiwa.

3.2 Corak kehidupannya

Makasar sebagai kota pantai yang memiliki pelabuhan laut, baik pada masa Kerajaan Gowa maupun sesudahnya, kehidupan masyarakatnya bercorak maritim. Namun di samping itu, kehidupan agraris turut pula mewarnai kehidupannya. Karena itu pulalah, kehidupan masyarakatnya lebih mengarah pada segi perdagangan, pelayaran niaga, penangkapan ikan dan sedikit di sektor pertanian. Hal ini selaras dengan penjelasan Sartono Kartodirdjo tentang "kota" dalam buku Sejarah Nasional yang menyatakan:

Kalau boleh dikatakan bahwa kota itu sendiri dilihat dari segi pengertian ekonomi adalah suatu tempat menetap (settlement) di mana penduduknya terutama hidup dari perdagangan dari pada hidup dari pertanian.⁷⁷)

Di dalam masa-masa awal abad ke-20 dan sesudahnya, merupakan masa semakin tergeser dan merosotnya sektor kehidupan agraris khususnya persawahan dan perkebunan, terutama disebabkan penambahan penduduk dan menyempitnya lahan pertanian karena desakan pemukiman dan bangunan-bangunan

75) Dr. J.W. de Klein, *op.cit.*, hal. 10

76) *Ibid.* hal. 11

77) Sartono Kartodirdjo dkk, *Sejarah Nasional Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Balai Pustaka, Jakarta, 1977, hal. 212.

lainnya. Kehidupan kota Makasar semakin ditandai oleh ramainya pelabuhan dan kegiatan sirkulasi perekonomian.

Perkembangan Pelabuhan Makasar ang cukup pesat sesudah tahun 1912, selain memberikan dampak yang lebih tinggi terhadap penyerapan tenaga kerja, juga mengakibatkan bterangkatnya status sosial-ekonomi dari beberapa penduduk yang berhasil menggunakan kesempatan menguasai sektor-sektor vital perdagangan ketika itu.

Adalah jelas dalam kurun waktu itu Makasar sudah lebih maju dari masa-masa sebelumnya baik dari segi politik-pemerintahan, sosial-ekonomi, pendidikan dan kebudayaan. Corak kehidupannya semakin kompleks. Perkembangan di semua sektor kehidupan itu semakin memperluas lapangan kerja, baik sebagai pegawai, guru, pengusaha/pedagang dan bidang-bidang pekerjaan lainnya yang tingkatannya lebih rendah, seperti kuli atau buruh kasar dan pembantu rumah tangga. Kemajuan ini tentunya dalam konteks masyarakat jajahan yang berorientasi kepada kepentingan pemerintah kolonial.

Pada masa pemerintahan Jepang dan sesudah Jepang menyerah kalah, dengan berkumandangnya Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945, dengan datangnya NICA membonceng sekutu yang menang perang, selain dari semangat kemerdekaan rakyat yang membara, "kehidupan kota mengalami kemerosotan dan kelesuan, menyedihkan, suatu gambaran khas dari sebuah kota di mana dihancurkan hubungan-hubungan yang normal akibat perang. Kompleks pelabuhan dan sekitarnya menderita kehancuran yang hebat. Personil yang terlatih sebelum perang, baik krani-krani maupun mandor-mandor sudah dilenyapkan"⁷⁸), bangunan-bangunan vital banyak yang hancur.

Munculnya semboyan propaganda "jangan bekerja untuk NICA", menimbulkan problem akan tenaga buruh. Prestasi ker-

78) Dr. J.W. de Klein, *op.cit*, hal. 5

ja buruh dan kehidupan masyarakat umum yang memiliki pendapatan tetap yang dahulu memiliki kehidupan yang wajar, mengalami kesulitan.⁷⁹⁾

Pencurian-pencurian meningkat di pelabuhan dan gudang-gudang perusahaan. Namun dibalik itu, beberapa penduduk menggunakan kesempatan dalam kesempitan untuk memperoleh keuntungan besar dari kemelut ini, walaupun pada hakekatnya mereka tahu bahwa barang yang dibeli kemudian dijualnya itu diperoleh dengan cara yang tidak wajar (hasil curian). Begitu pula sebagian rakyat lainnya, terutama pedagang-pedagang kebutuhan hidup sehari-hari seperti beras, telur, ikan, daging, sayur-sayuran dan buah-buahan memperoleh keuntungan besar karena dapat menentukan harga akibat terbatasnya persediaan. Sirkulasi transaksi ekonomi ini digambarkan oleh J W de Klein sebagai *Pasar Gurilla* atau "Pasar Gelap".⁸⁰⁾

Usaha-usaha untuk menormalisasi kembali jaringan-jaringan kehidupan kota telah dilakukan oleh NICA. Antara lain perbaikan gudang-gudang pelabuhan dan bangunan-bangunan penting lainnya. Pengawasan pelabuhan semakin diperketat, diciptakan suatu jangka waktu kerja yang terikat. Usaha pemurnian mata uang *Muntverzuivering* seperti yang dilakukan di Negeri Belanda, dalam wilayah ini kelihatan amat sulit untuk diterapkan. Sejumlah perusahaan perdagangan didirikan, kantor-kantor dagang sebelum perang dibuka kembali. Beberapa kampung dibangun dan diperluas seperti Panampu, Bontoala, Baraya, Kalukuang, Lariangbangngi, Pisang, Mangkura, Sambungjawa, dan lain-lain.⁸¹⁾ Rupa-rupanya usaha-usaha ini untuk mendapatkan juga simpati masyarakat dalam kerangka strategi berkuasanya kembali Belanda di Indonesia khususnya di Makassar. Namun usaha-usaha itu tidak banyak berhasil.

79) *Ibid.* hal. 5

80) *Ibid.* hal. 6

81) *Ibid.*

Gambaran keadaan ini bukan berarti kota antara tahun 1942–1950 dinamika kehidupan kota terhenti, tidak demikian halnya. Kegiatan dan hubungan-hubungan normal tetap berjalan, namun dalam suasana mencekam dan tidak menentu, pola kehidupan kota yang kompleks tetap berjalan. Dalam periode ini jelas terlihat bahwa banyak penduduk asli yang bergerak di bidang transaksi tanah dan rumah, nelayan, sebagian kecil jadi pegawai pemerintah, mantri-mantri kampung, anggota polisi, jual-jualan dan buruh rendahan pada perusahaan-perusahaan milik asing. Sedangkan pendatang, di antara beberapa orang yang sudah berhasil menjadi pedagang-pedagang besar, lebih banyak yang bergerak dalam dagang kecil-kecilan atau kelontong, berjualan di pasar-pasar kampung, tukang kayu, tukang cukur, buruh kasar dan sebagian kecil sebagai pegawai pemerintah, anggota militer dan guru rendahan. Orang Arab kebanyakan sebagai pedagang dan Imam di masjid-masjid. Orang-orang Melayu kebanyakan sebagai pegawai termasuk pegawai sarak (agama) dari pada pedagang. Orang-orang Cina kebanyakan sebagai pedagang dan berjualan, sebagian kecil tukang kayu, sepatu, pandai emas, dan lain-lain. Sampai pada tahun 1950, perdagangan hasil bumi masih dikuasai oleh pedagang Makasar-Bugis.

Masa antara proklamasi kemerdekaan sampai dengan tahun 1949, merupakan ketidak stabilan politik dan keamanan. Usaha-usaha pemerintah dan rakyat Indonesia mempertahankan negara proklamasi di satu pihak, dan usaha-usaha Belanda lewat NICA-nya untuk mengembalikan kekuasaannya di lain pihak, merupakan ciri khas revolusi kemerdekaan di daerah Sulawesi Selatan khususnya di Makasar. Semangat kemerdekaan bangsa yang membara dan menggelora, ledakan revolusi fisik telah menjalar di seluruh pelosok kota Makasar, di seluruh tanah air sampai dengan pengakuan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III

STRUKTUR SOSIAL DAN LAPANGAN KERJA

1. Struktur Sosial

1.1 Struktur Sosial Tradisional Makasar

Menurut Weber, kasta adalah unit-unit yang distrukturkan (Weber dalam Bohannon, 1969 : 176). Sistem kasta yang termaktub dalam kitab suci Hindu kuno, membagi masyarakat atas empat tingkatan, Brahmana, Kesatria, Vaisya dan Sudra, pembagian ini dapat dilihat dalam sistem pelapisan sosial di masyarakat Bali, (Bagus dalam Koentjaraningrat, 1975 : 292-293).

Dalam kehidupan masyarakat tradisional Makasar, dikenal juga sistem pelapisan sosial yang berdasarkan keturunan, yakni:

1. Anakaraeng
2. Tumaradeka
3. Ata

A. Anakaraeng

Kelompok kerabat *anakaraeng* menempati tingkat tertinggi dalam pelapisan sosial masyarakat Makasar. Darah kebangsawanan anakaraeng dapat diijazahi berdasarkan silsilah keturunan mereka. Pada hakekatnya dalam sistem kemasyarakatan Makasar tradisional, semua orang memiliki derajat kemanusiaan yang sama, hanya peranan sosialnya yang menempatkan dan membe-

dakan seseorang dalam suatu status yang tinggi atau yang membedakan dengan orang yang lain. Oleh karena dalam masyarakat tradisional Makasar pusat kegiatan sosial tumbuh di lingkungan *anakaraeng*, maka ditempatkanlah kelompok kerabat ini sebagai lapisan tertinggi dan kelompok yang berperan utama dalam masyarakat (Mattulada, 1975 : 25-26, Mukhlis, 1975 : 26-27, Yaitim, 1982 : 82-83).

Kelompok atau lapisan *anakaraeng* terdiri atas empat golongan, yakni :

A.1 *Ana'Ti'no* atau *anakaraeng berdarah murni*. Golongan ini menyebut diri sebagai keturunan langsung dari *tumanurung* atau keturunan langit. Dalam struktur kekuasaan tradisional, *ana'ti'no* terbagi dua, yakni *Ana'Pattola* atau putra mahkota dan *Ana'Manrapi*, atau putra mahkota pengganti.

A.2 *Ana'Sipue* atau *bangsawan setengah murni*. Golongan ini adalah keturunan campuran antara keturunan *ana'ti'no* dengan orang biasa atau orang kebanyakan. Golongan *ana'sipue* terbagi dua golongan, yakni *ana'sipue manrapi* dan *ana'sipue*. Yang pertama lahir dari darah campuran *ana'tino pattola* dengan darah biasa, sedang yang kedua lahir dari percampuran darah antara *ana'manrapi* dengan darah biasa, (Mukhlis, 1975: 28-29).

A.3 *Ana'Cera*. Golongan ini berasal dari hasil percampuran darah antara *ana'pattola*, *ana'manrapi* dengan seorang wanita yang berasal dari golongan *ata* atau golongan budak.

A.4 *Ana'karaeng Sala*. Golongan ini berasal dari percampuran darah antara *anak sipue* atau *ana'cera* dengan darah orang kebanyakan atau *tusamara* dan darah *ata* (budak). Golongan ini merupakan kelompok bangsawan mayoritas. Hal ini terjadi karena pada umumnya golongan *ana'karaeng sala* lebih banyak mengadakan kontak dan berhubungan sehari-hari dengan orang-orang kebanyakan dan *ata*. Faktor lain yang mendorong terjadinya kontak yang lebih banyak antara golongan *ana'karaeng sala*

dengan orang-orang kebanyakan dan itu, ialah karena umumnya *ana'karaeng sala* tidak bermukim dalam kawasan benteng kerajaan. Karena itu tidak mengherankan jika seorang *ana'karaeng sala* seringkali mempunyai isteri banyak yang diambil dari wanita-wanita keturunan budak atau orang-orang biasa yang hidup di perkampungan di luar benteng kerajaan atau benteng kota.

Golongan bangsawan yang terdiri atas *ana'Ti'no*, *ana'Sipue*, *ana'Cera* dan *ana'karaeng sala*, umumnya disebut *ana'karaeng ri Gowa*, maksudnya ialah bahwa mereka masih memiliki darah campuran langit yang dibawa oleh *tumanurung*. Selain itu golongan bangsawan yang tidak memperoleh darah campuran langit, disebut *ana'karaeng maraengannaya*. Golongan ini berasal dari keturunan-keturunan asli dari para penguasa daerah, atau kepala-kepala negeri yang jauh sebelumnya sudah berkuasa sebelum kedatangan *tumanurung*. Secara umum sumber darah *ana'karaeng maraengannaya* berasal dari keturunan sembilan raja-raja kecil penguasa lokal di pedalaman Makasar, yakni: Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data Agangjene, Saumata, Bissei, Sera dan Kalli. (Razak Dg Patunru, 1969 : 1).

B. Tumaradeka

Lapisan *tumaradeka* terdiri atas dua golongan, yakni:

B.1 *Tubaji* atau *orang baik-baik*

Sebenarnya golongan *tubaji* masih tergolong kerabat bangsawan. sekalipun tempatnya berada pada tingkat yang paling rendah. Umumnya *tubaji* masih dapat menunjukkan hubungannya secara pasti dengan silsilah seorang bangsawan tertentu, namun ia sudah tidak dapat lagi menunjukkan identitasnya secara pasti pada lapisan kebangsawanan mana sebenarnya ia berada.

B.2 *Tusamara* atau *orang kebanyakan*

Golongan ini merupakan kelompok mayoritas dalam masyarakat mereka pada umumnya tidak lagi memiliki jalinan hubungan darah dengan darah bangsawan.

C. **Ata** atau **budak**

Sebenarnya dalam sistem sosial masyarakat Makasar atau masyarakat Sulawesi Selatan umumnya, dikenal hanya ada dua lapisan masyarakat, yakni lapisan *ana'karaeng* atau *ana'arung* dan lapisan *tumaradeka*. (Friedericy, 1933, Mattulada: 1975 31).

Ata bukanlah pelapisan sosial yang kedudukannya sama dengan *slave* atau budak, seperti keadaan budak yang dikenal secara umum. Friedericy menyebutnya sebagai lapisan sekunder yang terjadi mengikuti pertumbuhan kehidupan pranata-pranata sosial dalam kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. *Ata* lebih merupakan keadaan, di mana seseorang melepaskan atau dirampas kemerdekaannya. *Ata* dapat juga terwujud karena adanya pelanggaran adat (Mattulada, 1975: 32).

Lapisan *ata* terbagi atas dua golongan, yakni:

Ata sossorang, yaitu *ata* yang berasal dari jual beli, kemudian diwariskan secara turun temurun menjadi *ata mana*.

Ata Nibuang, ialah *ata* yang terjadi karena kesalahan adat atau terjadi karena diawali oleh suatu pelanggaran adat. Seseorang dapat juga menjadi *ata* dengan status *ata nibuang* karena kekalahan dalam perang atau tertangkap oleh musuh, termasuk kekalahan karena ketidak mampuan mempertahankan diri (ibid : 32).

Dalam kelangsungan hidup sehari-hari, orang Makasar sangat memperhatikan dan menjaga secara ketat pelapisan sosial yang dianutnya. Karena itulah maka dalam sistem birokrasi tradisional Makasar, kedudukan seseorang erat hubungannya dengan pelapisan dari mana para pemegang peranan berasal. Beberapa jabatan tradisional Makasar dapat ditunjukkan di sini antara lain:

Sombaya atau *Somba* (Raja)

Sebelum Tumanurung memerintah Gowa, Orang-orang Makasar pernah diperintah oleh empat orang Raja, berturut-

turut (1) Batara Guru, (2) Nibunoa ri Talali, (3) Ratu Sapu Manrancai, dan (4) Karaeng Katangka (Patunru dalam Mukhlis, *ibid*:⁷³). Kapan pemerintahan keempat raja ini berlangsung, tidak ada satupun sumber yang dapat menjelaskan secara pasti. Lontara=lontara Makasar pun tidak memuat banyak tentang hal ini, kecuali hanya menyebut nama keempat raja-raja tersebut. Sesudah pemerintahan Karaeng Katangka, maka berakhirilah zaman Kerajaan Gowa lama. Tidak ada satu pun sumber yang dapat menerangkan tahun ataupun abad yang pasti mengenai priode ini.

Selepas masa kekuasaan Karaeng Katangka, terjadilah kekosongan atas tahta kekuasaan orang-orang Makasar di Gowa. Atas kesepakatan sembilan raja-raja kecil atau kepala-kepala negeri di daerah Makasar, maka dibentuklah sebuah federasi yang diketuai oleh seorang pemimpin yang dipilih bersama. jabatan ini bernama *paccallaya*.

Setelah Tumanurung menjadi raja di Gowa (*sombaya ri Gowa*) yang pertama sekitar abad ke 14, maka kedudukan sembilan raja kecil ini beralih ke tangan *Tumanurung* selaku raja atas orang-orang Makasar di Gowa. Dalam kedudukan ini, status raja-raja kecil berubah menjadi *kasuwiyang salapang* atau *sembilan abdi*. Mereka berkewajiban membantu raja dalam mengendalikan kekuasaan di Gowa.

Tumabicara Butta

Jabatan yang hanya dapat diduduki oleh golongan bangsawan tinggi ini (*Ana'tino* maupun *ana sipue*), berperan mendampingi raja dan bahkan sewaktu-waktu berhak mengganti diri raja. Namun yang terpenting bagi seorang *tumabicara butta*, ialah karena pejabat ini harus berdiri di atas kepentingan raja dan kepentingan rakyat.

Tamailalang Toa dan Tumailalang Lolo

Tumailalang Toa mengepalai lembaga adat tertinggi kerajaan yang disebut *bate salapang*. Pejabat inilah yang menjem-

batangi antara raja (*sombaya, Tumabicara butta* dengan rakyat melalui lembaga adat *bate salapang*.

Tumabicara lolo. Pejabat ini adalah orang kedua terdekat di samping raja sesudah *Tumabicara butta*. Pejabat inilah yang secara langsung menerima keluhan, dan berbagai pengaduan yang datang dari lembaga adat dan aparat kekuasaan di daerah terutama jika dirasakan bahwa perintah atau permintaan yang datang dari pusat kekuasaan atau dari raja, dirasakan tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian perintah yang tidak dapat dilaksanakan wajib dikembalikan kepada si pemberi perintah, dalam hal ini *raja* atau *tumabicara butta*. Kedua jabatan penting yang sifatnya sangat pribadi ini hanya diduduki oleh kerabat terdekat raja atau *tumabicara butta*.

Gallarang

Jabatan *gallarang* dalam struktur kekuasaan kolonial di persamakan dengan *kepala distrik*. Jabatan ini sebelumnya bernama *kasuwiyang*. Pada zaman kekuasaan raja Gowa ke-10 (1546–1565) istilah *kasuwianya* diganti menjadi *gallarang*. Sekalipun pada tahun 1930-an, pemerintah kolonial menggunakan secara umum istilah *kepala distrik* untuk menggantikan istilah *gallarang*, namun kenyataannya istilah *gallarang* yang sudah melembaga itu masih tetap digunakan sampai tahun 1950-an, sekalipun digunakan tidak secara formal. Dalam hubungannya dengan pelapisan sosial umumnya kepala distrik atau *gallarang* adalah bangsawan keturunan *ana'karaeng maraengannaya*.

Jabatan-jabatan lain yang hanya terbuka untuk golongan bangsawan ialah, *karaeng tukkajannangngang* atau pejabat yang mengurus berbagai bidang perlengkapan negara. Pejabat ini membawahi beberapa orang *jannang* atau pengawas yang umumnya berasal dari lapisan *tubaji*, yakni *jannang padede bassi* (kepala pertukangan besi), *jannang padede bulaneg* (kepala pengawas pertukangan emas), *jannang pakeso* (kepala pengawas perlengkapan istana, khusus untuk perlengkapan permaisuri),

jannang paewang bundu (kepala pengawas pembuatan alat perang), *tukkajannangang ana'burane* (kepala pengawas anak-anak bangsawan), *jannang panrita balla* (kepala pengawas pekerja pembuat bangunan), dan lain-lain.

Selain jabatan *karaeng tukkajannangang*, jabatan penting yang hanya diduduki oleh kerabat bangsawan ialah *karaengari pa'bundukang* atau panglima perang, *anrong guru tukkajannangang* atau pejabat yang biasanya diangkat selaku kepala pertahanan pada daerah-daerah peperangan, dan *Anrong guru tu Bontoalaka* atau pejabat yang bertanggungjawab atas semua tawanan perang.

Jabatan-jabatan penting dalam sistem birokrasi tradisional Makasar yang diduduki oleh lapisan *tumaradeka*, khususnya *tubaji* ialah, 1) *Alaka* atau Daengta *Alakaya*. Pejabat ini secara khusus bertanggungjawab menjaga harta pusaka raja dan juga memimpin berbagai upacara tradisional yang berhubungan dengan adat. 2). *Daengta Kaliya* atau *kadhi*. Setelah agama Islam diterima secara resmi menjadi agama kerajaan, maka pejabat inilah yang memegang peranan penting dalam masalah upacara keagamaan, terutama yang berhubungan dengan siklus kehidupan raja atau keluarga istana. Pejabat ini juga mendampingi raja atau memberi nasehat kepada raja terutama pada hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari Daengta Kaliya dibantu oleh beberapa orang yakni: *Daeng Imang*, memimpin secara langsung masyarakat setempat dalam menjalankan ibadah sehari-hari. Pejabat ini juga secara langsung berhubungan dengan masalah perkawinan dan mengurus pelaksanaan pemakaman secara Islam terhadap warga yang meninggal. Biasanya seorang *imang* dibantu lagi oleh seorang wakil yang sering disebut *guruwa* atau *gurunta*. Jumlah *guru* (wa) tergantung pada banyaknya jumlah mesjid, karena itu jumlah *guru* (wa) tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Pembantu-pembantu lainnya ialah *hatte* atau juru penerang, *bidala* atau juru azan dan *doja* (*jannang masigi*) atau

penjaga kebersihan mesjid. *Imang, guruawa*, umumnya dari kalangan *tusamara* sedang *hatte* dan *doja* lebih banyak diduduki oleh golongan *ata* (Yatim, 1982 : 88).

Matowa

Matowa merupakan jabatan yang setingkat dibawa *galla-rang*. Pejabat ini dipilih secara langsung oleh rakyat untuk satu jangka waktu masa jabatan yang tidak ditentukan, Dalam sistem administrasi baru sesudah kemerdekaan Indonesia, jabatan ini disamakan dengan kepala kampung. Jabatan ini juga umumnya hanya diduduki oleh seseorang yang berasal dari golongan *tubaji*.

Sabannara

Jabatan tradisional ini sebenarnya sudah hilang sejak aktivitas perdagangan Kerajaan Gowa merosot, atau sejak tidak berfungsinya lagi pelabuhan dagang Kerajaan Gowa di Maccini Sombala, muara Sungai Jenebarang. Atau sekitar awal abad ke-18. Karena itu ketika Kerajaan Gowa diakui kembali sebagai kerajaan otonom oleh pemerintah kolonial tahun 1935–1936, jabatan ini tetap diadakan, sekalipun kenyataannya tidak berperan lagi. Jabatan *sabannara* umumnya diduduki oleh *tubaji*. Rupanya tradisi pengangkatan *tubaji* memegang jabatan *sabannara* mengikuti pola pengangkatan *sabannara* yang pertama di *Gowa*. Daeng Pamaute seorang di antara tokoh terkemuka kerajaan Gowa yang berasal dari golongan *tubaji*.

1.2 Mobilitas Sosial dalam Birokrasi Kolonial

Zaman pemerintahan *sombaya ri Gowa*, Karaeng Lembang Parang Sultan Husain (1895–1905), dicatat sebagai masa yang paling sulit bagi orang-orang Makasar. Hal ini terjadi karena sejak memasuki tahun 1900 pemerintah kolonial mulai meningkatkan kembali tekanannya untuk menaklukkan secara menyeluruh orang-orang Makasar, terutama untuk menaklukkan Kerajaan Gowa (Yatim, 1982 : 89).

Untuk menaklukkan Kerajaan Gowa, pemerintah kolonial lebih dahulu menaklukkan Kerajaan Bone. Dalam peperangan ini, kerajaan Bone dibantu oleh Wajo, Soppeng dan Gowa sendiri. Dalam perang penaklukan itu, tahun 1905 Kerajaan Bone akhirnya takluk dan pada tahun yang sama Belanda menahan raja Bone La Pawawoi Karaeng Singeri. Selanjutnya pada tanggal 7 Oktober 1905, pasukan Belanda meninggalkan Bone dan langsung berangkat ke Makasar untuk selanjutnya menyerang Gowa. Sejak saat itulah hampir seluruh daerah Makasar kembali dilanda peperangan. Dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, perang tahun 1905 tidak lagi dipusatkan di daerah tertentu, melainkan dilakukan secara bergerilya dengan berpindah-pindah dari Lakiung ke Pakkatto, ke Barru bahkan sampai ke Sawitto. (Yatim, 1982: 90).

Pada tanggal 25 Desember 1906, Belanda berhasil mengepung raja Gowa dan pengikut-pengikutnya di WaruE, Sidenreng. Dalam pertempuran itulah raja Gowa tewas karena terjatuh ke jurang ketika ia berusaha meloloskan diri dari kepungan. Dengan kematian raja Gowa, dan pengasingan beberapa orang tokoh terkemuka kerajaan seperti I Mappanyukki Datu Suppa dan I Mangimangi Karaeng Bontonompo, maka dengan sangat cepat perlawanan orang Makasar menentang kolonial menjadi kendor. Keadaan menjadi lebih buruk lagi ketika pemerintah kolonial menyita *regalia* atau benda-benda pusaka kerajaan (kalompoang) dan beberapa petaka-petaka (bate-bate) kebesaran kerajaan. Sejak itu berakhirlah fase yang panjang dari perlawanan orang-orang Makasar menentang penjajahan. Tahun 1907 perjalanan sejarah Makasar diawali dengan fase penetrapan administrasi kolonial di Gowa. Dengan demikian, mulailah fase penjajahan Pemerintah Kolonial Belanda di Sulawesi Selatan, dengan kota Makasar sebagai pusat kekuasaannya. (Mattulada, 1975 : 434, Yatim, 1982 : 90).

Dalam sistem administrasi kolonial, wilayah orang Makasar khususnya Kerajaan Gowa dibagi dalam bentuk pemerintahan

distrik-distrik. Daerah yang berada di bawah pengawasan pemerintah Belanda ini (distrik), terbagi atas beberapa buah kekuasaan desa atau kampung yang sebelumnya terdiri atas kerajaan-kerajaan kecil di masa pemerintahan kerajaan Gowa (Erdmans, 1897 : 7).

Secara keseluruhan daerah Sulawesi dibagi ke dalam tiga jenis kekuasaan di bawah pengawasan gubernemen Hindia Belanda yakni:

1. Daerah-daerah Gubernemen yang langsung di bawah kekuasaan dan pemerintahan Gubernemen (Hindia Belanda)
2. Daerah-daerah Gubernemen yang tidak langsung dikuasai dan diurus oleh Gubernemen (Hindia Belanda)
3. Daerah-daerah yang menjadi sekutu Gubernemen, daerah mana disebut *Bondgenootschappelijke Landen*

Daerah yang termasuk jenis pertama, adalah distrik Makasar, distrik-distrik di sebelah utara Bantaeng dan Bulukumba, Pulau Selayar dan pulau-pulau sepanjang pantai Barat Sulawesi, kecuali Pulau-pulau Balang dan Karanrang, keduanya masih tetap diakui sebagai territorial kekuasaan Kerajaan Tallo.

Daerah yang termasuk jenis kedua, ialah L. Kaili, Pare-Pare, Tanete, Tallo, Wajo dan Laiwui.

Sedang daerah jenis ketiga ialah: Mandar, Toraja, Massenn-réng Pulu, Luwu, Ajatapparang, Bacukiki, Nepu, Batupute, Labaso, Barru, Soppeng, Bone, Gowa, Sanrabone, Toratea, Buton, Sumbawa dan Flores.

Dalam struktur kekuasaan pemerintah kolonial Belanda sesudah tahun 1905, territorial kekuasaan Kerajaan Gowa, tetap diakui seperti yang sudah disepakati dalam Perjanjian Bungaya 18 Nopember 1667. Batas ini pulalah yang berlaku untuk memisahkan daerah yang termasuk distrik-distrik kota Makasar dengan Gowa sampai dengan tahun 1947. (de Klein, 1947 : 1).

Khusus untuk daerah Makasar (kota), pemerintah kolo-

nial membaginya dalam enam distrik, seperti yang telah dikemukakan dalam bab II di atas, yakni: Makasar, Wajo, Melayu, Ende, Ujung Tanah dan Mariso. Distrik Makasar, Wajo, Melayu dan Ende, masing-masing diperintah oleh seorang kepala distrik yang bergelar *kapitein*, orang Makasar menyebutnya *Kapitang*, sedang dua distrik lainnya, yakni Ujung Tanah dan Mariso, masing-masing diperintah oleh seorang kepala distrik yang bergelar *gallarang* (de Klein, 1947 : 2).

Para kepala distrik dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu oleh beberapa orang *sariang*. Pejabat ini bertugas untuk meneruskan perintah kepala distrik kepada rakyat. Dalam birokrasi tradisional Makasar, fungsi *sariang* dapat disamakan dengan jabatan *jannag suro*. Jabatan ini umumnya diduduki oleh seseorang dari golongan *tusamara*. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya terutama sesudah tahun 1920-an jabatan *sariang* mengalami kemerosotan, yakni hanya sebagai pengantar surat atau orang suruhan yang setiap saat siap di rumah kepala distrik, terutama untuk tugas-tugas yang berhubungan dengan penyampaian perintah tertulis maupun perintah lisan dari atasannya. Jabatan serupa dalam birokrasi tradisional hanya diduduki oleh seorang *suro* atau pesuruh yang umumnya diambil dari kalangan *ata*.

Penyusutan status *sariang* sangat erat hubungannya dengan sistem gaji bagi aparat yang harus dikeluarkan oleh kepala distrik untuk seorang *suriang*. Dengan jalan menurunkan status jabatan *suriang*, berarti juga bahwa jabatan tersebut hanya diduduki oleh seseorang yang memiliki status sosial yang setingkat dengan jabatan tersebut. Seorang *ata* yang mengabdikan kepada kepala distrik tidak perlu digaji, melainkan mengabdikan lahir batin kepada tuannya. Dengan demikian kepala distrik tidak perlu mengeluarkan uang kas atau uang pribadinya yang diperoleh dari gaji untuk membayar *suriang*. Sementara itu dalam sistem birokrasi kolonial bermunculan pula berbagai jabatan penting yang tidak lagi hanya diperuntukkan bagi golongan bangsawan, melainkan untuk semua masyarakat. Dengan demi-

kian semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh gaji. Namun demikian tidaklah berarti bahwa setiap orang mampu untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut, karena hanya orang-orang yang berpendidikanlah yang memiliki peluang untuk berbagai jabatan tersebut, misalnya sebagai *tuang guru* (guru sekolah), *tuang mantari* (mantri kesehatan), *schrijver*, *mantri belasting*, dan lain-lain.

Sistem pemberian gaji terhadap pegawai-pegawai pemerintah misalnya terhadap seorang *regent* memperoleh gaji sebanyak empat ratus gulden, tampaknya memberi pengaruh khusus dalam kehidupan masyarakat. Namun demikian salah satu faktor utama yang tidak dapat dilupakan sebagai penggerak laju mobilitas sosial di Sulawesi Selatan khususnya di Makasar ialah berdirinya berbagai organisasi Islam, yang bergerak di bidang sosial dan pendidikan antara lain cabang Sarekat Islam di Makasar tahun 1916, atas usaha Ince Abdul Rahim, Ince Tajudin dan kawan-kawan. Sementara itu tahun 1917 berdiri pula di Makasar sebuah perkumpulan yang bernama Assirat Mustakim oleh M. Kasim, Bidal dan Haji Abdul Razak. Pada tahun 1926 berdiri gerakan Islam Muhammadiyah yang dipelopori oleh Mansyur al-Yamani. (Abu Hamid, 1979 : 53-54).

Dalam administrasi kolonial Belanda, pejabat yang berasal dari golongan pribumi diangkat langsung oleh pemerintah atas persetujuan dan surat keputusan dari *gubernemen*, tanpa meminta persetujuan dari pemangku adat setempat. Hal ini berlaku pada pengangkatan kepala-kepala distrik di daerah kota Makasar, antara lain distrik Makasar, Wajo, Melayu dan Endeh. Sedangkan untuk pengangkatan kepala distrik Ujung Tanah dan Mariso, kepala distriknya yang masih tetap bergelar *Gallarang* itu dipilih langsung oleh para kepala-kepala kampung beserta para imam kampung. Namun untuk pengesahannya tetap harus menunggu persetujuan dari pemerintah kolonial. Sekalipun pemerintah kolonial telah membuka pintu mobilitas dalam administrasinya, namun dalam kenyataannya untuk jabatan-jabatan seperti kepala distrik atau *gallarang* tetap diduduki oleh kerabat

bangsawan, paling rendah dari golongan tubaji. Keadaan ini berlangsung hingga awal kemerdekaan Indonesia.

Untuk menjaga kepatuhan para bangsawan, raja-raja dan kepala-kepala negeri atau para pembesar *Zelfbestuur* pada umumnya, Pemerintah Kolonial Belanda tetap memberi hak dan berbagai kelonggaran kepada para pembesar tersebut untuk tetap memiliki hak usaha atas tanah-tanah tegalan atau persawahan yang disebut *tanah arajang* atau *kalompoang*. Pemerintah Hindia Belanda tetap memberi kepada mereka penghasilan bulanan (*toelege*), seperti misalnya untuk seorang setiap distrik yang diperintah oleh seorang *regent* memperoleh gaji sebesar empat ratus gulden. Keadaan ini berlangsung sampai pecahnya perang dunia ke-2 (yatim, 1982 : 436).

Masa Pendudukan Jepang

Pada zaman kekuasaan Jepang yang diawali dengan pendaratan di Makasar tanggal 9 Pebruari 1942, para *assisten residen* Belanda diganti oleh pejabat tentara pendudukan Jepang yang disebut *Ken-Kanrikan*. Ketika seluruh daerah di Sulawesi Selatan diduduki Jepang maka para *controleur* dalam pemerintahan Belanda diganti dengan pejabat yang disebut *bunken kanrikan*. Raja-raja lokal yang sebelumnya berstatus *zelfbestuurder* dalam pemerintahan kolonial Belanda diberi pangkat *sucho*.

Sekalipun pemerintah pendudukan Jepang tetap menggunakan tenaga para bangsawan dan pejabat-pejabat lokal yang sebelumnya berperan dalam administrasi kolonial Belanda, namun selama masa hampir empat tahun pendudukan Jepang orang-orang Bugis-Makasar (pribumi), banyak memperoleh kesempatan untuk menduduki berbagai jabatan pemerintahan dalam administrasi pendudukan Jepang. Hal tersebut sangat besar artinya, karena rupanya pengalaman yang berharga ini, terlepas dari kekejaman yang dilakukan oleh tentara Jepang, para pegawai atau petugas pemerintah memperoleh ketrampilan

tersendiri dalam administrasi pemerintahan. Pengalaman inilah yang kemudian sangat berguna di awal kemerdekaan Indonesia sebagai tulang punggung administrasi pemerintahan Republik Indonesia.

Namun selepas kekuasaan Jepang, terutama sejak tentara KNIL atau sejak Polisi Kolonial secara resmi memikul sendiri beban keamanan dan Pemerintahan di Sulawesi (di Makasar), tanggal 14 Juli 1946. (Barbara S. Harvey, 1979: 144, S. La Hade, 1982 : 12). Kota Makasar kebanjiran tenaga kerja kasar (buruh), sementara gangguan keamanan dan kejahatan kian hari jumlahnya menjadi meningkat. Hal ini disebabkan karena selama masa pendudukan Jepang, pemerintah pendudukan mendatangkan *heiho* dan *romusa* dalam jumlah yang sangat besar di daerah ini, sedang ketika Jepang harus meninggalkan Sulawesi Selatan, khususnya kota Makasar, Jepang meninggalkan para *romusa* dan *heiho* di Makasar saja jumlahnya mencapai 8.000 orang yang terdiri atas suku Jawa, Sunda, Madura, Batak, Minangkabau dan beberapa orang dari Aceh. Para *romusa* ditinggalkan untuk mencari jalannya sendiri-sendiri. Keamanan kota Makasar kian memburuk terutama ketika NICA menyatukan semua bekas *romusa* dan *heiho* dari seluruh Indonesia Timur di Makasar.

Untuk meringankan beban KNIL, para eks *romusa* dan *heiho* disalurkan ke berbagai lapangan kerja, umumnya kerja kasar sebagai buruh harian dengan upah f.1.50,- per hari. Mereka digaji setiap 10 hari sekali dengan potongan f.0.90,- perhari ditambah dengan pajak upah sebesar 5%. Setiap bulan jumlah tenaga kerja eks *romusa* dan *heiho* yang bergaji rendah membanjiri kota Makasar. Keadaan ini ternyata sangat merugikan para pekerja atau buruh harian lokal, karena kebanyakan perusahaan atau pencari tenaga kerja lebih senang menggunakan tenaga ex *romusa* dan *Heiho*. Hal ini terutama karena mereka mau menerima upah rendah dan sanggup bekerja keras. Sejak saat itu, daerah pelabuhan Makasar menjadi tidak aman. Hampir setiap hari terjadi bentrokan antara buruh pelabuhan eks romu-

sa dengan buruh pelabuhan lokal yang tersingkir atau kehilangan pekerjaan karena tidak mampu bersaing dengan eks romusa. Dengan demikian tertutuplah satu lapangan kerja utama bagi kebanyakan *tusamara* atau bekas *ata* di kota Makasar. Sebagai akibatnya banyak lapangan kerja baru tercipta, antara lain sebagai penjual keliling. Penjual ikan, sayur-mayur, buah-buahan, minyak, makanan atau kue-kue dan minuman, berbagai usaha jasa seperti gerobak pengangkut barang, penangkapan ikan kecil-kecilan dan juga sebagai anak perahu. Namun demikian bidang-bidang usaha baru ini ternyata belum dapat memecahkan permasalahan ketenagakerjaan di kota Makasar yang kian bertambah padat penduduknya itu. Karena itulah pihak KNIL atau pihak pemerintah kolonial terpaksa mengambil jalan untuk mengangkut para *romusa* dan *heiho* meninggalkan Makasar menuju ke Jawa. *Centraal Bureau Repatriëering Javaansche Arbeiders* yang dipimpin oleh Mr. C.A. Gobius, salah seorang dari pejabat tinggi kantor keresidenan, ditunjuk oleh pemerintah kolonial untuk mengurus pengiriman atau pengangkutan ke Jawa para eks romusa dan *heiho* tersebut. Untuk itu selama satu tahun pertama sejak pertengahan tahun 1946, telah dikirim ke Jawa sebanyak 36.000 orang (De Klein 1947 : 11).

1.3 Mobilitas Sosial Sesudah Kemerdekaan Indonesia

Setelah perang dunia kedua berakhir dengan kemenangan pihak sekutu, dan proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 terdengar di seluruh Indonesia, maka di Sulawesi Selatan pun gema proklamasi itu menghidupkan kembali kesadaran rakyat untuk merdeka. Andi Mappanyukki Arum Pone (raja Bone) dan Andi Jemma Datu Luwu bersama-sama beberapa *zelfbestuurder* menyatakan diri berdiri di belakang Republik Indonesia (Mattulada, 1978 : 447). Pernyataan ini tidak hanya mengandung arti politis semata-mata, tetapi juga aspek sosial yang ditimbulkannya ternyata sangat besar artinya. Keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam berbagai badan perjuangan yang berada di bawah pengaruh kedua raja terkemuka itu,

menghapus secara berangsur-angsur garis pemisah dalam pelapisan sosial yang berdasarkan keturunan. Salah satu akibatnya ialah dengan munculnya tokoh-tokoh bukan keturunan bangsawan memegang peranan penting dalam berbagai bidang.

Sementara itu perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia di kawasan Indonesia bagian timur yang berpusat di Makasar, kian memperlihatkan kegiatan yang meningkat. Dr. Ratulangie yang juga sebagai gubernur Sulawesi, bertindak selaku ketua dari semua kegiatan perjuangan yang bernama "*Pusat Keselamatan Rakyat*". Dalam kedudukan ini kota Makasar kembali menjadi kota pertemuan dari berbagai organisasi perjuangan di Indonesia bagian Timur. Keadaan tercermin ketika Dr. Ratulangie mengangkat para pembantu-pembantu utamanya yang terdiri dari tokoh-tokoh yang berasal dari berbagai penjuru tanah air yang saat itu berdiam di Makasar (Patang, 1976 : 58), antara lain :

1. Lanto Daeng Pasewang dari Sulawesi Selatan
2. Saleh Daeng Tompo dari Sulawesi Selatan
3. Latumahina dari Maluku
4. Soewarno dari Jawa
5. Mr. Zainal Abidin dari Sulawesi Selatan
6. I.P.L. Tobing dari Sumatera Utara
7. W.S.T. Pondaag dari Sulawesi Utara

Selain pengangkatan beberapa orang pejabat pemerintahan Republik Indonesia yang terdiri atas berbagai suku bangsa, pencerminan gerak mobilitas dan suasana demokrasi di Sulawesi Selatan atau di Indonesia Bagian Timur umumnya dapat dilihat dengan adanya partisipasi para bangsawan dan raja-raja di belakang Dr. Ratulangie sebagai Gubernur dan sebagai wakil ayah satu-satunya pemerintah RI.

Pada bulan Desember 1945 atas nama pemerintah Belanda diadakan suatu perundingan di Makasar antara delegasi Belanda dan Dr. Ratulangie Cs, sebagai wakil pemerintah Republik Indonesia. Bagian yang terpenting dari perjanjian itu ialah :

1. Kota Makasar diperintah oleh satu komite bersama yang terdiri atas petugas-petugas Indonesia dan Belanda dibawah pengawasan Panglima Sekutu
2. Daerah-daerah lainnya akan diperintah langsung oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Gubernur Dr. Ratulangie
3. Status politik yang pasti dari Sulawesi akan ditentukan nanti sesuai dengan status seluruh Indonesia berdasarkan persetujuan antara Pemerintah Pusat R.I. dan Pemerintah Belanda (Patang, 1976 : 61)

Persetujuan Desember di atas ternyata tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini terjadi karena ternyata pihak Belanda, mengirim pasukan bersenjata ke pedalaman yang seharusnya menjadi daerah kekuasaan Republik Indonesia. Selain mengirim pasukan, pihak Belanda mengirim juga beberapa orang utusan khusus ke daerah-daerah untuk meminta dukungan dari raja-raja dan tokoh-tokoh masyarakat terkemuka di Sulawesi Selatan. Dukungan dari para raja dan tokoh masyarakat sangat diperlukan dalam rangka pembentukan sebuah negara yang diberi nama "Negara Indonesia Timur" atau NIT, (Tanggal 24 Desember 1946). Negara baru yang dibentuk ini meliputi seluruh daerah yang disebut pada zaman Hindia Belanda *De Grote Oost* (Timur Besar. Di dalamnya meliputi 13 daerah otonom, di antaranya daerah otonom Sulawesi Selatan yang meliputi seluruh bekas daerah Karesidenan Sulawesi Selatan.

Dalam daerah otonom Sulawesi Selatan terdapat 30 buah daerah swapraja asli 8 buah daerah swapraja baru. Pemerintah Sulawesi Selatan dijalankan oleh sebuah badan pemerintahan yang disebut "Hadat Tinggi". Anggota-anggota "Hadat Tinggi" adalah semua kepala-kepala pemerintah swapraja yang 38 orang jumlahnya (semuanya adalah bangsawan dan raja-raja). Penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dilakukan oleh "Majelis Hadat Tinggi" yang terdiri atas tujuh orang, di bawah pimpinan/ketua Andi Pa' benteng, raja Bone dan Ketua Muda Andi Ijo

Karaeng Lalolang, raja Gowa. Di samping Dewan Hadat Tinggi, terdapat juga "Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Selatan" yang dipilih secara bertingkat.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah-daerah swapraja, maka pemerintah pusat NIT yang berkedudukan di Makasar, menarik semua *Resident*, *Assisten Resident* dan semua *Controleur* dari daerah-daerah dan menempatkannya di kantor pusat pemerintahan NIT di Makasar. Untuk menjalankan roda pemerintahan daerah, pemerintah NIT mengukuhkan kekuasaan para raja dan pejabat tradisional yang berkuasa sebelumnya. Hal ini sangat penting artinya, terutama karena tidak semua raja-raja dan tokoh-tokoh masyarakat berpihak kepada republik. Di Gowa misalnya, Raja Gowa Andi Ijo Karaeng Lalolang diangkat juga selaku KPN (Kepala Pemerintah Negeri). Di samping itu diangkat pula berbagai jabatan tradisional Makasar sebagai fungsionaris pemerintahan di Gowa antara lain:

1. *Pabbicara Butta* : Memegang jabatan kepala bidang pemerintahan
2. *Tumailalang Toa* : Memegang jabatan khusus bidang sosial dan kemasyarakatan
3. *Tumailalang Lolo* : Memegang jabatan khusus dalam bidang pengembangan pendidikan
4. *Tukkajannangngang* : Memegang jabatan khusus dalam bidang keamanan
5. *Paccallaya* : Memegang jabatan khusus selaku kepala kepolisian

Dalam situasi NIT, tampak dengan jelas bahwa mobilitas sosial di tingkat daerah kembali menjadi lamban, hal ini dapat dibuktikan dengan berkuasanya kembali para penguasa tradisional para bangsawan dan aparat penguasa lain yang secara tradisional sudah memegang kekuasaan secara turun temurun, namun di kota Makasar sendiri yang juga sebagai pusat pemerintahan NIT, mobilitas sosial melaju dengan sangat cepatnya. Pada saat itu pula Makasar menjadi kota tumpuan harapan

orang-orang di daerah Indonesia bagian timur. Karena itulah tidak mengherankan jika disetiap kantor resmi pemerintahan di Makasar, dipadati oleh pegawai-pegawai yang multi etnik Indonesia Timur. Keadaan semacam ini masih dapat dilihat sisa-sisanya diberbagai kantor-kantor yang ada di Makasar sekarang.

Setelah penyerahan kedaulatan oleh Kerajaan Belanda kepada Republik Indonesia Serikat (RIS), maka pada tanggal 26 April 1950, Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan melalui Ketua Muda Hadat Tinggi, Andi Idjo Karaeng Lalolang (raja Gowa), menyatakan diri lepas dari ikatan ketatanegaraan NIT dan menggabung diri kepada RI yang beribu kota di Yogyakarta. Sejak saat itu, semua pemerintah swapraja di Sulawesi Selatan membubarkan diri dan menyatakan patuh kepada keputusan Ketua Muda Hadat Tinggi. (Mattulada, 1978: 438). Pernyataan ini sangat besar artinya karena sejak saat itulah gelar-gelar jabatan tradisional dalam birokrasi tidak digunakan lagi. Nama-nama jabatan seperti *Pabbicara butta*, *Tumailalang Toa*, *Tumailalang lolo*, *Tukkajannanggang*, *Paccallaya*, menjadi milik pribadi pemangkunya yang terakhir, itulah sebabnya mengapa beberapa orang di antara pejabat tradisional ini masih tetap disapa dengan gelar tradisional yang pernah dipangkunya, sekalipun tidak berperan lagi seperti semula.

Perubahan sistem politik menjelang pertengahan tahun 1950-an yang juga mengakibatkan terjadinya perubahan kedudukan para bangsawan di Sulawesi Selatan, secara langsung mempengaruhi gerak mobilitas sosial yang mandek di zaman NIT. Anak-anak muda atau angkatan muda kaum bangsawan, tidak lagi hanya menunggu jabatan warisan, tetapi juga secara aktif menyusup ke berbagai bidang usaha, lapangan kerja, lingkungan militer, politikus, cendekiawan dan lain-lain. Merekalah sekarang ini disebut golongan elite baru yang menggantikan kedudukan elit *anakarraEng* dalam struktur lama.

2. Lapangan kerja

2.1 Gambaran Pembagian Kerja antar Etnis (suku)

Dasar pertumbuhan "kota Makasar" sebagai bandar utama dan pusat kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya di Kawasan Indonesia Timur, telah dirintis oleh kerajaan Gowa sejak abad ke 16-17.

Dalam perkembangannya, kota Makasar telah memikat banyak suku bangsa. Di Makasar para pendatang tidak hanya sekedar mengadu nasib dengan mengerjakan berbagai macam jenis pekerjaan tetapi juga berasimilasi dengan penduduk setempat.

Diketahui bahwa secara relatif hanya beberapa suku di antara penduduk Indonesia yang mempunyai dorongan kuat untuk merantau seperti: orang Banjar, orang Bugis, orang Batak dan orang Minangkabau (Naim, 1977 : 83). Namun demikian ini tidak berarti bahwa suku-suku lain tidak melakukan migrasi. Hal ini dapat dibuktikan dengan menunjukkan adanya keanekaragaman suku-suku bangsa yang berdiam di kota ini. Mereka berasal dari perantau-perantau suku Banjar, Minahasa, Sangir, Ambon (orang Maluku), Timor, Madura, Tanimbar, Buton, Cina, India, Arab, di samping perantau-perantau lokal seperti orang Mandar, Toraja, dan orang-orang Massenreng Pulu.

Perpindahan suku-suku bangsa tersebut di atas, dari tempat asalnya ke kota Makasar, mempunyai latar belakang dan alasan yang berbeda-beda. Dari berbagai hasil penelitian tentang migrasi, atau perpindahan penduduk dari daerah lain ke kota Makasar, diperoleh kesimpulan bahwa dorongan yang terkuat penyebab migrasi, ialah alasan ekonomi, di samping alasan-alasan lain seperti adat-istiadat dan pendidikan (Naim, 1977 : 83, Hasan Walinono, 1974 : 83).

Di kota Makasar para pendatang hidup dengan berbagai jenis pekerjaan yang berbeda-beda. Orang-orang Banjar umumnya sebagai pedagang barang perhiasan, orang Minahasa sebagai aparat pemerintah (pegawai-militer), orang-orang Sangir sebagai buruh dan pegawai kecil, orang-orang Ambon sebagai aparat pemerintah dan juga sebagai misionaris, orang-orang Timor sebagai buruh, orang-orang Madura sebagai buruh, orang-orang Tanim-

bar sebagai buruh dan pegawai kecil, orang Buton sebagai buruh kasar pada berbagai lapangan pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga kasar seperti pembuatan jalan, dermaga dan bangunan-bangunan. Orang-orang Cina umumnya bergerak di bidang usaha, perdagangan dan pertukangan, sedang orang-orang India dan Arab umumnya bergerak di bidang perdagangan kain, rempah dan obat-obatan. Perantau-perantau lokal seperti orang Mandar mendiami daerah pesisiran atau daerah pantai dan umumnya sebagai nelayan kecil, sedang orang-orang Toraja dan Massanreng pula lebih banyak mengerjakan pekerjaan kasar selaku buruh harian di berbagai bidang pekerjaan di kota. Orang-orang Makasar sendiri selaku penduduk asli, sebenarnya tidak banyak yang menetap di kota, hanyalah mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan kota selaku aparat yang berkediaman di kota, sedang umumnya orang-orang Makasar mendiami daerah-daerah seperti Pangkajene, Maros, Gowa, Takalar, Jene-ponto, BantaEng dan Selayar (Mattulada, 1975 : 259, dalam Koentjaraningrat). Daerah pinggiran kota, umumnya menjadi tempat pemukiman yang sangat padat penduduknya. Hal ini disebabkan karena setiap tahun penduduk yang bermukim di perkampungan-perkampungan yang tidak jauh dari kota, berdatangan ke kota mencari pekerjaan. Keadaan tanah yang umumnya kurang subur di beberapa daerah Makasar turut mempercepat laju urbanisasi, sementara jumlah tenaga yang dibutuhkan untuk berbagai jenis pekerjaan kian bertambah banyak kota, mereka disebut *pa'jama*.

Di samping bekerja sebagai buruh tetap, banyak di antaranya yang bekerja sebagai buruh musiman yang hanya menetap di kota atau di daerah pinggiran kota (Mudiyono, 1978 72-73). Di samping sebagai buruh musiman, banyak di antara mereka menjadi *pa'gandeng* atau penjual sayuran, buah-buahan dan bahan pangan berkeliling kota (Tachya, 1983 : 1-14).

Dalam bidang pemerintahan, semua jabatan tradisional dipertahankan dalam administrasi kolonial tetap berada di ta-

ngan orang-orang Makasar sendiri, seperti jabatan kepala distrik, kepala kampung, jabatan-jabatan keagamaan, polisi kampung dan bahkan beberapa jabatan penting dalam kepegawaian pemerintah kolonial. Di antara mereka ada yang bergelar *kapitang* dan ada pula yang bergelar *gallarang* (de Klein, 1947 : 2).

Orang-orang Melayu mulai berdatangan dan menetap di Makasar sejak sekitar abad ke-16, mereka telah beradaptasi dengan kebudayaan Bugis-Makasar dalam kehidupannya sehari-hari. Demikian pula sebaliknya, banyak dari peradaban Melayu yang masuk dan menjadi inti budaya Bugis-Makasar, terutama dalam lingkup tradisi besar di sekitar kehidupan istana dan para bangsawan.

“Orang-orang Melayulah yang mengajar anak negeri di sini (orang-orang Bugis-Makasar) banyak hal, seperti cara duduk dalam berhadapan, berpakaian dan memperkenalkan bermacam-macam perhiasan untuk raja-raja dan para bangsawan memperkenalkan keris bersarung emas, gelang panjang, arsitektur rumah, aturan cukai, pengaturan dermaga dan pengawasan atas pejabat (sistem birokrasi)” (Kronik Melayu, Inche Mannambai Ibrahim tidak diterbitkan: Koleksi pribadi).

Karena itulah tidak mengherankan jika orang-orang Melayu menduduki kedudukan terhormat di daerah Makasar maupun di daerah Bugis, baik di zaman kejayaan Kerajaan Gowa maupun di zaman pemerintahan kolonial. Jabatan-jabatan administrasi pemerintahan sejak permulaan abad ke-20 yang diduduki oleh orang-orang terkemuka di Sulawesi Selatan umumnya di tangan orang-orang Melayu atau keturunan Melayu. Karena itu tidaklah mengherankan jika orang-orang Melayu menyebut diri mereka golongan *ambtenar* atau *personel gebernemen*. Bidang-bidang tugas dan berbagai jabatan *pangreh praja* seperti *bestuur assistent* (BA), *hulp bestuur assistent* (H B A), *mantri politie, klerk, school opziener*, berada di tangan mereka.

Perantau lain yang memegang peranan penting di kota Ma-

kasar ialah orang-orang Bugis. Sekalipun orang-orang Bugis dalam banyak hal tidak dapat dibedakan dengan orang-orang Makasar, namun secara etnik dan territorial orang-orang Bugis yang bermukim di kota Makasar adalah pendatang. Perantauannya ke hampir seluruh penjuru nusantara, bahkan hingga ke Malaya, Siam, Kamboja, dan lain-lain (Lineton, 1975 : 1, A. Zainal Abidin, 1983 : 63) menunjukkan pentingnya arti kota Makasar sebagai pintu utama untuk berlayar meninggalkan kampung halaman, karena itulah pula tidak mengherankan jika pada tahun 1930, seperempat ($\frac{1}{4}$) bagian penduduk kota Makasar terdiri atas orang Busi, baik sebagai pendatang sementara maupun sebagai pendatang yang sudah menetap di kota Makasar.

Ada beberapa hal yang sangat menarik dari perantauan Bugis ini, ialah terutama karena adanya beberapa pendapat yang mengatakan bahwa faktor adat atau pola-pola sosial, bukanlah alasan utama yang mendorong orang-orang Bugis untuk bermigrasi, tetapi melainkan karena tekanan ekonomi dan peperangan (Naim, 1977: 42). Orang-orang Bugis asal daerah Mallusetasi dan Bone, banyak yang harus bermigrasi karena jumlah sawah yang terdapat di daerah mereka tak dapat lagi mencukupi kebutuhan mereka. Namun demikian tekanan ekonomi dan peperangan bukanlah semata-mata faktor utama yang mendorong untuk bermigrasi, seperti misalnya bagi orang-orang Wajo. Bagi orang Wajo, sekalipun ia memiliki tanah pertanian yang cukup luas di kampungnya, mereka tetap melakukan perantauan atau *sompe*. Hal ini rupanya bersumber dari mitos sosial yang masih hidup dalam diri orang-orang Wajo :

”Iapa muita deceng narekko musalaiwi tana Wajo”

Artinya :

Engkau baru akan melihat kebaikan jika engkau meninggalkan Tanah Wajo. (Zainal Abidin, 1983 : 34).

Di kota Makasar, umumnya orang-orang Bugis yang bergerak dalam bidang usaha/perdagangan adalah orang Wajo. Kampung Wajo di kota Makasar yang sekarang berstatus kecamatan

di Kotamadya Ujung Pandang, dihuni oleh mayoritas pengusaha atau pedagang asal Bugis Wajo. Ini tidak berarti bahwa dari daerah Bugis lainnya tidak terdapat pengusaha atau pedagang, namun dari keseluruhannya orang Wajolah yang terbanyak (Abu Hamid, 1979-1980 : 61).

Di daerah pesisir pantai kota Makasar, terutama di pinggiran pantai Kecamatan Mariso dan Tello, tumbuh perkampungan nelayan yang umumnya dihuni oleh orang-orang Mandar. Menurut sensus tahun 1930, jumlah orang Mandar yang meninggalkan kampungnya atau merantau ke luar daerah, termasuk mereka yang berdiam di kota Makasar mencapai 13.195 orang (Volkstelling 1930, IV : 190-279). Kegiatan utama mereka selain sebagai nelayan ialah sebagai pedagang perantara terutama untuk hasil bumi yang berasal dari kampung mereka sendiri, seperti kelapa, minyak kelapa, kopra, pisang, ikan asin, dan juga hasil industri rumah tangga terutama sarung sutra Mandar yang terkenal itu. Di antara mereka (orang-orang Mandar) yang berkediaman di perkampungan orang-orang Mandar di kampung Baru, Wajo dan Paotere, umumnya mengerjakan barang-barang kerajinan atau industri rumah tangga dengan memproduksi berbagai bahan kebutuhan nelayan, seperti menganyam keranjang ikan yang dibuat dari rotan atau bambu, merajut jala dan jaring, membuat pelampung jaring, menjual jasa terutama dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan penangkapan ikan.

Di samping orang Bugis dan orang Mandar, orang Toraja banyak juga bermigrasi ke kota Makasar. Sumber tertulis mengenai perpindahan orang Toraja ke Makasar sebenarnya masih sangat langka. Dalam sensus penduduk tahun 1930, tercatat hanya sekitar 1000 orang Toraja yang merantau, umumnya bermukim di kota Makasar. Kurun waktu tahun 1906-1920, dapat dianggap sebagai periode pertama perantauan orang Toraja meninggalkan kampung halaman mereka. Dalam periode pertama ini umumnya mereka yang meninggalkan kampung ialah karena mengikuti tentara Belanda (Suratha, 1977 : 22).

Barulah pada tahun 40-an atau sekitar tahun 1946 mereka yang datang ke kota Makasar menuntut ilmu dan juga mencari pekerjaan, terutama sebagai agen polisi, pelayan toko, tukang kayu, pesuruh kantor, kemudian sejak tahun 1950-an mendominasi bidang usaha kecil sebagai tukang sepatu. (Suratha, ibid: 22-23).

Sama halnya dengan orang Toraja, orang-orang Manado, Ambon dan Timor datang ke Makasar juga dibawa oleh tentara Belanda. Kedatangan mereka pada mulanya dikerahkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda sebagai serdadu dan polisi atau sebagai pelayan yang bekerja untuk kepentingan pemerintah kolonial (Naim, op. cit. 42). Pengerahan dan pengangkatan orang-orang Ambon, Manado dan Timor sebagai aparat kolonial dimungkinkan karena adanya persamaan dan persaudaraan dalam agama Nasrani, di samping telah meresapnya budaya Barat di antara sebagian besar orang-orang Ambon, Manado dan Timor. Karena itulah tidak mengherankan jika perantau-perantau Ambon, Manado dan Timor hanya bermukim di kota-kota besar, di Sulawesi Selatan misalnya, mereka umumnya hanya tinggal di kota Makasar. Lokasi pemukimannya terutama di sekitar barak-barak tentara atau polisi. Karena itulah tidak mengherankan jika di awal kemerdekaan Indonesia, banyak di antara suku Ambon, Manado dan Timor menjadi korban kemarahan para pejuang atau penduduk setempat, sebagai contoh:

Pada tanggal 2 Oktober 1945, tentara kolonial mengadakan pembunuhan/penembakan membabituta di sepanjang jalan-jalan kota Makasar, sebagai balasannya masa rakyat dan pemuda-pemuda yang tergabung dalam berbagai kelompok perjuangan yang ketika itu belum terorganisir dengan baik, melakukan pembunuhan balasan atas orang-orang Ambon (orang Maluku) yang dianggap memihak atau dianggap kaki tangan kolonial. Pembunuhan, perampokan yang berlangsung selama 2 x 24 jam, atau sekitar tanggal 3, 4 dan 5 Oktober 1945 ini dikenal dengan "hari-hari hitam yang berdarah" (Saleh La Hade, 1982 : 7).

Untuk menanggulangi kemelut berdarah yang menjurus ke arah konflik antar etnik, terutama antara pribumi dengan suku Ambon, pemerintah kolonial memberi izin khusus kepada orang-orang Ambon atau orang Maluku untuk menempati benteng Ujung Pandang (*Fort Rotterdam*) Di dalam *Fort Rotterdam* lebih kurang 2400 orang Maluku memperoleh perlindungan dan berbagai santunan dari pemerintah kolonial, di antaranya jaminan keamanan, sejumlah kecil makanan, air bersih, penerangan dan juga santunan sebanyak f.100,- per bulan. Keadaan semacam ini berlangsung sampai dengan tahun 1947, kemudian setelah itu secara berangsur-angsur mereka dipindahkan ke berbagai lokasi pemukiman, yang sekarang masih dikenal dengan nama *Ambon Kamp*.

Orang Banjar menempati urutan ke tiga dalam hal merantau sesudah orang Bawean dan Batak, seperti yang terlihat dalam sensus penduduk tahun 1930. Mereka tersebar ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan sampai ke Malaysia. Hal ini disebabkan karena keadaan alam Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang terdiri atas rawa-rawa di delta sungai Barito dan di hilir hulu sungai yang sudah sejak lama tidak mampu lagi memberikan kehidupan yang layak bagi lebih 1½ juta orang Banjar (Naim, 1978 : 43). Di daerah Sulawesi Selatan, khususnya di kota Makasar orang Banjar mendominasi bidang pekerjaan selaku tukang menjahit, industri rumah tangga khususnya usaha pembuatan kopiah atau *songkok*, perdagangan barang perhiasan imitasi, tukang emas, pedagang permata dan batuan.

Orang Jawa dan Madura pun banyak yang merantau ke Sulawesi dan umumnya bermukim di kota Makasar. Seperti halnya dengan orang Ambon (Maluku), orang Manado dan orang Timor, orang Jawa umumnya dibawa oleh tentara Belanda. Banyak di antara mereka sebagai tentara dan polisi Belanda (Pedoman Rakyat, 2 Agustus : 1983).

Mereka yang datang sebagai *heiho* dan *romusa* di zaman pendudukan Jepang umumnya hanya bekerja sebagai buruh

kasar atau Kuli pelabuhan. Sebagai buruh kasar dan kuli pelabuhan, pada mulanya prestasi kerja mereka jauh di bawah normal, mereka umumnya penyakitan dan seperti orang kelaparan. Keadaan ini dapat dimengerti mengingat beratnya pekerjaan mereka di tangan Jepang. Akan tetapi dalam beberapa bulan kemudian setelah mereka ditinggalkan oleh Jepang, mereka dengan sangat cepat menguasai berbagai bidang pekerjaan di kawasan pelabuhan Makasar.

Pekerjaan lain yang banyak dilakukan oleh perantau Jawa di kota Makasar ialah membuka rumah makan atau warung khas masakan Jawa, sedang orang Madura umumnya bekerja sebagai tukang potong rambut (tukang pangkas atau tukang cukur).

Selain suku-suku bangsa tersebut di atas, orang Minangkabau pun termasuk salah satu suku yang mempunyai dorongan kuat untuk merantau, dan terdapat banyak faktor yang telah puladiperkirakan sebagai pendorong, antara lain: teknologi, geografi dan demografi, sosio-kultural, desakan ekonomi, dorongan pendidikan, gangguan keamanan, adanya lembaga sosial merantau dan daya tarik kota (Naim, 1978 : 31).

Orang Minangkabau termasuk orang ulet, gesit dan giat berusaha di rantau. Mereka termasuk orang yang sangat tekun dalam usaha wiraswasta, terutama dalam hal memperbesar modal dan barang dagangnya (ibid: 33-35). Di Sulawesi Selatan, khususnya di kota Makasar, para perantau Minangkabau umumnya bukan pedagang seperti yang digambarkan secara umum tentang perantau Minang di berbagai kota-kota di Indonesia. Perantau Minangkabau di Makasar umumnya adalah "pekerja otak", mubaliq, guru agama, pegawai negeri (khususnya pegawai Kantor Departemen Agama). (Naim, 1979 : 139-143). Berbeda dengan suku-suku bangsa luar Sulawesi lainnya yang datang merantau di Sulawesi Selatan, tradisi perkenalan masyarakat Bugis-Makasar dengan orang-orang Minangkabau sudah melampaui perjalanan sejarah yang cukup panjang. Abdul Makmur, Khatib Tunggal Datuk ri Bandang, mubaliq dan ahli hukum Syariat (Fiqh), adalah seorang Minangkabau yang berjasa meng-

Islamkan orang-orang Makasar sekitar tahun 1607. Sulaiman, Khatib Sulung Datuk Patimang, mubaliq dan ahli Tauhid, adalah seorang Minangkabau yang berjasa meng-Islamkan orang-orang Bugis di daerah Luwu tahun 1603, dan Abdul Jawad Khatib Bungsu Datuk ri Tiro, mubaliq dan ahli tasauf, adalah seorang Minangkabau yang berjasa mengislamkan orang-orang Bugis-Makasar di daerah Bulukumba dan sekitarnya. (Abu Hamid, 1976 : 13-14, Mattulada, 1978 : 38).

Setelah Muhammadiyah masuk ke Sulawesi Selatan tahun 1926 para mubaliq dan guru-guru agama yang kebanyakan di antaranya orang Minangkabau tersebar ke seluruh pelosok daerah. Mereka umumnya tidak kembali lagi ke kampung halamannya karena mereka umumnya sudah terikat hubungan perkawinan dengan penduduk setempat di daerah tugasnya.

2.2 Mobilitas Dalam Birokrasi Dalam Berbagai Lapangan Kerja

Sebelum perang dunia kedua pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah, seperti HIS dan *Schakel School* di Makasar. Selain itu pemerintah Belanda juga mendirikan sekolah-sekolah seperti, MULO (SMP), AMS (SMA), Sekolah Pamong Praja (CIBA dan OSVIA), HIK dan Normal School (Sekolah Guru), semuanya didirikan di kota Makasar. Sekolah-sekolah tersebut di atas dimaksudkan untuk menampung anak-anak para pemuka masyarakat bumi putra dari segenap wilayah Indonesia bagian Timur dan Kalimantan. (Mattulada, 1979 : 450).

Untuk dapat diterima menjadi murid MULO, AMS, OVSIA, HIK *Normaal School* dan CIBA, seseorang harus dapat menunjukkan surat keterangan keturunan atau silsilah yang dapat menjelaskan bahwa ia berasal dari kalangan bangsawan atau *anak-karaeng* atau *anak-arung* yang setia kepada Pemerintah Hindia Belanda atau anak seorang *ambtenar*, ataukah anak seorang bumi putra yang telah turun temurun setia kepada pemerintah Belanda.

Anak-anak bangsawan dan anak-anak *ambtenar* lepasan sekolah-sekolah yang tersebut di atas, kemudian banyak mem-

gang peranan penting dalam bidang pemerintahan di daerah Sulawesi Selatan hingga tahun 1950-an. Dalam struktur pemerintahan kota Makasar sampai tahun 1950-an, orang-orang Makasar masih mendapat kedudukannya sebagai kepala distrik, kepala kampung, imam kampung dan polisi kampung, sedang polisi keamanan kota hampir seluruhnya didominasi oleh orang-orang pendatang (Jawa, Manado, Ambon, Toraja, dan hanya sedikit di antaranya orang Bugis-Makasar).

Pada mulanya orang-orang Bugis-Makasar sangat kurang yang mengisi jabatan-jabatan administrasi atau kepegawaian (Mattulada 1978 : 449-450). Karena itulah maka umumnya jabatan kepegawaian diisi oleh para pendatang Jawa, Manado, Ambon, Cina, Arab, Hindustan dan orang Belanda sebagai kepalanya. (de Klein, 1947: Bijlage. I). Akan tetapi baru kemudian setelah Gubernur Celebes J.L. Coupreur atas nama Pemerintah Belanda merehabilitasi kerajaan Bone, demikian pula dengan Kerajaan Gowa tahun 1930-an, mulailah tampak kegiatannya orang Bugis-Makasar menjadi pegawai administrasi. Pada *Bezetting HPB kantoer Onderafdeeling Makasar* dan di hampir semua kantor distrik dalam wilayahnya, kebanyakan pegawainya adalah orang Bugis-Makasar.

Dalam bidang ekonomi, orang-orang Bugis-Makasar tidak hanya sekedar sebagai pedagang kecil-kecilan yang memadati pasar-pasar yang mulai tumbuh di berbagai kota, tetapi juga sejak akhir tahun 1930-an atau awal tahun 1940-an, telah berdiri organisasi-organisasi/perkumpulan dagang yang dipelopori oleh orang-orang Bugis-Makasar sendiri, antara lain:

1. *Vereeniging van Indonesische Importeurs*, di bawah pimpinan Moh. Arsyad (penasehat: Andi Mattonrokang)
2. Pusat perdagangan pedagang Indonesia (PPI), di bawah pimpinan Andi Mattonrokang
3. Gabungan pedagang-pedagang Indonesia (GAPPI), di bawah pimpinan H. Mansyur Dg. Tompo

4. Persatuan Nelayan Indonesia (Perni), di bawah pimpinan Andi Mattonrokang
5. Rupelin (Organisasi Nelayan) di bawah pimpinan Hamzah Daeng Nangka
6. MKSS (Maskapai Kapal Selebes Selatan, di bawah direksi Arsyad dan Waki

Selain organisasi-organisasi dagang di atas, telah berdiri pula berbagai Perseroan Terbatas (*Naamlooze Venootschap*) yang secara langsung berada di tangan pimpinan orang Indonesia sendiri. Dalam dunia usaha percetakan dan berbagai kegiatan dalam bidang pers lainnya, orang Manado, Ambon, Bugis-Makassar bergabung dalam satu usaha mendirikan perusahaan surat kabar yang diberi nama *Pedoman Rakyat*. Terbitan pertama dimulai pada tanggal 1 Maret 1947. Dari usaha inilah kemudian berkembang lagi beberapa usaha sejenis, dan merupakan cikal bakal usaha pers di kota Makasar.

Berbeda dengan orang Makasar yang umumnya banyak terikat dalam penanaman modal bersama yang diwujudkan dalam bentuk PT atau Maskapai yang dikelola bersama, orang-orang Bugis lebih banyak bergerak secara individu dalam mengelola sebuah usaha. Jika dibutuhkan beberapa orang pembantu untuk menjalankan berbagai kegiatan usaha, kebanyakan di antara mereka yang diangkat itu dalam anggota keluarga terdekat. Karena itu jaringan usaha orang Bugis, sering kali dapat disamakan dengan jaringan kerja atau *network* sebuah keluarga besar. Dalam dunia usaha orang-orang Bugis sering kali menjadikan kota Makasar sebagai batu loncatan pertama sebelum membuka usaha di berbagai kota di Kalimantan, Nusatenggara Barat dan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya. Karena itulah tidak mengherankan jika orang-orang Wajo khususnya yang bergerak dalam usaha dagang sering disebut "Cina Bugis".

Dominasi pedagang-pedagang Bugis-Makasar dalam perdagangan hasil bumi tampaknya masih sangat sulit bergeser ke

tangan kelompok etnik lain. Hal ini disebabkan karena jaringan usaha itu, umumnya mengikuti jalur kekerabatan. Akan tetapi dalam bidang perdagangan umum di luar hasil bumi, dominasi orang Bugis rupanya sulit untuk bertahan. Situasi perekonomian yang kian memburuk secara nasional menjelang akhir tahun 1950-an, sementara organisasi perniagaan sudah memasuki tingkat yang lebih modern, merupakan tantangan berat bagi usahawan Bugis-Makasar yang umumnya masih memutar modalnya dalam gerak spekulasi yang sangat tergantung pada situasi yang untung-untungan. Dengan demikian tidak mengherankan jika selepas tahun 1950-an sektor perdagangan di luar hasil bumi jatuh ke tangan orang Cina. Keadaan inilah yang berlanjut dan membentuk wajah dunia usaha di kota "Makasar" atau Ujung Pandang sekarang (Mattulada, 1979 : 473).

BAB IV PERKEMBANGAN PENDIDIKAN

1. Masa pemerintahan Hindia Belanda (1900–1942)

Suatu perjanjian antara raja Gowa dengan pihak pemerintah kolonial Belanda memaksa raja Makasar itu memberikan lagi hak-hak yang lebih banyak terhadap Belanda. Perjanjian itu ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 1894. Ditegaskan dalam perjanjian itu bahwa Kerajaan Gowa harus mengibarkan bendera Belanda satu-satunya pada setiap kapal atau perahu Gowa. Di samping itu pula, raja Gowa diwajibkan memajukan pendidikan, yang oleh pihak Belanda disebutnya *Volksonderwijs*.¹⁾

Volksonderwijs atau pendidikan rakyat yang dimaksud Pemerintahan Kolonial Belanda ialah pendidikan formal, dalam bentuk sekolah dengan daftar pelajaran tetap dan teratur. Di kalangan masyarakat dalam Kerajaan Gowa, telah lama adanya semacam pendidikan, yang kini disebut pendidikan non formal, utamanya yang diasuh oleh pejabat Kerajaan *Tu Kajannang Bura'ne* (Makasar: Jawatan Kepemudaan). Pemuda-pemuda Gowa dididik memanah, menunggang kuda, menjerat rusa liar dan lain-lain ketangkasan.

1) Abdul Razak Daeng Patunru, *Sejarah Gowa*, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, Makasar, 1969, hal. 102.

Usaha pemerintah kolonial membuka sekolah rakyat di Gowa, termasuk Makasar, dipelopori oleh Van der Capellen, yang memaksa Gowa menandatangani perjanjian. Pada pihak Gowa, ketika itu yang menjadi raja ialah Sultan Muhammad Idris. Ia menggantikan ayahnya, Sultan Abdul Kadir Muhammad Aidid (memerintah antara tahun 1844–1893).

Sebelum adanya ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah kolonial Belanda tentang pendidikan rakyat, seorang pendeta atau penginjil bernama Benjamin Frederik Matthes telah membuka sebuah sekolah. Ia tiba di Makasar bersama dua orang kawannya, masing-masing L W Schmidt dan H W Bosman. H W Bosman yang dipanggil Benjamin Frederik Matthes adalah seorang pendidik atau guru.

Kedatangan B F Matthes ke Makasar adalah untuk menyebarkan ajaran Kristen. Untuk memperlancar kegiatannya, ia berusaha mengadakan pendekatan dengan masyarakat setempat. Mula-mula yang hendak dilakukannya ialah membuka lembaga pendidikan. Sambil giat dalam bidang pendidikan, B F Matthes berkehendak mempelajari tradisi dan latar belakang sosial budaya suku Makasar dan Bugis. Pada tahun 1875, ketiganya mendarat di Makasar. Setahun kemudian, yakni pada tahun 1876 ketiga orang berteman itu membuka sekolah guru bernama *Kweeksschool*. *Kweeksschool* disebut masyarakat Makasar dengan nama *Sikola Rajaya* (sekolah kaum bangsawan).²⁾

Masa-masa pertama B F Matthes mendirikan sekolah bi-naannya itu (*Kweeksschool*) kurang mendapat perhatian dari pemerintah kolonial Belanda. Sebab yang sesungguhnya tidak jelas, mengapa pemerintah tidak senang terhadap usaha B.F. Matthes mencerdaskan rakyat di kota Makasar. Sangat boleh jadi, karena B F Matthes adalah seorang penginjil, bukan pedagang atau pendidik. Lagi pula, ketika itu Belanda merasa belum

2) Ds. H. Van den Brink, *Dr. Benjamin Frederik Matthes, Zijn leven en den Arbeid in Dienst van Het Nederlandsche Bijbelgenootschap*, Amsterdam, 1942, hal. 105-119.

kokoh cengkeraman kekuasaannya terhadap Gowa, dan kerajaan-kerajaan lainnya di Sulawesi Selatan. Perjanjian tertanggal 23 Agustus 1852 antara pemerintah Hindia Belanda dengan para raja-raja di Sulawesi Selatan belum menjamin kokohnya kekuasaan Belanda. Tambahan pula, raja Bone tidak menyenangi isi perjanjian itu, berhubung ada fasal yang seakan-akan khusus ditujukan terhadap Kerajaan Bone.

Lembaga pendidikan yang dibuka B F Matthes (1876) khusus mencetak kader guru. Karena belum adanya sekolah yang dibuka sebelumnya, maka amatlah sulit mendapat murid. Para keluarga raja dan atau kerabat raja yang pernah mendapat pendidikan privat di rumah masing-masing memasuki sekolah *Kweeksschool*. Itulah sebabnya, masyarakat umum memberi julukan Sikola Rajaya (artinya sekolah raja).

Pada tahun 1880, empat tahun setelah dibuka, pemerintah Hindia Belanda mengambil alih pengelolaan sekolah itu (*Kweeksschool*). Benjamin Frederik Matthes ditetapkan sebagai Direktur.³⁾

Walaupun pada mulanya pemerintah kolonial Belanda kurang menyetujui dibukanya *Kweeksschool*, karena menunjukkan manfaat yang nyata, sekolah tersebut diambil alih pemerintah. Jasa B F Matthes dalam mencerdaskan rakyat Makasar, umumnya Sulawesi Selatan tidak bisa dimungkiri. Penegasan tentang peranan penting B F Matthes yang mula-mula memperkenalkan pendidikan formal di kalangan masyarakat Makasar dan Bugis, nampak pada kutipan Ds. van den Brink. Ia mengutip ucapan Daeng Manassa, guru bantu B F Matthes khusus mata pelajaran Bahasa Daerah, yang menyatakan: ". . . karaeng ku ji napasabaki na niya sikola raja ri jumpandang. . . ." (Makasar: Adalah yang menyebabkan adanya sekolah raja di Jumpandang atau Makasar). Pernyataan itu ditulis dalam bahasa daerah

3) Drs. Harun Kadir, et. al. *Sejarah Daerah Sul. Sel. Proyek Inventarisasi Kebudayaan Daerah, 1976-1977*, hal. 104.

Makasar dan dalam huruf lontarak, ditujukan terhadap Benjamin Frederik Matthes.⁴⁾

Untuk membina Kweeksschool, Benjamin Frederik Matthes dibantu oleh L W Schmidt. Guru-guru yang ada selain kedua yang tersebut terdahulu itu, masing-masing H W Bosman (guru ilmu mendidik), La Mangewa dan Daeng Manassa (guru bahasa daerah). Merekalah berlima yang bekerja keras untuk menyediakan guru guna melanjutkan usaha mencerdaskan masyarakat yang berdiam di Makasar ketika itu. Sebagian anggota masyarakat telah menikmati.

Pengadaan sekolah guru *Kweeksschool* di kota Makasar memberi harapan baru bagi masyarakat. Memasuki sekolah tersebut memang sulit, akan tetapi setelah bisa diterima, terasa manfaatnya memang tinggi. Murid-murid yang tertampung amat sedikit, sekitar 20 orang. Dengan murid-murid yang cukup sedikit itu dibebani harapan guna pembinaan masyarakat sekitarnya. Mereka akan menjadi perintis kemajuan. Tanggapan positif itu nampak dalam surat pernyataan Daeng Manassa, bahwa pendidikan binaan B F Matthes bagai *tu wangnginunga te'ne bani* (Makasar, orang yang minum manisan lebah atau madu).

Pujian-pujian Daeng Manassa di atas dapat dinilai mewakili perasaan anggota masyarakat kota Makasar. Ia menulis pernyataan itu tanggal 12 Agustus 1879, tiga tahun setelah lembaga pendidikan Kweeksschool dibuka oleh B F Matthes. Setahun setelah menerima pujian guru bantunya, Benjamin Frederik Matthes berangkat ke Nederland (1880). Ia memboyong sejumlah naskah kuno bertuliskan Lontarak ke negerinya guna dipelajari. Di negeri Belanda, ia dianugerahi titel doktor dalam 'Litteratum Indicarum Doctor Honoris causa' pada tanggal 28 Januari 1881.⁵⁾

4) Ds. Van den Brink, *loc.cit.*

5) *Ibid.* hal. 112.

Manfaat lembaga pendidikan untuk kemajuan masyarakat sekitar kota Makasar pada mulanya belum terlihat oleh penguasa kolonial. Pada hal, upaya membuka sekolah di daerah jajahan sudah dapat dimulai. Pemerintah Kerajaan Belanda berdasarkan *Koninklijk Besluit* tahun 1848 berketetapan hati hendak memajukan pendidikan bagi penduduk setempat. Bahwa untuk pembinaan pendidikan bumi putera, disediakan dana keuangan sebanyak f.25.000,- (duapuluh lima ribu gulden, wang Belanda). Ketetapan itulah yang mendorong B F Matthes membuka *Kweekschool* di Makasar (1876), akan tetapi kurang mendapat tanggapan positif dari penguasa setempat ketika itu. Telah dirumuskan pula pokok mata pelajaran yang akan diberikan dalam sekolah bagi bumi putera, yakni: (1) pelajaran membaca, (2) menulis, (3) berhitung, (4) menggambar, (5) bahasa daerah.⁶⁾

Mata pelajaran yang telah ditetapkan pemerintah Kerajaan Belanda dapat memberikan kecakapan dasar masyarakat setempat. Bagi bumiputra,¹ kecakapan dasar itu menjadi sumber kemajuan selangkah. Di balik itu, kepentingan pemerintah kolonial nampak pula. Penduduk setempat yang memiliki kecakapan dasar itu dapat dipergunakan tenaganya untuk memperlancar pemerintahan kolonial. Niscaya tenaga administrasi asal bumi putera akan bisa menerima upah relatif rendah dibanding tenaga Belanda totok.

Koninklijk Besluit tahun 1848 dari pemerintah Kerajaan Belanda merupakan upaya pemberantasan buta huruf di daerah jajahan. Pemerintah kolonial memperoleh kesulitan dalam mengatur administrasi pemerintahannya. berhubung penduduk bumi putera masih buta huruf. Kekurangan tenaga administrasi dari kalangan bangsa Belanda tidak bisa tertanggulangi bila kepada penduduk bumi putera tidak diberikan pendidikan model Barat(Eropa).

6) Imam Bernadib, *Sejarah Pendidikan di Indonesia*, Penerbitan FIP-IKIP Yogyakarta, 1977 hal. 25.

Pemerintah kolonial mencap penduduk bumiputra sebagai buta huruf, sesungguhnya tidak seluruhnya benar. Penduduk Makasar dan atau suku Makasar dan Bugis sejak pertengahan abad ke-16 mempunyai huruf tersendiri. Sejak Pelabuhan (bandar) Makasar ramai dengan lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional, syahbandar (Makasar) sabannara') yang bernama Daeng Pamatte merumuskan huruf Lontarak yang dikenal itu. Adanya huruf khas daerah Makasar dan Bugis itu memperlancar kehidupan sosial. Bukan saja untuk kepentingan tulis menulis kegiatan perdagangan, melainkan juga guna kodifikasi hukum-hukum yang terdapat di dalam masyarakat Makasar dan Bugis. Adanya naskah kuno itulah yang menarik perhatian Benjamin Frederik Matthes hingga ia mendarat di Makasar tahun 1875. Dengan demikian, tidak benar jika terhadap penduduk suku Makasar dan Bugis dicap sebagai buta huruf.

Penduduk kota Makasar sebelum Belanda menguasai Benteng Ujung Pandang (kemudian diroboh namanya menjadi *Fort d Koch*) telah menggunakan dalam berkomunikasi dua macam huruf, yakni huruf lontarak dan *huruf serang*. Huruf jenis kedua itu adalah huruf Arab yang sumber asalnya dari Maluku, pulau Seram. Sejumlah naskah daerah Makassar dan Bugis ditulis pula dalam huruf serang, terutama yang berhubungan dengan agama Islam. Batu nisan umumnya ditulis dalam huruf serang.⁷⁾

Huruf-huruf lontarak yang lazim dipergunakan suku Makassar dan Bugis; seperti yang terlihat di bawah ini:

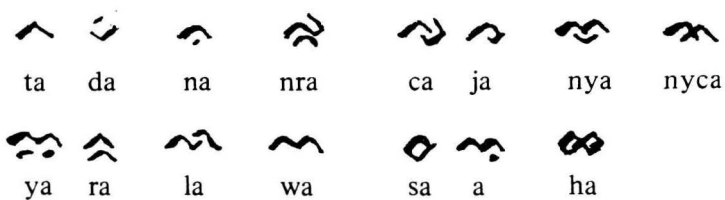
Huruf Lontarak⁸⁾

(bentuk dan bunyi)

							
ka	ga	nga	ngka	pa	ba	ma	mpa

7) Dapat diperbandingkan dengan penamaan *huruf Jawi* terhadap huruf sejenis (huruf Arab) di Sumatera Utara dan Aceh.

8) Ds.van den Brink, *op.cit.*, hal. 36.



Tanda bunyi :

- i ; misalnya *ki* ditulis :
- u ; misalnya *gu* ditulis :
- e ; misalnya *nge* ditulis :
- o ; misalnya *po* ditulis :
- e ; misalnya *be* ditulis :

Menilik adanya huruf lontarak itu menunjukkan bahwa penduduk kota Makasar, umumnya suku Makasar dan Bugis bukanlah sebagaimana anggapan pemerintah kolonial Belanda. Justru merekalah yang buta huruf dipandang dari segi suku Makasar dan Bugis dengan hurufnya itu. Hukum, tradisi, dan sejarah (Bugis: *Attoriolong*) sudah ada ditulis dalam huruf Makasar dan Bugis atau huruf lontarak.⁹⁾ Keadaan ini merupakan suatu ironi sejarah, dimana diperlakukan lagi penilaian sepihak. Karena Belanda menggunakan huruf Latein, maka penduduk yang tidak menggunakan huruf itu dicap buta huruf.

1.1 Munculnya pendidikan formal

Kweeksschool yang didirikan Benjamin Frederik Matthes (*1876) untuk pertama kalinya menamatkan murid pada tahun 1880. Melihat hasil itu, pemerintah kolonial mengambil alih

9) drs. Harun Kadir, et.al., *loc.cit.*

sekolah binaan Matthes. Ia sendiri diangkat menjadi direktornya. Tidak lama menjabat sebagai Direktur *Kweeksschool*, B.F. Matthes berangkat ke Nederland memboyong naskah-naskah kuno bertuliskan huruf lontarak.

Pengambilalihan sekolah *Kweeksschool* oleh pemerintah kolonial (1880), merupakan awal adanya pendidikan formal di Makasar, Sulawesi Selatan pada umumnya.⁹⁾ Dengan demikian penduduk kota akan terbuka kesempatan menerima pendidikan model Barat (Eropah). Selama itu, sebelum adanya pendidikan asuhan pemerintah kolonial, suku Makasar dan Bugis hanya mendapat pendidikan non formal dan informal dari guru-guru mengaji (Bugis: *puang anre guru*), dari pendekar silat (Bugis: *pandegarak*), atau bagi anak-anak istana dari *guru nandi* (Bugis, berasal dari *gurunna andi*, artinya guru anak raja dan para bangsawan).

Usaha pemerintah kolonial memajukan sekolah atau lembaga pendidikan formal mendorong van der Capellen menyisipkan dalam perjanjian perdamaian dengan raja Gowa, Sultan Muhammad Idris soal-soal pendidikan. Raja Gowa, seperti telah disebut di halaman depan, diharuskan memajukan *volksonderwijs* atau pendidikan umum/rakyat. Perjanjian itu dibuat 1894, lihat halaman depan tentang hal yang sama, 14 tahun setelah pengambilan *Kweeksschool* di bawah pengolahan pemerintah kolonial Belanda.

Keterlibatan raja Gowa memajukan pendidikan yang dikehendaki Belanda, menjadi pertanda bolehnya penduduk anggota masyarakat Makasar memasuki lembaga pendidikan itu.¹⁰⁾ Anak-anak suku Makasar dan Bugis tidak terhalang lagi memperoleh pendidikan model Barat, berarti akan terjadi pemindahan nilai-nilai kultural. Bagi suku Makasar dan Bugis, ketaatan pada raja merupakan hal yang mutlak.

Adanya tamatan *Kweeksschool* tahun 1880 mendorong pemerintah kolonial membuka sejumlah sekolah dasar di Sula-

10) Abdul Razak Daeng Patunru, *op.cit.* hal. 105-113.

wesi Selatan, utamanya kota Makasar. Penduduk kota bila memiliki kecakapan minimal, dapat membaca, menulis dan berhitung serta keterampilan menggambar, dapat diterima menjadi pegawai pemerintah, dan jawatan-jawatan swasta. Untuk menutupi kekurangan guru, pemerintah terpaksa mendatangkan tenaga pengajar dari Minahasa (Manado), Maluku (Ambon), dan Timor.¹¹⁾ Munculnya guru-guru dari luar daerah Sulawesi Selatan sedikit menimbulkan purbasangka penduduk setempat. Mereka memandang suku Manado, Ambon, dan Timor sebagai suku yang asing. Di samping perbedaan warna kulit, perbedaan bahasa, juga karena perbedaan agama.

Pendidikan guru yang dapat menciptakan tenaga pengajar asal suku Makasar sudah dilakukan oleh *Kweeksschool* di mana di dalamnya mengajar dua suku Bugis/Makasar, masing-masing La Mangewa dan Daeng Manassa, Akan tetapi, keduanya hanyalah mengajar bahasa daerah, sambil membantu Benjamin Frederik Matthes mengumpulkan dan mengkaji naskah kuno bertuliskan lontarak.

Dari Makasar, kota pusat pemerintahan kolonial Belanda, dilakukan penyebaran pendidikan formal ke luar kota, misalnya ke Maros, Gowa, Pare-pare, Luwu, Bonthain, Bone dan lain-lain. Hingga tahun 1905, pendidikan formal asuhan pemerintah kolonial Belanda muncul pada beberapa desa utama.

1.2 Perkembangan sekolah-sekolah asuhan pemerintah

Sejak sekolah guru (*Kweeksschool*) di Makasar menamatkan murid, mulailah tersedia tenaga guru yang kelak akan mengajar pada sekolah-sekolah. Di samping itu, guru-guru didatangkan pula dari luar daerah Sulawesi Selatan, seperti dari Manado, Ambon dan lain-lain. Dengan demikian, pemerintah Hindia Belanda agak lega membuka sekolah-sekolah, bukan hanya di dalam kota Makasar, melainkan juga penduduk pinggiran kota, seperti di Maros, Sungguminasa (Gowa), dan lain-lain. Maros dan Sungguminasa, dua kota kecil yang penduduknya umumnya

11) Drs. Harun Kadir, et.al. *loc.cit.*

mempunyai kaitan kehidupan perekonomian dengan kota Makasar. Jarak Maros dengan *Fort Rotterdam* ada 30 KM saja dengan sarana perhubungan yang lancar. Lebih dekat lagi kota kecil Sungguminasa, yang hanya 20 KM dari Fort Rotterdam.

Upaya membuka sekolah-sekolah agak terganggu ketika pecah perang dengan kerajaan-kerajaan lokal di daerah Sulawesi Selatan. Peperangan berlangsung antara 1905–1906. Kerajaan yang mula-mula diserang ialah Bone, atas instruksi dari Batavia. Pada bulan Juni 1905, kerajaan yang dianggap terkuat di Sulawesi Selatan itu, diserang oleh pasukan pemerintah kolonial Belanda. Raja Bone bersama pasukannya terdesak, terutama karena adanya seorang penghianat yang bernama Daeng Paroto memihak Belanda. Melalui pertempuran demi pertempuran, Bone akhirnya menyerah bulan Nopember 1905.^{1 2)}

Menjelang peperangan, pada tahun 1904, sebuah sekolah dasar untuk rakyat umum dibuka terletak di distrik Ujung Tanah, tepatnya di *Butung Weg* (Kini: Jalan Butung). Status sekolah yang pertama kali dibuka untuk menampung penduduk kalangan masyarakat biasa itu, ialah: *Tweedeschool* (sekolah kelas kedua). Kelas kedua dimaksudkan adanya sekolah yang lebih tinggi mutunya, diperuntukkan bagi anak-anak Indo Belanda dan anak-anak bangsawan. Dalam tahun itu juga (1904) dibuka sekolah jenis yang sama di pinggiran Selatan lapangan Karebosi (kini Jalan Amanagappa). Akan tetapi, sekolah yang baru dibuka ini, pada tahun 1905, diubah menjadi *Inlandscheschool*. Penduduk kota Makasar menyebut sekolah itu Sekolah Melayu. Bahasa pengantar yang dipergunakan pada sekolah itu ialah bahasa Melayu, yang bagi suku Makasar dan Bugis merupakan bahasa agak asing.

Peperangan untuk menundukkan Gowa dimulai dengan terjadinya pertempuran di Laking, 10 km. sebelah selatan *Fort Rotterdam*. Pertempuran di Laking itu terjadi tanggal 20 Okto-

12) Abdul Razak Daeng Patunru, *op.cit.* hal. 117-118.

ber 1905.¹³⁾ Pasukan Gowa dapat mengimbangi kekuatan Belanda, sehingga pasukan Belanda terpaksa diberi tambahan pasukan segera. Akibatnya, raja Gowa terpaksa menghindari dari sergapan Belanda, dengan menyingkir ke arah utara, daerah Sidenreng. Jarak Sidenreng dengan Lakiung ada sekitar 200 km. Yang menjadi raja di sana adalah keluarga raja Gowa juga.

Selama dua bulan penduduk Gowa terlibat perang bersama raja mereka melawan pasukan pemerintah kolonial Belanda. Pada tanggal 25 Desember 1905, suatu pertempuran yang tidak seimbang di daerah Sidenreng, menyebabkan raja Gowa tewas. Ia terjatuh ke dalam jurang karena meloloskan diri dari sergapan Belanda. Sang Raja diberi penghormatan oleh rakyat Gowa dan suku Makasar, dengan julukan/gelar *Tu Menanga ri bundu'na* (Makasar). Yang tewas dalam pertempuran). Dengan demikian, Belanda leluasa melakukan kehendaknya. Ia memaksa pejabat kerajaan Gowa, orang kedua setelah raja: *Tumailalang Towa* (semacam mangkubumi), menandatangani perjanjian pendek¹⁴⁾

Keadaan pulih dan menjadi aman kembali dalam kota Makasar pada tahun 1906. Hanya di pedalaman Sulawesi Selatan masih terjadi sejumlah pertempuran-pertempuran.

Sementara masih adanya pertempuran di pedalaman, di Makasar dibuka sebuah sekolah untuk anak-anak suku Ambon. Nama sekolah itu ialah *Hollands Ambonsche School*, pada tahun 1906. Pada tahun berikutnya, 1907 di kampung Tabaringan dibuka lagi sebuah sekolah *Holland Ambonsche School* (HAS). Penduduk Makasar suku Makasar dan Bugis menyebut sekolah tersebut: *sikola ambong*. Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap suku Ambon yang di samping tersedianya guru dari Maluku, sejumlah pasukan Belanda terdiri dari orang-orang berasal dari Maluku. Tindakan pemerintah kolonial itu mengundang purba sangka penduduk dari kalangan suku Makasar dan

13) Abdul Razak Daeng Patunru, op.cit. hal. 121-122.

14) *Ibid.* hal. 122.

Bugis. Jumlah sekolah untuk menampung anak-anak suku Makasar dan Bugis 2 (dua) buah: sama banyaknya yang dibuka untuk menampung anak-anak suku Ambon. Belum lagi fasilitas sekolah, yang niscaya agak membaik bagi anak-anak dari anggota pasukan yang telah bersedia korban di medan pertempuran di pihak Belanda melawan bumi putera.

Perkampungan Tabaringan, di mana *Holland Ambonsche School* (HAS) dibuka merupakan tempat konsentrasi suku Ambon. Prasangka ras dan kesukuan berkembang sekitar tempat itu.

Bagi anak-anak Tionghoa (Cina) disediakan pula sebuah sekolah. Pada tahun 1907, pemerintah membuka Chinese School, atau lengkapnya *Holland Chinese School* (HCS). Para keturunan Cina atau Tionghoa mendapat agak lebih baik di mata orang Belanda, dibandingkan suku Makasar dan Bugis. Mereka kurang memperhatikan soal-soal yang biasa memusingkan penguasa. Yang diutamakan, bagaimana mencari hidup, terutama dengan berdagang, pertukangan, dan lain-lain. Kelompok masyarakat keturunan Cina bergerak di bidang perdagangan di kota Makasar, sejak ratusan tahun yang silam.¹⁵) Maka, terhadap kelompok Tionghoa, suku Makasar dan Bugis memandangnya agak sama dengan terhadap suku Ambon.

Lembaga pendidikan formal asuhan pemerintah kolonial Belanda hingga tahun 1907, di kota Makasar, terdapat:

- (1) *Kweeksschool*, sekolah guru sebanyak. 1 buah
- (2) Sekolah Rakyat *Tweede classe* sebanyak. 1 buah
- (3) Sekolah Rakyat/*Melayu Inlandscheschool* sebanyak 1 buah
- (4) *Holland Ambonsche School* (HAS) sebanyak 2 buah
- (5) *Holland Chinese School* (HCS) sebanyak. 1 buah

Melihat jenis dan jumlah sekolah-sekolah itu nampak adanya kepincangan sosial.

15) Drs. Mardanas Safwan, et.al. (ed) *op.cit.* hal. 55.

Kurangnya lembaga pendidikan formal untuk anak-anak suku Makasar dan Bugis, penduduk terbesar jumlahnya dalam kota Makasar ketika itu (juga hingga sekarang), disebabkan belum tertariknya para orang tua menyekolahkan anaknya. Anggapan, bahwa memasuki sekolah asuhan Belanda, kelak akan dijadikan alat atau tentera Belanda, atau bahkan akan dibawa ke negeri Belanda. Waktu itu, dibawa ke negeri Belanda dianggap suatu "musibah", tidak seperti penilaian sekarang. Pengaruh pemuka agama Islam yang fanatik, dengan menggunakan sentimen keagamaan, ikut mendorong penduduk kota yang beragama Islam membenci sekolah asuhan Belanda.¹⁶⁾

Diskriminasi yang diperlakukan terhadap anak-anak penduduk kota Makasar nampak juga pada bahasa pengantar di tiap-tiap sekolah. Untuk anak-anak suku Ambon dan kelompok keturunan Cina dipergunakan bahasa pengantar dalam bahasa Belanda, sedang pada anak-anak asal suku Makasar dan Bugis adalah bahasa Melayu dan bahasa daerah. Lama pendidikan pada *Inlandscheschool* adalah 5 tahun sedangkan pada *Holland Ambonscheschool* dan *Chinese School* selama 7 tahun. Keadaan agak membaik setelah didirikan pula *Holland Inlandsche School* untuk menampung anak-anak suku Makasar dan Bugis, walau dalam batas-batas yang ketat.

Adanya tamatan anak-anak penduduk asli dari sekolah masing-masing secara perlahan-lahan merubah sikap penduduk. Mereka yang sudah tamat membaaur dengan masyarakat lingkungannya, dan membiaskan pandangan mereka terhadap manfaat sekolah. Penduduk kota pun lama kelamaan tertarik pada sekolah asuhan pemerintah. Pada tahun 1910, *Inlandscheschool* menjadi 3 (tiga) buah, sedang *Volksschool* menjadi 5 (lima) buah dalam kota Makasar.¹⁷⁾

16) Pandangan demikian tetap berlangsung hingga pemerintahan NIT (1946-1949) *Wawancara* dengan Drs. Remba Kasim, 65 tahun, bekas tokoh pergerakan (Sarikat Islam) tanggal 5-9-1983 di Makasar (Ujung Pandang).

17) Drs. Mardanas Safwan, et.al. (ed), *loc cit.*

Jumlah *drop out* pada setiap sekolah rakyat cukup banyak. Sebabnya: (1) Mereka yang masuk sekolah rata-rata usia 10 tahun, (2) Belum tammam, tenaga anak-anak dipergunakan orang tuanya untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas di rumah tangga masing-masing. Misalnya, membajak sawah, ikut ke laut menangkap ikan sebagai nelayan, wanita-wanita membantu ibu mereka di rumah menumbuk padi, memasak, dan lain-lain. (3) Terutama murid-murid wanita, belum tammam sudah dikawinkan orang tua mereka. Biasanya, dalam usia belasan tahun, lamaran terhadap anak wanita segera diterima. Kebanyakan mereka kawin antar kerabat sepupu, dan diatur oleh orang tua masing-masing.

Para orang tua yang lebih cepat menyadari betapa perlunya pendidikan bagi anak-anak mereka, ialah pegawai pemerintah kolonial, para pedagang, keluarga bangsawan, dan yang mempunyai pendapatan agak membaik.

Kesempatan anak negeri suku Makasar dan Bugis memasuki sekolah yang menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, terbuka ketika pemerintah meresmikan berdirinya *Holand Inlandsche School* (HIS) pada tahun 1911. Mutu serta derajat sekolah itu disamakan dengan HAS dan HCS yang telah dibuka lebih dahulu (sekitar tahun 1906). Penduduk kota Makasar menyambut baik pembukaan HIS itu. Akan tetapi, adanya persyaratan-persyaratan yang ketat, menyebabkan tidak ada kebebasan menjadi murid pada sekolah tersebut. Gedung HIS yang pertama terletak di sekitar Jalan Sungai Tangka (sekarang), satu KM sebelah selatan *Fort Rotterdam*.¹⁸⁾

Anggota masyarakat yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan gembira membawa anaknya ke sekolah HIS persyaratan uang sekolah yang relatif tinggi, menjadi penghalang lapisan ma-

18) Fort Rotterdam menjadi pusat kota Makasar, pusat pemerintahan kolonial Belanda sampai masuknya Jepang tahun 1942. Jalur-jalur jalan utama di kota Makasar, semuanya menuju arah Fort Rotterdam (kini nama: Benteng Ujung Pandang).

syarakat berpenghasilan rendah memasukkan anaknya. Lagi pula, ada kaitannya dengan hubungan baik sang orang tua murid dengan pemerintah setempat, apakah ia anggota pejabat kerajaan, pegawai penting pada kantor pemerintahan, atau pedagang yang mempunyai ikatan baik dengan aparat pemerintahan setempat.¹⁹⁾

Sulitnya anak-anak dari lapisan masyarakat biasa, yang umumnya berpenghasilan relatif rendah, memasuki HIS, menimbulkan pemisahan di kalangan bumiputra. Tamatan HIS menjadi orang terpendang, atau dihargai, dalam masyarakat melebihi tamatan sekedar lulusan VS, VVS, atau *Inlandsche School* (Sekolah Melayu). Tamatan ketiga jenis sekolah tersebut terakhir itupun masih amat langka. Mereka juga mendapat penghargaan tersendiri, terutama dari mereka yang belum pernah menginjak bangku sekolah.

Pada HIS terdapat guru orang Belanda totok, atau orang Menado, atau Ambon yang amat fasih berbahasa Belanda. Penguasaan bahasa Belanda seakan-akan memisahkan mereka dari bumi putera lainnya, dan menjadi "kebelanda-belandaan". Dalam percakapan sehari-hari, apabila seseorang dapat menyelipkan sejumlah kata-kata dari bahasa Belanda, dinilai menduduki tempat terpendang. Maka, kesempatan memasuki sekolah HIS, menyebabkan seseorang bisa merubah statusnya dalam pandangan sosial sekitarnya.

Pembukaan HIS tidak hanya terdapat di kota Makasar, melainkan juga di kota-kota kecil tempat "zelfbestuur" berdiam, seperti di Pare-pare, Palopo, Watampone, dan Bulukumba. Antara tahun 1912-1920, HIS yang dibuka pemerintah kolonial Belanda di Sulawesi Selatan guna menampung calon murid-murid yang memenuhi syarat; sebagai berikut:

Tempat HIS	Asal daerah yang akan menyediakan calon murid-murid.
------------	--

19) Wawancara dengan Drs. Remba Kasim, 65 tahun sesuai pula dengan keterangan Malajong Daeng Liwang kepada penulis semasa hidupnya (meringgal 1981).

Kota Makasar	Kota Makasar, Maros, Gowa, Takalar, Jene- ponto, Pangkajene, dan Segeri.
Bulukumba	Bulukumba, Bonthain, Sinjai, dan Selayar.
Watampone	Bone, Wajo, dan Soppeng.
Pare-pare	Pare-pare, Barru, Pinrang, Rappang, Siden- reng, Enrekang, dan Tana Toraja.
Palopo ²⁰⁾	Palopo, Masamba, Malili, dan Kolaka.

Sebagaimana persyaratan yang berlaku di Makasar, begitu pula di kota-kota kecil lainnya di luar kota utama Sulawesi itu. Kecuali yang di Makasar, HIS di kota-kota kecil lainnya kurang yang mencapai jumlah murid maksimum. Diharapkan, dengan dibukanya sejumlah HIS pemerintah dapat mengadakan sekolah yang menjadi kelanjutan kelak. Pada tahun 1920, di Makasar dibuka sekolah yang menampung tamatan HIS yakni MULO (*Middelbaare Uitgebruik Lagere Onderwijs*). Sekolah baru dan tergolong tertinggi statusnya ketika itu, langsung diawasi oleh Asisten Residen. Murid-murid tamatan *Inlandsche School* dan *Vervolgschool* (VVS) dengan angka istimewa, dapat masuk MULO, melalui jenjang *voorklas* (Kelas persiapan). Kelas persiapan terutama guna memperlancar bahasa Belanda.²¹⁾

Hingga perang Dunia ke II (1942), hanya terdapat satu buah sekolah MULO di Makasar, Sulawesi Selatan pada umumnya. Murid-murid MULO benar-benar akan mahir berbahasa Belanda. Syarat-syarat memasuki sekolah itu lebih berat lagi. Staf pengajarannya umumnya orang Belanda, yang didatangkan dari Batavia, atau bahkan langsung dari Negeri Belanda.

Sederajat dengan MULO, OSVIA (*Opleidings School voor Inlandsche Ambtenaaren*) ke Makasar, didirikan di kota Makasar tahun 1921. Kalau MULO merupakan sekolah umum, maka OSVIA adalah sekolah kejuruan. Sekolah ini terbagi dua. ma-

-
- 20) Palajo, kota paling utara Sulawesi Selatan, merupakan ibukota Kerajaan (kemudian menjadi afdeeling) Luwu yang juga meliputi Tana Toraja. Akan tetapi, anak-anak asal Tana Toraja lebih banyak masuk pada HIS Pare-pare.
- 21) Drs. Mardanas Safwan, et.al.(ed), *op.cit.* hal. 59.

sing-masing: (1) OSVIA Afdeeling A, 2 tahun pertama, dan (2) OSVIA Afdeeling B, bagian pertama ditambah setahun pendidikan. Bagian A memperoleh pengetahuan umum, sedang pada bagian B ditambah dengan vak kejuruan. Yang hendak tetap sebagai OSVIA, calon pegawai pemerintah, mengkhususkan pelajaran pada bidang hukum (*rechten*) dan administrasi pemerintahan, dan lain-lain. Menurut bekas lulusan OSVIA, Malajong Daeng Liwang (meninggal di Makasar, 1981), pada tahun ketiga sekolah itu, ditambah pelajaran: (1) *Beginselen der rechts watenschapp*, (2) *Beginselen van Staats en Administratif recht*, (3) *Beginselen der Staathuishoud kunde*, dan (4) *Land huishoud Kunde*^{2 2})

Cukup banyak murid-murid OSVIA yang pernah menamatkan pelajarannya pada sekolah itu. Mereka memperlihatkan kecakapan di mata guru-guru bangsa Belanda. Dengan memperoleh nilai tinggi, pujian, merupakan kebanggaan, yang menimbulkan harga diri. Kebanggaan tidak hanya pada diri bekas murid sekolah tinggi itu, melainkan pula terimbas pada anggota keluarganya, dan bahkan sekampungnya, ikut pula bangga.

Selain yang tetap menggunakan predikat OSVIA, terdapat pula jenis lain pada tahun ketiga itu, yakni HIK (*Holland Inlandsche Kweekschool*) yang menggunakan juga bahasa pengantar bahasa Belanda. Mereka memperdalam bidang ilmu mendidik (*Pedagogik*). Guru-guru HIK umumnya berasal dari suku Manado, Ambon, dan Belanda. Kepala sekolah selamanya orang Belanda. *Kweekschool* bekas yang didirikan B F Matthes (1876) menggunakan bahasa pengantar: bahasa Melayu. MULO, OSVIA dan HIK mempunyai kedudukan yang sama. Ketiga sekolah lanjutan tingkat menengah itu menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar di sekolah/kelas.

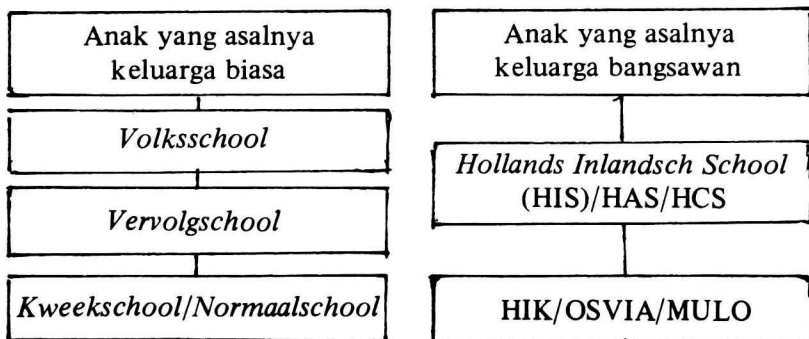
Pengadaan guru-guru yang akan mengajar pada sekolah-sekolah dimulai sejak Benjamin Frederik Matthes membuka sekolah guru yang pertama *Kweekschool* tahun 1876. Tamatan

22) *Ibid.* hal. 63.

Kweekschool dipersiapkan mengajar pada *Volksschool*, dan atau *Vervolgschool*, serta *Inlandsche School*. Untuk mengajar pada HIS haruslah tamatan HIK yang bersama-sama belajar dengan murid-murid OSVIA selama dua tahun.

Lama kelamaan, di kota Makasar dan sekitarnya, bertumpuk tamatan VVS atau Sekolah Sambungan (menurut sebutan penduduk setempat). Mereka yang cerdas dan melalui saringan dapat masuk belajar pada MULO lewat *voorklas*. Karena MULO tidak bisa lagi menampung tamatan VVS, pemerintah membuka NS (*Normaal School*) pada tahun 1925.^{2 3}) *Normaal School* setingkat dengan MULO, akan tetapi sekolah yang disebut terakhir mendapat penghargaan lebih dari NS. Tamatan MULO dapat melanjutkan pelajaran ke AMS (*Alegmene Middelbaare School*) di Batavia, sedangkan tamatan NS tidak demikian.

Anak-anak atau murid-murid yang melanjutkan ke NS umumnya berasal dari keluarga penduduk/masyarakat biasa, tamatan VVS dan *Inlandsche School*. Sedangkan untuk bisa masuk belajar pada MULO, seharusnya tamatan HIS, atau HAS (untuk anak-anak suku Ambon), atau HCS (China). Perbedaan derajat dan taraf hidup dalam masyarakat akan berdasarkan asal keluarga anak murid, berikut ini tergambar skema jalur pendidikan: sebagai berikut,



23) *Ibid.* hal. 60.

Seorang anak asal keluarga bukan bangsawan, akan tetapi kehidupannya lumayan (kaya), bisa masuk bersekolah bersama-sama anak-anak keturunan Tionghoa dalam HCS. Dari sana, ia dapat masuk ke *Holland Inlandsche Kweekschool*, atau ke OSVIA, atau MULO. Nampak, bahwa kekayaan seseorang dapat memindahkan status/kedudukannya dalam masyarakat, mendapat ketambahan penghargaan.²⁴⁾

Pada bidang pertukangan, pemerintah membuka sekolah yang bernama *Ambathschool*, yang oleh masyarakat kota Makassar disebutnya *sikola amba*. Sekolah yang mencetak tukang kayu, tukang zolder itu, diresmikan pada tahun 1927, tempatnya di pinggiran kota sebelah utara, dalam distrik Ujung Tanah (Kini Jalan Bandang, lokasi gedung ST).

Pendidikan yang menciptakan ahli pertanian pun mendapat perhatian pemerintah. Ketika sekolah tersebut dibuka dengan nama *Landbouwschool* pada tahun 1932, jumlah muridnya tidaklah terlalu sedikit. *Landbouwschool* setingkat dengan VVS atau *Inlandsche School*. Di samping yang dibuka di Makassar, sekolah pertanian sejenis dibuka pula di kota Watampone dan Palopo. Tamatan sekolah itu bila bekerja digelar penduduk pak mantri *landbouw*.

Pada umumnya, perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan ditujukan pada *Volkschool*, yang lama pendidikannya tiga tahun. Hingga menjelang perang (1941), di kota Makassar hanya terdapat 14 buah sekolah *Volkschool*. Sedang *Vervolgschool* sebanyak 8 (delapan) buah, masing-masing di Kampung Wajo, Amanagappa, Maradekaya, Tabaringan, Maricaya, Kampung Layang, dan kampung Mariso.²⁵⁾

Kekurangan guru tidak dapat ditutupi oleh tamatan *Kweekschool* yang telah terpaksa ditutup tahun 1930. Untuk

24) *Ibid.* hal. 61, sesuai pula wawancara Muhammad Ardani, 68 tahun, bekas pengurus Muhammadiyah masa NIT.

25) Drs. Haji Abdul Rauf, 65 tahun, Lektor Kepala pada IK/IP Ujung Pandang. Sebelum perang, sudah menjadi guru di Makassar.

menanggulangi kebutuhan guru yang semakin mendesak, dibuka *Schakelschool* pada tahun 1932. Bahkan, puluhan tahun sebelumnya, yakni pada tahun 1920-an, pemerintah membuka kursus kilat pengadaan tenaga pengajar. Dibukalah ketika itu LVO (singkatan dari *Lergaang voor Onderwijs*). Pada tahun 1935, LVO diperbaharui dan diperkaya kemampuan yang akan diberikan, menjadi *Currus voor Onderwijs* (CVO).

Lama pendidikan pada LVO minimal satu tahun, setelah tamat langsung diangkat jadi guru bantu pada *Volkschool*. Murid-murid LVO berasal dari VVS, atau *Inlandsche School*. Mereka terutama mendapat pelajaran didaktik dan metodik mengajar. Beberapa tamatan VVS yang sudah dewasa dan dinilai bisa berdiri di muka kelas, setelah *magang* (dibina guru kelas senior), ikut dibesluitkan menjadi guru honorer. Pendapatan honorarium guru magang biasanya sekitar f.6,- (enam gulden) per bulan. Bagi tamatan LVO mendapat gaji permulaan (0,0 bulan dinas) sebanyak f.11,- Sistem penggajian itu berlaku dari tahun 1930 hingga pemerintahan NIT (1949)²⁶

Guru-guru tahun 1920-an hingga masa perang (1941) dengan penerimaan gaji mereka, menduduki tempat terhormat bukan hanya karena tugasnya yang mulia, melainkan juga sebab taraf kehidupannya cukup baik. Mereka pergi mengajar dengan pakaian yang cukup rapi, sedang guru kepala (kepala sekolah) umumnya memakai dasi. Gaji kepala sekolah tahun 1930-an: f.16,- untuk *Volkschool*.

Masyarakat sekitar memandang guru sebagai serba tahu semua masalah kehidupan, mulai dari mendamaikan orang yang bertengkar, hingga memberi nasehat-nasehat mengenai kesehatan. Pendidik menjadi stabilisator dan dinamisator lingkungan sosialnya.

26) Drs. Remba Kasim, 65 tahun. Wawancara tanggal 28-9-1983. Ketika itu harga beras sekarung @ 65 kg/karung @ f.2,50,-

Sekolah-sekolah yang agak langsung menyentuh masyarakat lapisan bawah ialah *Volkschool*. Dalam Kota Makasar, anak-anak calon murid sekolah hanya dapat ditampung pada 14 buah *Volkschool*, jumlah sekolah tahun 1941. Ketika itu jumlah penduduk sekitar 200.000 jiwa. Kalau sebuah sekolah desa (3 tahun) hanya bisa menampung 100 orang murid, maka *Volkschool* di kota Makasar ketika itu hanya mampu menampung 1.400 murid. Pada waktu yang sama, usia anak-anak yang menghendaki pendidikan dasar sekitar 20.000 orang anak, berarti baru sekitar 10% yang dapat tertampung. Masih ada sekitar 90% yang tidak mempunyai kesempatan menikmati dunia pendidikan dasar *Volkschool*.

Menjelang Jepang masuk ke Sulawesi Selatan, kota Makasar khususnya, seseorang yang sempat menamatkan pendidikan pada *Volkschool*, sudah dapat merasa bangga. Dalam masyarakat sekitarnya ia tidak tergolong lagi buta huruf, sebagaimana kebanyakan penduduk kota ketika itu. Mereka yang telah pernah bersekolah itu dapat menjadi pegawai rendahan, membaca berbagai informasi dalam berbagai media tulis, atau diangkat menjadi pimpinan perkumpulan-perkumpulan sosial.²⁷⁾

Ketika Jepang masuk, mereka yang tamatan *Volkschool* umumnya masuk latihan kemiliteran pemerintah Jepang. Mereka yang lulusan MULO, OSVIA, HIK yang memiliki kemahiran berbahasa Belanda agak enggan memasuki latihan kemiliteran yang diadakan penguasa Jepang.

Pendidikan formal yang diadakan pemerintah kolonial Belanda, kecuali mencerdaskan kehidupan anggota masyarakat yang bersangkutan, juga mempunyai pengaruh terhadap pelapisan sosial. Anak-anak asal keturunan bangsawan yang sempat menamatkan pelajaran pada MULO, OSVIA, HIK apa lagi kalau tamat dari AMS di Batavia, status kebangsawannya bertambah kuat di mata masyarakat sekitarnya. Namun, pada diri anak

27) Muhammad Ardani, 67 tahun. Wawancara tanggal 20-10-1983 di Ujung Pandang (d/h Makasar).

1.3 Perkembangan sekolah-sekolah asuhan swasta

Sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan formal asuhan swasta di Makasar diusahakan oleh berbagai pihak. Badan-badan usaha pendidikan, yang biasanya berbentuk yayasan di kota utama di Sulawesi Selatan, terdiri dari:

- (1) Pihak yang tergabung dalam kegiatan gerejani,
- (2) Ulama-ulama atau pemuka agama Islam,
- (3) Pihak nasionalis/republiken.

Pada mulanya, usaha mengadakan lembaga pendidikan di Makasar (bentuk formal), dilakukan oleh pihak swasta. Matthes, nama lengkapnya: Benjamin Frederik Matthes, yang semula hanya tertarik adanya laporan yang sampai ke Netherland tentang naskah-naskah kuno Sulawesi Selatan, berketetapan hati menuju Makasar. Setibanya di Makasar, sambil mengumpulkan naskah-naskah kuno bertuliskan lontarak, ia mendirikan *Kweekschool*. Pada tahun 1876, Matthes bersama dua orang kawannya membuka sekolah guru, *Kweekschool* di kota Makasar. Pemerintah ketika mula dibukanya sekolah guru itu, kurang perhatiannya, bahkan cenderung menghalanginya.

Pemerintah kolonial Belanda di Makasar menjelang abad ke-20, terlalu sibuk dalam masalah pemerintahannya yang dinilai belum kokoh. Mereka menganggap, bahwa perjanjian-perjanjian yang telah ada belum menjadi jaminan bagi keamanan pelaksanaan pemerintahan kolonial.

1.3.1 Usaha Lembaga pendidikan keagamaan pihak Kristen Protestan (Zending)

Benjamin Frederik Matthes (B.F. Matthes) yang membuka *Kweekschool* tahun 1876 di Makasar masih sebagai upaya pribadi. Berhubung ia dikenal sebagai penginjil, pemerintah berhati-hati dan mengawasi tingkah lakunya. Pembukaan sekolah yang sesungguhnya membantu pemerintah mencerdaskan rakyat, karena diusahakan dari seorang penginjil tidak menggembirakan pemerintah kolonial. Belanda ingin mengadakan pende-

katan dengan raja Makasar (Gowa) dan Bugis, yang telah menetapkan agama kerajaan adalah agama Islam. Gerak pendekatan oleh pemerintah Belanda dikhawatirkan akan terganggu kalau pada masa itu, akhir abad ke-19, sudah ada usaha-usaha pihak penginjil.

Kedatangan B F Matthes ke Makasar tahun 1875, utamanya adalah untuk memperdalam pengetahuan tentang kebudayaan Bugis dan Makasar lewat studi naskah-naskah kuno yang bertuliskan lontarak. Naskah-naskah kuno itu telah mulai tersusun rapi sejak huruf daerah ditemukan dan dirumuskan oleh Daeng Pamatte. Ketika itu, bandar Makasar telah ramai dikunjungi pedagang dan pelaut Portugis, Johor, Aceh dan lain-lain. Naskah-naskah kuno yang asli, umumnya ditulis pada kertas buatan Portugis, yang cukup tebal, pindahan dari tulisan-tulisan diatas daun lontar.³³⁾

Pengambilalihan lembaga pendidikan asuhan Benjamin Frederik Matthes oleh pemerintah kolonial Belanda di Makasar tahun 1880, menyebabkan sang pendeta menekunkan diri pada pengumpulan naskah kuno lontarak. Ia dibantu oleh La Mangewa dan Daeng Manassa, guru bantu bidang bahasa daerah yang tertarik pada Matthes. Dengan demikian, Benjamin Frederik Matthes lebih nampak sebagai seorang peminat ilmu dari pada seorang penginjil. *Kweekschool* dibawah asuhan Pemerintah Kolonial Belanda (sejak 1880) tetap memanfaatkan Matthes sebagai direktornya.

Seperti telah disebutkan bagian depan, setelah Matthes memusatkan perhatiannya pada studi naskah kuno lontarak, upaya mempelajari latar kebudayaan suku Makasar dan Bugis amat lancar. Puas dengan pengumpulan naskah, ia kembali ke Nederland. Di sana ia meraih penghormatan dengan gelar *Doctor honoris Causa*.³⁴⁾ Kegiatan pendidikan asuhan pihak

33) Berhubung naskah pada mulanya terdapat pada daun lontar, maka disebut *Lontarak*, hurufnya pun dinamakan huruf lontarak.

34) Drs. Mardanas Safwan, et.al. (ed.), *op.cit.* hal. 66.

Zending yang dirintis Benjamin Frederik Matthes terhambat dengan pulangnya penginjil pertama di Makasar itu. Untuk beberapa waktu lamanya, aktivitas Zending tidak nampak lagi di kota Makasar.

Kebijaksanaan pemerintahan kolonial mengambil alih sekolah pimpinan Benjamin Frederik Matthes yang berasal dari mazhab Marcus di negeri Belanda, dihubungkan dengan usaha gerakan pendekatan pemerintah kolonial Belanda terhadap lingkungan sosial kota Makasar. Erat pula hubungannya dengan gerak pendekatan pemerintah kolonial Belanda terhadap sistem kepercayaan/agama kerajaan Gowa, yang meliputi kota ketika itu. Pihak Belanda tidak ingin menanggung resiko terlalu berat, akibat ketersinggungan aspek agama dengan raja Gowa bersama masyarakat kota Makasar sebagai pendukungnya. Penyebaran agama Nasrani belum dijadikan bagian dari penjajahan Belanda.

Pada tahun 1907, ketika pihak Belanda benar-benar dapat memperkokoh kekuasaannya atas masyarakat Gowa, majalah Kristen di Negeri Belanda, yang bernama *Alle den Volcke*, menulis suatu artikel sehubungan dengan penyebaran agama Nasrani. Artikel itu menyerukan agar penyampaian suara Injil ke seluruh dunia. Majalah mengutip Injil Yahya 10, ayat 16 yang berbunyi: Ada lagi padaku domba lain, yang belum masuk kandang ini, maka sekalian itu juga wajib Aku bawa, dan domba itu kelak mendengar akan suaraku, lalu akan menjadi kawan.....³⁵⁾. Seruan artikel itu cukup menarik sebagian penginjil di Negeri Belanda ketika itu.

Setelah membaca artikel yang berisi seruan penginjilan terhadap "domba-domba" yang belum masuk "kandang", *Antonie Aries van de Loosdrecht*, bersama keluarganya, berketetapan hati menuju Indonesia. Di Batavia, ia bertemu dengan Dr. Adriani, seorang pendeta tetapi juga antropolog. Dr. Adriani

35) J.A. Sarira, *Benih Yang Tumbuh, Skersa Pendidikan Kristen Tana Toraja (1913-1967)*, Panitia Dasa Warsa Pendidikan Kristen Toraja, Makale, 1967, hal. 7.

sudah pernah tinggal lama di Sulawesi Selatan, khususnya Tana Toraja, desa pegunungan bagian utara. Penduduk Tana Toraja umumnya belum memeluk agama Islam, melainkan kepercayaan lama, animisme. Tanah pegunungan itu mempunyai pula hawa yang sejuk, tidak sama dengan daerah pinggiran laut yang panas. Gambaran umum penduduk dan situasi Tana Toraja diperoleh Loosdrecht dari Dr. Adriani.

Kedatangan Loosdrecht ke Sulawesi, lewat Makasar, ke Tana Toraja, adalah sebagai utusan *GZB (De Gereformeerde Zendings Bond)*, yang didirikan pada tahun 1901, 6 Pebruari, di Utrecht. Missinya, ialah mengadakan penginjilan ke seberang lautan, terutama tanah jajahan Belanda, teristimewa Indonesia. *GZB* mempunyai majalah propaganda yang bernama *Alle dan Volkcke*, untuk menyerukan suara penginjilan ke seberang lautan.

Pada tahun 1910, *Antonie Aries van den Loosdrecht* tiba di Makasar. Ia tidak tinggal berlama-lama di Makasar, karena bukanlah itu tujuannya. Bersama keluarganya, ia segera meninggalkan kota Makasar menuju Tana Toraja. Selama 3 tahun, 1910–1913, *Loosdrecht* hanya mengadakan pendekatan disertai propaganda yang amat berhati-hati. Seorang yang berasal dari Minahasa (Menado), Tuan Manembu yang ketika itu menjadi guru swapraja, membantu *Loosdrecht*. Bersama penginjil dari negeri Belanda itu, Guru Manembu membuka sekolah di Kesu, dekat Rante Pao, pada bulan Nopember 1913. Kepala distrik setempat menyambut baik pembukaan sekolah Zending pertama di Kesu itu.

1.3.2 Usaha Lembaga pendidikan keagamaan pihak Katholik

Pihak Kristen Roma Katholik (biasa disingkat dengan sebutan populer *Katholik* saja) yang datang ke Sulawesi, tidak langsung ke Makasar, ibukota Sulawesi Selatan. Pada mulanya, para penginjil Katholik berada di Minahasa, Sulawesi Utara. Di sana, didirikan pengurus badan keagamaan yang bernama Vikariat Apostolik Sulawesi, yang mulai bekerja tahun 1919.

Ketika itu, Sulawesi Selatan belum mendapat perhatian, sebab di samping daerah Sulawesi Selatan berpenduduk yang taat pada agama Islam, juga telah ada kegiatan para penginjil dari Kristen Protestan. Para penginjil Katholik disebut *missionaris*.

Oleh karena didorong untuk melakukan juga penginjilan menurut ajaran agama Roma Katholik di Sulawesi Selatan, pimpinan pusat missionaris di Scheut, Belgia mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia Belanda, tertanggal 18 Juni 1936. Isi permohonan, ialah agar dapat diberi keluasaan mengadakan penginjilan sesuai ajaran agama Katholik di Indonesia. Permohonan para missionaris disetujui, sehingga pada tanggal 13 April 1937 dibuka kantor *Prefektur Makasar*. Untuk mengurus kantor/badan itu, dipercayakan pada tarekat Hati Tak Bernoda Santa Maria, dari Scheut.³⁶⁾

Perijinan pusat missionaris di Belgia kepada pemerintah kolonial Belanda ketika, mengalami situasi lancar berhubung sejak tahun 1927, pemerintah kolonial telah menggunakan jasa para zuster-zuster YMY.³⁷⁾

Mereka mengajar puteri-puteri bangsa Eropah. Pada tahun 1934, para *frater*³⁸⁾ dari Teiburg membuka sekolah khusus anak-anak bangsa Eropa, dalam lembaga pendidikan ELS (*Europesche Lagere School*) di Makasar, berlokasi pinggir lapangan Karebosi. Sejak itulah bermulanya kegiatan missionaris Katholik di Sulawesi Selatan, walau belum dikoordinasi secara baik.

Sesungguhnya lembaga pendidikan dasar ELS hanya di-khususkan bagi anak-anak bangsa Eropa, akan tetapi pada tahun 1937, sekolah itu menerima juga anak-anak bumiputra. Anak Tuan Sonda Daeng Mattayang, yang bekerja pada kantor Pemerintah Kolonial Belanda di Makasar, bernama Weleidah

36) Drs. Mardanas Safwan, et.al. (ed), *op.cit.* hal. 74.

37) *YMY* suatu istilah yang populer di kalangan pastor di Makasar, yang kepanjangannya belum terungkap.

38) *Frater*, gelar bagi kader penginjil agama Katholik.

Sonda, dapat diterima di sekolah itu. Bersama Weleidah, diterima pula Ince Naim dan Mattotorang. Dari ELS Nona Weleidah Sonda dikirim ke Bandung melanjutkan pelajaran pada Sekolah *Frobel*, sejenis *Kweekschool*.³⁹) Pada masa itu, bru Nona Weleidah Sonda yang dapat melanjutkan pelajaran keluar daerah Sulawesi Selatan. Keadaan ini mula-mula mendapat tantangan pihak kerabat Tuan Sonda, akan tetapi setelah beberapa bulan di Bandung, berbalik menjadi suatu kebanggaan.⁴⁰)

Usaha penginjilan sesuai ajaran agama Roma Katholik di Makasar, hingga tahun 1938, agak tersendat-sendat. Pemerintah kolonial berusaha mempertahankan hubungan dengan pemangku adat sebaik mungkin, sedang mereka itu memeluk agama Islam. Di samping itu pula, para missionaris umumnya berkebangsaan Belgia, yang pusat kegiatannya dikoordinasi dari kota kecil Scheut, Belgia.

Pada tahun 1938, bulan Oktober, empat orang missionaris tiba dari negeri Belanda. Keempat orang yang berkebangsaan Belanda itu menggabungkan diri dengan missionaris Belgia, yang telah ada lebih dahulu. Dengan demikian, penginjilan sesuai agama Katholik mulai lancar. Bidang pendidikan pun yang diusahakan para missionaris mengalami kemajuan.

Sejak tahun 1927, seorang dari bumiputra, bangsa Indonesia, bernama Nani Fernandes, bersama-sama dengan Zusterzuster YMY berkecimpung dalam bidang pendidikan. Missionaris Makasar, melalui majalah kebanggaan *De Warheid* (sejak 1936) dapat berkomunikasi lewat karya tulis. Majalah itu dibina oleh Pastur W. Dekkers, M.Sc. (bulanan) yang kemudian dilanjutkan oleh Dr. G. Giezennar, hingga pasukan Jepang mendarat di Makasar, Pebruari 1942. Dr. Giezenaar berpendapat,

39) Drs. Mardanas Safwan et.al. (ed) *op.cit.* hal. 75.

40) Nyonya Weleidah Malajong Sonda, *wawancara*.

bahwa penginjilan akan lebih berhasil melalui pendidikan pemuda-pemuda.⁴¹⁾

Pusat kegiatan missionaris didirikan di Makasar pada tahun 1927, dengan dibukanya gedung Keuskupan Agung. Aktivitas Keuskupan Agung bukan hanya meliputi daerah Sulawesi Selatan saja, melainkan juga sampai di daerah Sulawesi Tenggara. Pada tahun itu, telah ada sekolah untuk menampung anak-anak bangsa Eropa, khusus bagi anak putri. Sedangkan sekolah untuk anak-anak Eropa bagian putra didirikan pada tahun 1934, dalam Komplek Rajawali.

Gedung ELS yang didirikan missionaris Katholik di Jalan Rajawali, terbuat menurut moderen masa itu, dengan gaya Eropah. Sedangkan gedung HIS yang diperuntukkan bagi bumi putera, terbuat dari bambu dengan beratapkan daun padi yang dikeringkan.⁴²⁾ Pada dasarnya ELS hanya boleh menerima murid-murid dari anak-anak bangsa Eropa, akan tetapi, setelah beberapa tahun, anak-anak dari yang dinilai terpendang di mata Pemerintah Kolonial Belanda, pada akhirnya diterima juga pada sekolah mewah tersebut. Dengan demikian, dengan perlahan-lahan terjadi pembauran antara bumi putera dengan bangsa Eropa, namun dalam batas yang ketat.

Alat-alat tulis pada HIS yang khusus bagi bumi putera adalah batu tulis, pada sekolah Eropa (ELS) dari kertas yang agak tebal, kelihatannya kasar. Karena itu, anak-anak terpendang kalangan bumiputra berusaha masuk sekolah pada sekolah yang lebih istimewa itu.

Anak-anak kalangan bumi putera bangsa Indonesia sudah dapat merasa bangga bila dapat diterima pada HIS, karena di dalam sekolah dasar itu pun telah mulai dapat bercakap bahasa Belanda. Pihak pemerintah kolonial pun turut senang. Masuk-

41) Sebelum Dr. G. Giezenaar memangku tugasnya di Makasar, ia telah lama bertugas di daerah Tana Toraja. Lihat pula Drs. Mardanas Safwan, et.al. (ed) *op.cit.* hal. 76.

42) Kartu data, hasil *Wawancara* dengan Pastor Eerenbeemt, Malino, tahun 1981.

nya anak-anak dari lapisan menengah ke HIS menunjukkan berhasilnya usaha gerak pendekatan yang dilakukan pemerintah Belanda terhadap pemangku adat setempat. Demikian pula halnya sekolah untuk anak-anak Eropa 'ELS telah mulai pula dimasuki anak-anak dari kalangan bumi putra, walau amat terbatas.

Pihak missionaris Katholik, demikian Eerenbeemt, sebelum perang (1942), lembaga pendidikan yang diasuh hanya ditujukan terhadap anak-anak bangsa yang berasal dari Eropah. Tujuan pokoknya sebagai permulaan gerakan para missionaris itu, lebih dahulu dilakukan pendekatan dengan pihak penguasa. Pendidikan Katholik sejak semula berusaha menanamkan disiplin sekolah yang keras, dan sedikit diwarnai oleh kehidupan beragama sesuai dengan ajaran Katholik. Anak-anak bumi putera, seperti Nona Weleidah Sonda, yang masuk belajar pada ELS bukan hanya mulai mengenal lebih dekat cara-cara hidup orang Barat, melainkan mengenal pula bagaimana ajaran agama lain, berbeda dari yang dianutnya sendiri. Hal ini dapat menimbulkan hidup berdampingan dalam saling menghormati antar ummat beragama, yang dapat disamakan dengan konsep toleransi antar ummat beragama yang sekarang dianjurkan itu.

1.3.3 Usaha lembaga pendidikan keagamaan pihak Islam.

Pendidikan agama Islam yang mula-mula dan paling sederhana dapat disebutkan seperti pengajian, baik dalam mesjid, maupun di rumah-rumah Imam, atau guru mengaji sendiri. Materi pokok pengajian, ialah cara membaca kitab suci, yang tertulis dalam huruf Arab, serta berbahasa Arab. Pengajian yang asli, hanya sekedar belajar membaca sesempurna mungkin. Belum diperlukan apa makna yang terkandung dalam bacaan itu. Lama kelamaan, setelah adanya gerakan pembaharuan, misalnya gerakan Wahhabi sampai masuk ke Indonesia abad ke-19, pada beberapa tempat mulai adanya usaha menterjemahkan kitab suci ummat Islam, yang berbahasa Arab dan bertuliskan huruf dari Timur Tengah itu.

Gerakan pembaharuan Syech Muhammad Abdul di Mesir awal abad ke-20, sampai pula ke Indonesia. Maka, pada tahun 1912, di Jawa, Haji Muhammad Dahlan mendirikan perkumpulan Muhammadiyah. Perkumpulan keagamaan, yang sering digolongkan pula sebagai perkumpulan pergerakan kemerdekaan Indonesia, ketika berdirinya, pemerintah kolonial sedang memulai menggiatkan usaha pendidikan bagi bumiputra. Kegiatan pemerintah kolonial membuka sekolah-sekolah menggugah hati pemimpin Muhammadiyah.

Pada tahun 1921, Haji Muhammad Dahlan memperoleh izin membuka cabang-cabang perkumpulan Muhammadiyah di berbagai tempat. Berdasarkan Surat Ketetapan Gubernur Jenderal Pemerintah Hindia Belanda No. 36 tertanggal 2 September 1921. Atas dasar itulah, pada tanggal 4 April 1926, di Makasar dibuka perkumpulan Muhammadiyah (bertepatan dengan 17 Ramadhan 1345 H, sesuai penanggalan yang lazim dipergunakan perkumpulan ummat Islam). Perkumpulan keagamaan pihak Islam itu diketuai oleh Haji Yusuf Daeng Mattoro. Pelopor lainnya masing-masing Haji Abdullah, Haji Ahmad Cambang, Muhammad Yahya, Mansyur Al Yamani, Daeng Minggu, Haji Ahmad, dan Abdul Karim, dengan anggota sejumlah 17 orang.⁴³⁾

Penduduk kota Makasar yang umumnya terdiri dari suku Makasar dan Bugis, menganut agama Islam. Sejak datangnya agama Islam yang dibawa oleh Datuk ri Bandang pada tahun 1605 di Tallo, Makasar bagian Utara, suku Makasar dan Bugis memeluknya dengan taat. Keadaan yang sama dijumpai pemerintah kolonial sesuai *Memorie* dari *Gouverneur van Celebes en Onderhoorigheden*, A J Baron Quarles de Quarles tanggal 4 Agustus 1910. De Quarles menulis dalam memorinya: "*De Makasarsche en Boegineesche bevolking en de meeste kust-*

43) H.D. Moentoe, *Langkah dan Oesaha Kami*, Group Muhammadiyah Labakkang, Makasar, 1942. hal. 97.

Sekolah-sekolah yang agak langsung menyentuh masyarakat lapisan bawah ialah *Volkschool*. Dalam Kota Makasar, anak-anak calon murid sekolah hanya dapat ditampung pada 14 buah *Volkschool*, jumlah sekolah tahun 1941. Ketika itu jumlah penduduk sekitar 200.000 jiwa. Kalau sebuah sekolah desa (3 tahun) hanya bisa menampung 100 orang murid, maka *Volkschool* di kota Makasar ketika itu hanya mampu menampung 1.400 murid. Pada waktu yang sama, usia anak-anak yang menghendaki pendidikan dasar sekitar 20.000 orang anak, berarti baru sekitar 10% yang dapat tertampung. Masih ada sekitar 90% yang tidak mempunyai kesempatan menikmati dunia pendidikan dasar *Volkschool*.

Menjelang Jepang masuk ke Sulawesi Selatan, kota Makasar khususnya, seseorang yang sempat menamatkan pendidikan pada *Volkschool*, sudah dapat merasa bangga. Dalam masyarakat sekitarnya ia tidak tergolong lagi buta huruf, sebagaimana kebanyakan penduduk kota ketika itu. Mereka yang telah pernah bersekolah itu dapat menjadi pegawai rendahan, membaca berbagai informasi dalam berbagai media tulis, atau diangkat menjadi pimpinan perkumpulan-perkumpulan sosial.²⁷⁾

Ketika Jepang masuk, mereka yang tamatan *Volkschool* umumnya masuk latihan kemiliteran pemerintah Jepang. Mereka yang lulusan MULO, OSVIA, HIK yang memiliki kemahiran berbahasa Belanda agak enggan memasuki latihan kemiliteran yang diadakan penguasa Jepang.

Pendidikan formal yang diadakan pemerintah kolonial Belanda, kecuali mencerdaskan kehidupan anggota masyarakat yang bersangkutan, juga mempunyai pengaruh terhadap pelapisan sosial. Anak-anak asal keturunan bangsawan yang sempat menamatkan pelajaran pada MULO, OSVIA, HIK apa lagi kalau tamat dari AMS di Batavia, status kebangsawannya bertambah kuat di mata masyarakat sekitarnya. Namun, pada diri anak

27) Muhammad Ardani, 67 tahun. Wawancara tanggal 20-10-1983 di Ujung Pandang (d/h Makasar).

bangsawan yang bersangkutan, mulai muncul pikiran, perasaan, atau sikap yang agak moderat. Pengetahuan yang mereka peroleh dari bangku sekolah memperluas cakrawala pandangan mereka terhadap dunia sekitarnya. Minimal, mereka bukan lagi bangsawan ekstrim tradisional. Hal yang sama dapat pula terdapat pada anak bangsawan yang hanya mampu menamatkan pelajaran pada *Holland Inlandsche School (HIS)*.

Lembaga pendidikan tertinggi ketika itu, seperti MULO, OSVIA, dan HIK langsung dikelola oleh residen Sulawesi. Penerimaan dan penamatannya (termasuk penanda tanganan ijazah) diatur oleh residen sendiri.²⁸⁾

Sekolah-sekolah rakyat, *Volkschool* yang hanya terdiri dari kelas 1 s/d 3, dibangun dan diatur oleh Swapraja, maka sering disebut *sekolah gemente*. *Vervolgschool (VVS)* dalam kota Makasar, tetap dalam pengaturan Pemerintah Kota Makasar (Kotapraja Makasar).

Usaha pemerintah kolonial Belanda mendekati para raja lokal, dan atau pemangku adat, nampak berhasil melalui jalur pendidikan formal. Perlahan-lahan terjadi pendekatan cara-cara berfikir, di mana para raja lokal dan pemangku adat menggeser mendekati cara-cara hidup bangsa penjajah itu. Anak-anak bangsawa yang berhasil menamatkan pendidikan pada HIS, terutama lagi pada MULO, HIK, OSVIA, atau AMS Batavia, berpakaian cara Belanda atau Barat. Puteri-puteri tidak lagi sekedar penunggu rumah menunggu jodoh dari sesama anak bangsawan, akan tetapi setelah memasuki sekolah formal (misalnya HIS/MULO dan lain-lain), mereka seakan-akan menerobos benteng keakuan istana.²⁹⁾

Sejak tahun 1926, pemerintah kolonial di Makasar mengadakan gerakan mendekati raja dan pemangku adat dengan semboyan pemugaran dan pembaharuan swapraja. Maksud utamanya,

28) Drs. Harun Kadir, et.al. *op.cit.* hal. 105.

29) Ibu Weleidah Malajong 60 tahun, Tamatan *Europesche Lagere School* Makasar sebelum perang (1941). (*Wawancara*).

Belanda hendak membendung masuknya nasionalisme ke Sulawesi Selatan. Upacara adat kerajaan yang pernah hilang dihidupkan kembali. Anak-anak bangsawan utama disekolahkan atas beban keuangan persekutuan adat, yang diatur dan dikuasai oleh "controleur" atau "gezaghebber".³⁰⁾

Pendekatan terhadap bangsawan dengan menyekolahkan anak-anak mereka, dan agar dapat membendung nasionalisme ternyata gagal. Beberapa guru sejarah MULO yang mengajarkan perlawanan Belanda atas Spanyol, menimbulkan perasaan nasionalisme pada beberapa murid MULO. Andi Makkulau, putra Datu Luwu (Andi Jemma) menjelang masuk ke Makasar, belajar pada MULO di Makasar. Ia dengan penuh semangat mendengar pelajaran sejarah tentang usaha Negeri Belanda membebaskan diri dari Spanyol, dalam murid-muridnya yang sedang asik mengagumi sang guru menerangkan sejarah, mengira murid-muridnya sama dengan yang di Belanda. Putera Datu, dan mungkin ada juga yang lainnya, mengambil makna sejarah perlawanan Belanda terhadap penjajah (Spanyol) dan dimasukkan dalam suasana bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda. Sesungguhnya, sang guru tersebut menanamkan kebencian terhadap sikap bangsanya (Belanda) yang sedang menjajah Indonesia.³¹⁾

Kekhawatiran pemerintah kolonial terhadap munculnya perlawanan pemuda bumi putera lewat dunia pendidikan, nampak pada nasib sekolah pelayaran pinggiran Mariso, kota Makasar bagian Selatan. Akibat pemberontakan di atas kapal *Seven Provincien*, maka sekolah yang akan mencetak kader pelaut yang bernama *Kweekschool voor Inlandsche Schepelingen* disingkat KIS, terpaksa ditutup oleh pemerintah kolonial.³²⁾ Bekas kompleks sekolah pelayaran itu kemudian dijadikan tangsi militer, dikenal dengan nama tangsi KIS.

30) Drs. Harun Kadir, et.al. *op.cit.* hal. 94.

31) Andi Makkulau, gelar Opu Daeng Parebba, 70 tahun. *Wawancara* tanggal 2 September 1983 di Makasar.

32) Kartu data *wawancara* Drs. Zainal Abidin terhadap Muhammad Kasim Yahya, 70 tahun, tanggal 30 Oktober 1983.

1.3 Perkembangan sekolah-sekolah asuhan swasta

Sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan formal asuhan swasta di Makasar diusahakan oleh berbagai pihak. Badan-badan usaha pendidikan, yang biasanya berbentuk yayasan di kota utama di Sulawesi Selatan, terdiri dari:

- (1) Pihak yang tergabung dalam kegiatan gerejani,
- (2) Ulama-ulama atau pemuka agama Islam,
- (3) Pihak nasionalis/republiken.

Pada mulanya, usaha mengadakan lembaga pendidikan di Makasar (bentuk formal), dilakukan oleh pihak swasta. Matthes, nama lengkapnya: Benjamin Frederik Matthes, yang semula hanya tertarik adanya laporan yang sampai ke Nederland tentang naskah-naskah kuno Sulawesi Selatan, berketepatan hati menuju Makasar. Setibanya di Makasar, sambil mengumpulkan naskah-naskah kuno bertuliskan lontarak, ia mendirikan *Kweekschool*. Pada tahun 1876, Matthes bersama dua orang kawannya membuka sekolah guru, *Kweekschool* di kota Makasar. Pemerintah ketika mula dibukanya sekolah guru itu, kurang perhatiannya, bahkan cenderung menghalanginya.

Pemerintah kolonial Belanda di Makasar menjelang abad ke-20, terlalu sibuk dalam masalah pemerintahannya yang dinilai belum kokoh. Mereka menganggap, bahwa perjanjian-perjanjian yang telah ada belum menjadi jaminan bagi keamanan pelaksanaan pemerintahan kolonial.

1.3.1 Usaha Lembaga pendidikan keagamaan pihak Kristen Protestan (Zending)

Benjamin Frederik Matthes (B.F. Matthes) yang membuka *Kweekschool* tahun 1876 di Makasar masih sebagai upaya pribadi. Berhubung ia dikenal sebagai penginjil, pemerintah berhati-hati dan mengawasi tingkah lakunya. Pembukaan sekolah yang sesungguhnya membantu pemerintah mencerdaskan rakyat, karena diusahakan dari seorang penginjil tidak menggembirakan pemerintah kolonial. Belanda ingin mengadakan pende-

bewoners belijden den Mohammadaanschen godsdiert, de Toradja's zijn nog heiden''.^{4 4})

Semula, pendidikan keagamaan Islam lebih ditekankan pada ajaran tassauf. Materi pelajaran yang merupakan pendalaman terhadap kepercayaan terhadap Tuhan Yang Mahaesa atau ajaran *Tauhid*, menjadi inti ajaran tasauf.

Nampaknya, ajaran tasauf dalam agama Islam, dapat mencantol kepercayaan lama penduduk suku Makasar dan Bugis. Seakan-akan terdapat pembauran dua kepercayaan yang berbeda tetapi diusahakan para penganjur terdahulu mengaitkannya. Suatu model demikian, bisa diperbandingkan dengan yang terdapat pada masyarakat Towani-Tolotang, yang terdapat di daerah Sidenreng Rappang, 200 km sebelah utara kota Makasar.^{4 5}) Mereka, masyarakat Towani Tolotang, kadang-kadang terombang-ambing mengenai nama dan bentuk kepercayaannya itu.

Di Makasar, Sulawesi Selatan pinggiran pantai pada umumnya, sampai masuknya perkumpulan Muhammadiyah (1926) pemahaman ajaran agama Islam diluasi oleh ajaran Tasauf. Dari tasauf muncul ilmu-ilmu baru (lebih tepat disebut *guna-guna*) seperti kekebalan, kemampuan menghilang dari pandangan mata, menjinakkan senjata dari besi, dan sebagainya. Demikian pula, khotbah-khotbah hari Jum'at seluruhnya diucapkan dalam bahasa Arab, dengan alasan agar tidak merusak khasiat khotbah. Menterjemahkan khotbah dipandang telah berani memasukkan pikiran sendiri, dari manusia yang penuh kelemahan, ke dalam naskah yang bersumber dari Tuhan Yang Mahaesa, milik segala kesempurnaan.

44) Memorie van Overgave van den aftredenden Gcuverneur var: Celebes en Onderhcorigheder, bij A.J. Baron Quarles de Quarles, pag, 97 *Arsip Nasional Makassar* No. YC 651.

45) Kepercayaan Towani Tolotang, disebut oleh penganutnya adalah ajaran Sawerigading, tokoh mitos pada suku Bugis. Sejumlah upacara tradisional, seperti kematian, dan perkawinan, terdapat peniruan pada ajaran agama Islam.

Paham-paham keagamaan seperti tersebut di atas, dianut oleh para raja dan atau pemangku adat. Ulama-ulama non-Muhammadiyah (pra-Muhammadiyah) lebih suka menyesuaikan metoda dan materi dakwah (penyiaran agama) dengan bentuk dan cara pemahaman agama yang menekankan tasawuf, diikuti bumbu kepercayaan lama. Pada saat yang sama pula, pemerintah kolonial mengadakan gerakan pendekatan para pemangku adat, yang tujuan pokoknya membendung masuknya nasionalisme ke Makasar, Sulawesi Selatan pada umumnya.⁴⁶⁾

Perkumpulan Muhammadiyah, berdiri di Makasar 1926 cenderung berhadapan dengan dua kekuatan, para raja-raja lokal bersama pemangku adat, dan Pemerintah Kolonial Belanda. Pelopor Muhammadiyah di Makasar pada mulanya ialah para pedagang batik, yang mondar-mandir ke Solo dan Yogyakarta, seperti mansyur Al Yamani.

Pada tahun 1932, secara resmi perkumpulan Muhammadiyah mengadakan kegiatan dakwah yang terkordinir. Pada tahun itu, didirikan lembaga pendidikan kader juru dakwah dengan nama agak ke-belanda-belandaan: *Tabligh School*. Pembukaan sekolah milik perkumpulan Muhammadiyah ini dipimpin oleh Haji Abdul Malik Karim Amrullah, lebih terkenal dengan nama Hamka (singkatan). Sejak pembukaan (1932) masyarakat Islam di Makasar mulai mengenal adanya sekolah yang teratur, meniru model sekolah Belanda. Tujuan pokok pendidikan ialah mencetak calon guru madrasah, muballigh, dan tenaga khatib pada mesjid-mesjid. Para pengajar pada *Tabligh School* umumnya didatangkan dari Sumatera Barat, tempat asal Hamka. Guru-guru yang dikenal hingga sekarang, seperti Haji Darwis Abdullah, S S Majidi, S.S. Jamaan, Gazali Sachlan, dan Haji Kamaludin.⁴⁷⁾

46) Drs. Harun Kadir, et.al. *op.cit.* hal. 94.

47) Drs. Mardanas Safwan et.al. (ed) *op.cit.* hal. 90.

Adanya lembaga pendidikan sebagai pengaderan khatib di Makasar, merupakan suatu kritik terhadap pembawaan khotbah-khotbah Jum'at pada masa itu. Pada mimbar mesjid ketika sembahyang Jum'at, kaum muslimin yang menghadiri sembahyang hanya mendengar khotbah nasihat dalam bahasa Arab, yang umumnya tidak dimengerti para hadirin. Walau tidak dimengerti, terlihat juga anggukan-anggukan sebagian anggota jamaah, seakan-akan amat paham isi khotbah yang didengarnya. Keadaan yang demikian itu, hendak diubah atau diperbaharui oleh perkumpulan Muhammadiyah, dengan mengadakan *Tabligh School*.

Dua tahun *Tabligh School* berdiri, nama sekolah diubah menjadi Muallimin Muhammadiyah, langsung diurus oleh Muhammadiyah Cabang Makasar. Murid-murid yang dapat diterima menjadi murid Muallimin Muhammadiyah ialah tamatan VVS, dan atau yang sederajat. Tujuan pokok sekolah ini ialah menciptakan calon guru-guru agama, menurut model pendidikan pemerintah.

Perkumpulan Muhammadiyah Makasar secara sungguh-sungguh melakukan penyamaan bentuk pendidikan model pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1934 itu juga, sejenis pendidikan dasar yang bernama *Munier School* dibuka, bersamaan dengan pembukaan HIS Muhammadiyah. Sekolah yang terakhir itu (HIS Muhammadiyah) menyebabkan perguruan asuhan Muhammadiyah disukai berbagai pihak. Masyarakat Islam yang taat, tetapi berkeinginan anak-anaknya memperoleh pendidikan model Barat, tidak lagi memasukkan anak-anak mereka pada HIS asuhan Pemerintah Kolonial Belanda, melainkan kepada HIS Muhammadiyah. Sebaliknya, pemerintah kolonial Belanda menyambut gembira, bahwa pendekatan terhadap anak negeri (bumiputra) nampak pula di bidang pendidikan.^{4 8)}

48) M. Arsyat, 72 tahun, *Wawancara*, di Makasar, Lihat juga Drs. Mardanas Safwan et.al. (ed) *op.cit.* hal. 94.

Perkembangan lembaga pendidikan yang dibina perkumpulan Muhammadiyah menunjukkan kemajuan yang berarti. Segera setelah membuka HIS Muhammadiyah, dibuka juga *Diniyah School*, *Standard School*, dan Sekolah Wanita. Pada tahun 1936, lembaga pendidikan formal yang dapat dibuka Muhammadiyah cabang (sebelumnya bernama *Groep*) Makasar sebanyak 21 buah. Sekolah-sekolah itu tersebar dalam kota Makasar. Ketika itu, kota Makasar sebagai kota pusat perdagangan Sulawesi Selatan, menjadi juga pusat kegiatan dan penyebaran Muhammadiyah.

Lewat usaha pendidikan, perkumpulan Muhammadiyah di Makasar melakukan pembaharuan pemahaman agama Islam. Merubah cara beragama mereka yang sudah berumur tua, dirasakan mengalami kesulitan. Karena itu, sasaran utama mulai ditujukan pada generasi muda masyarakat Islam, dengan memberikan pembaharuan itu di sekolah-sekolah.

Hingga tahun 1940, keadaan lembaga pendidikan atau sekolah yang diasuh Muhammadiyah, sebagai berikut :

KEADAAN PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH TAHUN 1940

No.	Nama Sekolah	Jumlah
1.	Volkschool Muhammadiyah	8 buah
2.	HIS Muhammadiyah	1 buah
3.	Diniyahschool	10 buah
4.	Standard School	1 buah
5.	Sekolah Aisyiah (wanita)	1 buah
	Jumlah seluruhnya	21 buah

Sumber :

H.S.D. Moentoe, *Langkah dan Oesaha kami*, Penerbitan Muhammadiyah, Labakkang, Makasar, 1942.

Dengandemikian, nampak bahwa Muhammadiyah cabang Makasar menunjukkan kemajuan dalam usaha pendidikan. Jumlah murid hingga tahun 1940 mencapai sekitar 1.500 murid yang tersebar pada 21 buah sekolah. Keadaan itu bertahan hingga masuknya Jepang pada tahun 1942.

1.3.4 Lembaga Pendidikan asuhan pihak Nasionalis

Pemerintah kolonial sejak adanya ordonansi 1936, mulai terbuka terhadap berbagai aliran di kalangan bumiputra. Lagi pula, perkumpulan Muhammadiyah, yang dirasakan pemerintah kolonial tidak menunjukkan tanda-tanda yang membahayakan, bahkan dalam segi pendidikan cukup membantu dalam mencerdaskan rakyat. Para pengurus Muhammadiyah berasal atau selau mengadakan kontak dengan Yogyakarta dan Solo, Pekalongan; sedangkan guru-guru didatangkan dari Padang atau Sumatera Barat.

Pada tahun 1936, Mr. Sunaryo, seorang nasionalis republiken, datang ke Makasar. Ia segera menjumpai beberapa sahabatnya, guna membicarakan kemungkinan mencetak kader yang berjiwa nasional/republiken. Ia mendapat mandat dari Yogya untuk membuka Taman Siswa di kota Makasar, bila keadaan setempat memungkinkan. Dalam waktu yang amat singkat, pada tahun 1936 itu juga, disepakati membuka perguruan Nasional dengan nama Taman Siswa. Sistem pendidikan menyesuaikan dengan model sekolah pemerintah, kecuali jenjang pendidikan yang tetap mengikuti pusat Taman Siswa di Yogyakarta.

Ketika pembukaan (1936) perguruan ini mendapat sedikit kesulitan mengenai murid-murid yang akan masuk belajar. Karena itu, beberapa tokoh-tokoh nasionalis memindahkan anaknya, atau adiknya, atau anak-anak asuhannya pindah masuk belajar ke Taman Siswa, sebagaimana Wahab Tarru, seorang

tokoh nasionalis masa itu. Ia memindahkan Nanag adik Wahab Tarru sendiri, yang sudah kelas VI VVS. Murid semacam Nanang pindahan dari lain sekolah, harus melalui *kelas antara*.

Ketika Taman Siswa dibuka tahun 1936, guru-guru yang mengajar, antara lain: Saelan (ayah Emmy Saelan, pejuang), Sujimin, Goebel bersama isteri, Gani, dan Suwarno (merangkap Kepala Sekolah Taman Siswa).

Murid-murid Taman Siswa diberikan pendidikan kader bangsa, yang nasionalistis. Melalui pelajaran sejarah dan bahasa Indonesia, paham-paham kenasionalan dipompakan kepada anak-anak. Pergerakan nasional berupa partai (PNI) yang didirikan juga oleh Suwarno tahun 1929, dibubarkan tahun 1933. Guna menampung anggota dan aktivis PNI, disalurkan ke partai baru Partindo (berdiri tahun 1934). Akan tetapi belum cukup setahun, partai yang berusaha menampung para republiken itu, dibubarkan juga oleh pemerintah kolonial karena alasan menjaga ketenteraman.⁴⁹⁾

Aktifa-aktifa yang bersifat nasional disalurkan para anggota masyarakat pendukungnya melalui wadah pendidikan Taman Siswa. Seakan-akan Taman Siswa adalah wadah baru PNI atau Partindo, tetapi dalam bentuk lembaga pendidikan. Cara demikian cukup selamat guna ditempuh dalam upaya tetap membina jiwa kenasionalan pada masyarakat di kota Makasar.

Terdapat pula sebuah lembaga pendidikan yang sifatnya nasional, yakni *Perguruan Rakyat Indonesia*. Sekolah tingkat dasar itu dibuka pada tahun 1937, oleh sekelompok republiken asal Minahasa (Menado). Baik guru-guru, maupun murid-muridnya, pada umumnya keturunan suku Minahasa. Pimpinan perguruan ialah Lengkong, yang dianggap pihak Taman Siswa sebagai saingan dalam pengaderan bibit-bibit yang nasionalistis. Walaupun jumlah murid-murid memadai, sekolah itu ditutup pada tahun 1939.⁵⁰⁾

49) Drs. Harun Kadir, et.al. *op.cit.* hal. 100.

50) Drs. Mardanas Safwan, et.al. (ed) *op.cit.* hal. 99.

Baik perguruan Taman Siswa, maupun Perguruan Rakyat Indonesia, kedua-duanya menjadi tempat pengkaderan nasionalis muda. Sedangkan tempat pengkaderan kaum pergerakan yang berazaskan Islam pada sekolah-sekolah yang dibina Muhammadiyah. Munculnya partai pergerakan Syarikat Islam Indonesia di Makasar tahun 1930-an, erat hubungannya dengan adanya wadah pendidikan Muhammadiyah yang meniru model lembaga pendidikan pemerintah kolonial Belanda. SII (singkatan Syarikat Islam Indonesia) didirikan oleh Ince Abdul Rahim, Ince Tajudin, dan Baharuddin.

Dari kota Makasar, pusat munculnya sejumlah lembaga pendidikan, pergerakan kebangsaan Indonesia menentang penjajahan asing disebarkan ke daerah sekitarnya.

Adanya lembaga pendidikan formal, baik yang diasuh pemerintah, maupun oleh pihak swasta, amat dirasakan manfaatnya oleh penduduk masyarakat. Pemerintah Kolonial Belanda berhasil mengantar masyarakat kota Makasar mengenal pendidikan umum (sejumlah buku menyebutnya: "*seculer school*"). Masyarakat kota, yang pada umumnya beragama Islam, menyambut pendidikan umum tersebut berhubung perkumpulan Muhammadiyah ikut langsung terlihat dengan upaya yang serupa dengan kegiatan pemerintah membuka sekolah-sekolah. Bahkan, pihak Muhammadiyah meniru nama sekolah, seperti HIS Muhammadiyah, Munier School, Standard School, dan lain-lain.

Keterlibatan perkumpulan keagamaan membuka mata masyarakat kota Makasar, yang selama itu sering menaruh curiga terhadap semua yang diperkuat pihak pemerintah kolonial Belanda. Kecurigaan timbul di samping faktor anti penjajahan, juga ditambah dengan sentimen/emosi keagamaan yang terlalu fanatik. Lagi pula, adat negeri yang telah melembaga dan sudah menyatu dengan kehidupan masyarakat seakan-akan merekah dengan munculnya pendidikan umum model Barat itu. Dari segi menerobos pandangan masyarakat yang mencurigai lembaga-

ga pendidikan model Barat, perkumpulan Muhammadiyah telah memberikan andil yang cukup besar di kota Makasar.

Kesadaran penduduk, utamanya anggota masyarakat yang menjadi simpatisan Muhammadiyah, nampak dengan jelas, ketika para ibu-ibu dari kalangan Muhammadiyah membuka *Menyesal School*. Lembaga pendidikan bentukan para ibu-ibu (wanita) Muhammadiyah itu lebih berupa kursus dari pada sekolah biasa, misalnya VS. Murid-murid "Sekolah Menyesal" terdiri dari ibu rumah tangga, utamanya para keluarga, isteri, anak-anak yang telah dewasa, dari pengurus perkumpulan Muhammadiyah. Lebih tepat, jika sekolah ini disebut Pemberantasan buta huruf, karena yang masuk adalah mereka yang telah dewasa, bahkan telah menjadi ibu rumah tangga, tetapi tidak tahu membaca dan menulis huruf latin. Para ibu-ibu, isteri pengurus merasa ketinggalan dan menyesal, karena sejak kecil tidak pernah belajar membaca huruf latin, yang biasa pula disebut tulisan Melayu. Pada mereka itu, dirasakan adanya kerugian.

Menyesal School dibuka pada tahun 1936, menumpang pada gedung Munier School, terletak sekitat *Butung Weg* (Jalan Butung, sekarang). Waktu belajar adalah setelah ruang kelas sudah tidak terpakai oleh anak-anak murid *Munier School*, umumnya pada waktu malam hari.⁵¹)

Perubahan aktipita ibu-ibu rumah tangga dengan menambah kegiatan belajar di samping mengurus isi rumah menunjukkan adanya perluasan cakrawala pandangan terhadap dunia sekitarnya. Di sekolah *Menyesal School* itu, para ibu-ibu kadang-kadang memperbincangkan masalah kemasyarakatan, soal-soal pembinaan anak-anak dan lain-lain.

Peserta yang ikut belajar pada *Menyesal School* ketika mula dibuka, ada sekitar 50 orang, umumnya terdiri dari ibu-ibu rumah tangga isteri pengurus dan anggota Muhammadiyah.

51) *Ibid.* hal. 91, juga diperkuat Ny. M. Arsyat *Wawancara* tanggal 11 Oktober 1983 di Ujung Pandang (Makasar).

Kegiatan belajar tetap berlangsung sampai militer Jepang menjadi penguasa di Makasar, menggantikan Pemerintah Kolonial Belanda.

Di kota Makasar, menjelang masuknya pemerintahan militer Jepang (1942), jumlah anggota Muhammadiyah hanya sekitar 300 orang, dibandingkan dengan pria yang jumlahnya sekitar 1500 orang. Sedangkan anggota Muhammadiyah keseluruhannya yang tersebar pada 13 groep (sejenis cabang) di Sulawesi Selatan, adalah seperti berikut :

ANGGOTA PERKUMPULAN MUHAMMADIYAH SULAWESI SELATAN, 1932

No. Urut	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1.	Laki-laki	2.928 orang	79 %
2.	Wanita	756 orang	21 %
Jumlah seluruhnya 3.684 orang			5 ²)

Hampir separuh dari keseluruhan jumlah anggota Muhammadiyah pada mula berdirinya (hingga tahun 1940) adalah anggota *Muhammadiyah groep/cabang* Makasar. ⁵³)

Jumlah sekolah yang dibuka Muhammadiyah pada tahun 1932 sebanyak 21 buah, semuanya di Makasar, dengan jumlah murid-murid 1.313 orang. Sesudah di Makasar menunjukkan kemajuan persekolahan, dan guru-guru yang dihasilkan perguruan Muallimin Muhammadiyah Makasar bisa dikirim ke pelosok Sulawesi Selatan, maka di pedesaan berdiri pula sekolah-sekolah. Pada tahun 1940, jumlah sekolah seluruhnya 56 buah tersebar di Sulawesi Selatan, dengan murid sekitar 5000 orang.

52) H.S.D. Moentoe, *op.cit.* hal. 98.

53) M. Ardani, 67 tahun. *Wawancara* tanggal 24 September 1983. di Ujung Pandang.

Manfaat pendidikan menyebabkan Muhammadiyah sebagai perkumpulan sosial bertambah maju pula. Dibentuklah pula sebuah badan organisasi yang bersangkutan, yang bernama PKO (Penolong Kesengsaraan Oemoem), sebagai hasil Konperensi Muhammadiyah di Sengkang, sekitar 250 km sebelah Utara kota Makasar, pada tahun 1928. Dengan demikian, kota Makasar sebagai pusat perkumpulan Muhammadiyah memiliki lagi sarana pelayanan sosial, walaupun masih terbatas pada kegiatan Muhammadiyah. Niscaya, perkumpulan-perkumpulan lainnya bisa meniru aktipitas sosial Muhammadiyah, seperti halnya yang terdapat pada badan-badan keagamaan Nasrani.

Menjelang berakhirnya pemerintahan kolonial, badan-badan sosial yang ada di Makasar, utamanya yang mengurus pendidikan ialah dari pihak Islam Muhammadiyah, Katholik dan kaum republiken/nasional. Badan keagamaan ini menjadi pelopor dan penggerak mobilitas sosial, di samping peranan usaha pemerintah kolonial tidak boleh diabaikan.

2. Masa Pemerintahan Militer Jepang (1942–1945)

Bangsa Jepang semula dianggap masyarakat kota Makasar sebagai sahabat, yang akan membebaskan bangsa Indonesia dari kemelaratan akibat penjajahan yang cukup lama pihak bangsa Belanda. Mereka adalah sesama bangsa Asia, yang mendiami belahan bagian timur. Sudah lama pula bangsa berkulit kuning, bermata sipit, dan bertubuh lebih pendek dari bangsa Belanda itu, diakui keunggulannya oleh bangsa Indonesia. Pada tahun 1905, mereka (Jepang) menunjukkan kemampuan militernya yang memaksa Rusia yang besar itu terpaksa menandatangani perjanjian yang didiktekan Jepang. Peristiwa itu dinilai menjadi sumber inspirasi munculnya pergerakan kebangsaan Indonesia, tahun 1908.

Pada tahun 1930-an, Ir. Sukarno, yang masa itu dijuluki dengan nama kecintaan: Bung Karno, sering melansirkan dalam pidatonya, bahwa Perang Dunia telah hampir tiba. Saat itu,

bangsa Indonesia akan merdeka. Benar juga, Jepang di belahan bumi bagian timur mengambil prakarsa memulai perang. Ia menyerang pusat angkatan laut Amerika di Hawaii, dan dengan demikian, Perang Asia Timur Raya yang dicita-citakan Jepang berkecamuk.

Militer Jepang dalam awal peperangan, mengungguli Sekutu Amerika, di mana Belanda termasuk di dalamnya. Bagai kilat disertai halilintar, tentera Jepang menerobos pertahanan Amerika satu demi satu ke arah selatan. Pada bulan Pebruari 1942, masyarakat kota menyaksikan dengan mata kepala sendiri, betapa tentera Belanda yang ditakuti itu lari menghindari pertempuran melawan militer Jepang. Kenyataan itu cukup mengesankan masyarakat kota Makasar. Pemimpin pergerakan seperti Lanto Daeng Pasewang, Wahab Tarru, Najamuddin Daeng Malewa, Manai Siphian, dan lain-lain, menyambut tentera bangsa "pembebas" itu. Kegembiraan ikut dirasakan pemimpin keagamaan, terutama yang beragama Islam. Sekaliknya terhadap pihak pemuka agama Kristen. Beberapa pemuka Katholik yang terkemuka berasal dari Eropa, Belgia dan Belanda. Demikian pula halnya pemuka agama Kristen Protestan, yang berpusat di Tana Toraja.

Kedatangan bangsa Jepang disambut di mana-mana. Maka, kegembiraan menyelimuti suasana masyarakat ketika itu. Akan tetapi, perasaan senang masyarakat tidak berlangsung lama. Sejak bulan Mei, 1942, masyarakat kota dikejutkan tingkah laku Jepang yang kejam terhadap penduduk. Suku Makasar, karena kecewanya, mengeluarkan ungkapan yang ditujukan kepada Jepang, yang berbunyi: Poppo allampa, na parakang ambattu" (Makasar: Poppo berangkat tetapi parakang yang datang).⁵⁴)

54) Ungkapan ini diperoleh pada masyarakat Makasar, Poppo, julukkan terhadap pengganggu manusia, yang berasal dari sesama manusia juga. Dalam bentuk yang lain, manusia aneh itu terbang malam mencari mangsanya, untuk disantap. Parakang lebih berbahaya dari Poppo, menyerang manusia tanpa pandang bulu. Kaum agama yang taat tidak percaya pada adanya makhluk semacam ini, tetapi sulit juga membantahnya.

Walaupun dirasa pahit, masyarakat terpaksa menerima kenyataan, bahwa mereka mengalami penindasan yang melampaui batas. Tentera pendudukan Jepang, berhubungan masih dalam suasana perang, memusatkan perhatian pada segi pertahanan. Bangunan-bangunan yang hancur dipugar hanya sekedar kebutuhan perang, bukan untuk kesejahteraan masyarakat. Sendi-sendi kehidupan penduduk diabaikan, demikian pula terhadap dunia pendidikan.

Kota Makasar, tetap dijadikan Jepang sebagai pusat pemerintahan militernya. Di kota ini berkedudukan *min sei bu*, setingkat gubernur. Yang mengurus pendidikan, diangkat pejabat yang disebut *Selebes Miseibu Bunkyo Katyo*, juga berkedudukan di Makasar.⁵⁵⁾ Maka, masyarakat kota Makasar masa pendudukan Jepang tetap menyaksikan kesibukan pemerintahan.

Sekolah-sekolah model Belanda yang ditinggalkan pergi, tetap diteruskan oleh Jepang, kecuali dalam hal penamaan. Istilah-istilah Jepang mewarnai situasi pendidikan. Bahasa Jepang menggantikan kedudukan bahasa Belanda, sedang bahasa Melayu tetap dipergunakan. Karena itu, beberapa guru terdiri dari orang Jepang sendiri, terutama yang telah pernah tinggal di Sulawesi Selatan, masa pemerintahan Hindia Belanda. Sejumlah bangsa Jepang yang kegiatan sehari-harinya sebagai pedagang, telah lama menetap di kota Makasar, seperti pemilik Toko Kaneko.

Kota terbesar di Sulawesi, Makasar, oleh pemerintah militer Jepang diberi nama pemerintahan administratif : *Makasar Ken Kanrikang*, membawahi Kota Besar Makasar, Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan, Takalar, dan Jeneponto.⁵⁶⁾ Kota Besar Makasar diperintah oleh *giyaku* setingkat jabatan wali-

55) Drs. Haji Abdul Rauf, 57 tahun, bekas guru sejak sebelum perang. *Wawancara* tanggal 27 Septer.ber 1983 di Ujung Pandang.

56) Drs. Sarita Pawiloy, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Sul. Sel.* Proyek IKKD. Dep. P.K. 1979/1980, Jakarta, 1980, hal. 14.

kota, pada mulanya dipegang oleh Yamasita, tetapi pada tahun 1944, dipegang oleh Najamuddin Daeng Malewa.

Cara kekerasan memerintah oleh Jepang menimbulkan ekses-ekses, seperti ketakutan serta pasrah saja pada kehendak penguasa. Ekonomi menjadi bertambah parah, bukan saja karena akibat perang yang baru berlalu, melainkan juga karena pemerintah militer menguras habis hasil-hasil perekonomian rakyat. Maka, prostitusi mulai muncul di dalam kota Makasar.

Tentera Jepang ketika mendarat membawa serta wanita-wanita asal Korea, yang menurut Jepang sebagai juru masak militer. Rupanya, wanita-wanita Korea itu, tidak hanya sebagai juru masak, melainkan juga sebagai suguhan hiburan bagi sang militer Jepang. Akibatnya, penyakit masyarakat: prostitusi menjadi-jadi; dan adalah tidak mustahil, jika ada satu dua anak negeri penduduk kota Makasar ikut-ikutan, terutama yang imannya lemah.

Pemerintah militer Jepang mulai menguasai situasi setelah lima bulan mendarat. Sekolah-sekolah peninggalan pemerintah kolonial Belanda dirobah namanya sebagai berikut:

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DARI BELANDA KEPADA JEPANG TAHUN 1943

No. Tingkatan/jenjang pendidikan	Nama Sekolah	
	Belanda	Jepang
1. Pendidikan dasar	Volkschool	Futsu U Kogakko
2. Pendidikan sambungan	Vervolgschool	Kogio Kogakko
3. Pendidikan Guru	Normaal school	Sihan Gakko
4. Pendidikan Menengah	MULO	Cu Gakko

Sumber: Drs. Mardanas Safwan, et al.(ed), *op.cit* hal. 100.

Walau telah nampak pemerintah militer Jepang mulai membenahi pendidikan umum, guru-guru masih segan mengajar. Sejumlah guru pernah ikut latihan militer Belanda sebelum perang menjadi "*Stadswacht*", semacam wajib militer, bahkan ikut berperang melawan Jepang dipihak Belanda. Sejumlah guru lain seperti asal Ambon dan Menado menunjukkan sikap lebih waspada dari suku Makasar dan Bugis. Kesemuanya itu menjadi penyebab adanya kekosongan tenaga pada sejumlah kelas di sekolah-sekolah.

Penguasaan yang semakin terkonsolidasi menyebabkan guru-guru lain pada akhirnya ikut mengajar. Pemerintah Jepang memberi penghormatan yang cukup baik terhadap para guru-guru sekolah. Kurang diketahui apa sebabnya opsir Jepang jika bertemu dengan guru sekolah, memberi hormat dengan sikap sempurna. Kalau sang opsir naik kuda, biasanya ia turun lalu menghormat kepada guru. Penghormatan lebih bertambah, ketika Dr. Herota, bekas dosen Fak. Ekonomi pada Universitas Kobe, Jepang, menjadi guru merangkap Kepala Sekolah Cu Gakko (perubahan nama MULO). Sarjana Ekonomi itu diberi pangkat kolonel tituler.

Kebiasaan pada sekolah Jepang yang tidak disenangi masyarakat kota Makasar, yakni keharusan menghormat kepada bendera Jepang dan Negara Dai Nippon (Jepang). Ditambah ekonomi semakin parah, sejumlah orang tua murid memilih menghentikan dahulu pelajaran anaknya dari pada ke sekolah yang tidak berkenan di hati itu. Anak-anak, ditarik sebagai tenaga bantuan dalam pembinaan ekonomi rumah tangga.

Sekolah pertanian peninggalan Belanda diteruskan juga oleh Jepang, dengan nama *Noogyo Zitsumu Gakoo*, akan tetapi hanya di Bone dan Palopo. Yang pernah dibuka di Makasar, oleh pemerintah militer Jepang dinilai tidak perlu lagi, sehingga ditutup.⁵⁷⁾ Dapat dikatakan, penduduk kota Makasar menda-

57) Drs. Mardanas Safwan, et.al. (ed), *op.cit.* hal. 101.

pat latihan fisik yang keras dari penguasa militer Jepang, di samping mempertebal ketabahan. Kerusakan sendi-sendi perekonomian, perkosaan, dan rasa ketakutan yang mencekam mempertajam pengenalan masyarakat tentang betapa pedihnya hidup di bawah penjajahan.

Masyarakat kota Makasar yang taat dalam beragama muak melihat tingkah laku tentera Jepang yang tidak mengabaikan aspek moral. Penduduk sering menyaksikan oknum militer Jepang mandi telanjang di sumur atau dalam kali pinggir kota; sehingga apabila sekarang ada yang mandi tanpa kain penutup aurat di pinggir sumur terbuka, atau di dalam kali, disebut "mandi Jepang". Tidak jarang pula, tentera yang nakal, sengaja memperlihatkan alat kelaminnya kepada wanita-wanita yang sedang lewat. Tentu saja, kalau hal itu diketahui atasannya, akan dihukum dengan cukup berat.⁵⁸⁾

Gejala menjauhnya masyarakat yang taat beragama dari penguasa militer Jepang, pemerintah mendatangkan seorang Jepang yang memiliki pengetahuan agama. Ia pun bernama "Arab", yakni Haji Umar Faisal. Begitu pula, didatangkan seorang imam Katholik dari Jepang: Aloysius Ogihara SJ., administrator Apostolik Hiroshima. Seorang yang menjabat Uskup dalam perjalanannya ke Flores, singgah di Makasar, tahun 1943, yaitu Paulus Yamaguchi dari Nagasaki.⁵⁹⁾

3. Masa Kemerdekaan hingga 1950

Berita kemerdekaan yang dibawa pulang Dr. (GSSJ) Ratu-
langi, Andi Pangerang Daeng Rani, dan Andi Sultan Daeng Raja-
disambut dengan penuh kegembiraan oleh masyarakat kota
Makasar. Lewat pemberitaan *Pewart* Selebes, satu-satunya su-
rat kabar ketika itu, kegembiraan menyelimuti penduduk me-
nyambut kemerdekaan yang diproklamasikan Sukarno-Hatta,
17 Agustus 1945 di Jakarta. Kemerdekaan benar-benar telah

58) M. Ardani. *Wawancara* tanggal 15 Oktober 1983.

59) Eerenbeemt, *op.cit.* hal. 52-53.

tiba, setelah penduduk merasakan penjajahan dari penguasa totaliter militer Jepang. Kepahitan penjajahan memuncak pada masa kekuasaan Jepang, sehingga berita kemerdekaan adalah bagai air disuguhkan kepada seseorang yang hampir mati kehausan.

Beberapa bulan pertama awal kemerdekaan, kegembiraan masih nampak pula penduduk kota Makasar. Akan tetapi, pada bulan September muncul Sekutu dari kesatuan militer bangsa Australia. Sekutu disambut penduduk dengan gembira bermacam curiga. Warna kulit dan potongan badan tentera Australia sulit dibedakan dengan bekas penjajahan sebelum Jepang (Belanda). Pada bulan Oktober 1945, Sekutu menampakkan belangnya, dengan ikutnya membonceng sejumlah perwira K L (tentara Belanda) dibalik seragam militer Australia. Pemerintahan R I di bawah gubernur Dr. Sam Ratulangi disusun pada awal September 1945.⁶⁰⁾

Suasana bulan Oktober, Nopember dan Desember dirasakan cukup panas oleh masyarakat kota Makasar. Sejumlah pemuda melibatkan diri dalam perjuangan bersenjata seperti Semut Merah, Harimau Indonesia, Lipan Bajeng, dan sejumlah kesatuan-kesatuan pemuda setiap perkampungan Makasar dan Bugis. Sebaliknya, segelintir pendukung kembalinya pemerintah kolonial bersiap pula. Mereka menjadi sasaran cercaan penduduk pro kemerdekaan, yang kadang-kadang memuncak menjadi bentrokan kecil-kecilan. Bekas tawanan pemerintah militer Jepang dengan datangnya Sekutu diboncengi Belanda menjadi lega. Maka, kota Makasar bila malam tiba diliputi suasana ketakutan.

Keadaan kembali pulih di kota Makasar, setelah para pejuang mengundurkan diri ke luar kota, dan memusatkan kegiatannya di daerah Takalar. Di Polongbangkeng, 47 Km sebelah selatan kota Makasar, Lipan Bajeng bermarkas yang sempat menghimpun para pejuang lainnya guna menghadapi Belanda di

60) Drs. Sarita Pawiloy, *op.cit.*, hal. 63.

Makasar. Mereka membentuk LAPRIS (Lasykar Pemberontak Rakyat Indonesia Sulawesi) yang berjuang mempertahankan kemerdekaan.

Pada bulan Januari hingga Desember 1946, merupakan bulan-bulan konsolidasi kekuasaan pemerintah yang didukung Belanda, dengan nama NICA (*Nederland Indische Civil Administration*). Puncak kekacauan kota Makasar ialah peristiwa yang agak fantastik, terjadinya korban 40.000 jiwa di Sulawesi Selatan. Pembunuhan-pembunuhan massal yang dilakukan pasukan Westerling (KNIL) umumnya pada pinggiran kota Makasar bagian Utara kota.

Kota Makasar menjadi pusat pemerintahan NIT (Negara Indonesia Timur) bentukan Dr. H.J. van Mook, sejak dirumuskan negara boneka itu pada Konprensi Denpasar dilanjutkan dengan Konprensi Malino (15–25 Juli 1946).⁶¹) Dengan demikian, penduduk kembali lagi pada suasana mirip masa penjajahan. Para pejuang diuber-uber atau ditangkap dan dipenjarakan. Masyarakat lainnya yang pro-republik menyelinap, baik secara sendiri-sendiri, ataupun bersama-sama dalam aktipitas lain, seperti pada usaha pendidikan nasional.

Pemerintah NIT mengambilalih kembali lembaga pendidikan yang pernah diasuh pemerintah militer Jepang. Nama-nama sekolah dikembalikan sebagaimana situasi menjelang perang, dengan sedikit perubahan sesuai perkembangan dan perubahan suasana. *Volkschool* diubah menjadi Sekolah Rakyat 3 tahun, *Vervolgschool* menjadi Sekolah Sambungan. Demikian juga *Normaal School* menjadi SGB; sedang MULO menjadi SMU (Sekolah Menengah Umum).

Pada masa pemerintahan NIT, muri-murid yang tertampung pada Sekolah Rakyat (Sekolah Dasar) sekitar 45% dari usia wajib sekolah.

61) Mardanas Safwan, et.al., (ed), op.cit., hal. 111. Kota Malino yang berhawa sejuk terletak di pinggiran gunung Bawakaraeng, 70 KM sebelah Timur kota Makasar.

3.1 Pendidikan Perguruan Islam Datumuseng

Sejumlah republikan dari kalangan masyarakat Islam ber-satu membuka sebuah perguruan yang bisa menampung anak-anak agar tidak masuk pada sekolah asuhan pemerintah NIT yang pro NICA. Realisasi upaya mereka terlaksana pada tanggal 1 Oktober 1945. Para pemuka Islam pro-republik itu telah melihat gejala akan kembalinya Belanda, dengan munculnya bekas tentera Belanda masa sebelum perang, membonceng pada pasukan Australia. Di bawah pimpinan Haji Mansyur Daeng Tompo, perguruan itu dibuka di Makasar, dekat pantai Losari 1 km sebelah selatan *Fort Rotterdam*.

Adapun yang menjadi pendorong pembukaan sekolah itu ialah: (1) Sebagai reaksi terhadap penjajah, yang tidak memperhatikan pendidikan Islam, (2) Mempersatukan kegiatan umat Islam menentang kolonialisme, dan (3) Menampung para pejuang muda, yang ingin memajukan pendidikannya. Beberapa pejuang di bawah tanah, bisa bersembunyi dengan menyamar sebagai murid perguruan Datumuseng.

Badan pengasuh perguruan berada di bawah organisasi *Persis* (Persatuan Islam) yang diketuai oleh Haji Mansyur Daeng Tompo, dibantu Haji Darwis Zakariah, Haji Gazali Sachlan, Luthan Muhammad, dan lain-lain.

Ketika mula dibuka, jenjang pendidikan perguruan terdiri dari: (1) Bagian Ibtidaiyah (atau pengajaran rendah) dipimpin seorang kepala sekolah: AD Hamid Syahid, dan (2) Bagian Pengajaran Menengah, dengan Kepala Sekolah Haji Gazali Syahlan.

Kurikulum sekolah diatur menurut perbandingan mata pelajaran agama Islam dan mata pelajaran umum, sekitar 65% dan 35%. Materi pelajaran agama meniru model pendidikan agama murni, sedangkan untuk mata pelajaran umum mengambil model sekolah pemerintah.

Berhubung perguruan Islam Datumuseng sering menjadi tempat rapat rahasia para pejuang kemerdekaan menentang

NIT, maka polisi memberikan perhatian khusus dalam pengawasan sekolah itu. Guru-guru sering dibuat sulit, karena kadangkadang harus berhadapan dengan petugas guna memberikan informasi yang diperlukan. Mujur bagi perguruan tersebut, karena sampai berakhirnya NIT, tetap berdiri dengan selamat. Bahkan, pada tahun 1949, dibuka lagi SMA I (Sekolah Menengah Atas Islam), juga di Makasar (Jalan Maipa sekarang).

Gedung Perguruan pada mula dibukanya, terdiri atas enam lokal. Maka, penggunaan gedung diatur sebagai berikut:

- (1) Pada waktu pagi khusus untuk pendidikan dasar.
- (2) Waktu sore untuk pendidikan menengah.^{6 2})

Pengadaan gedung seluruhnya adalah swadaya masyarakat Islam, para simpatisan dan anggota Persis Makasar. Pemerintah NIT tidak memperhatikan dalam pemberian bantuan, melainkan hanya kecurigaan semata.

3.2 Perguruan Nasional Makasar

Tokoh pergerakan nasional seperti Dr. GSSJ Ratulangi, Lanto Daeng Pasewang, Mr. Andi Zainal Abidin, Suwarno, dan lain-lain, membuka lembaga pendidikan setelah proklamasi diucapkan. Pada tanggal 8 Oktober 1945, diadakan pembukaan Perguruan Nasional, pada saat suhu politik kota Makasar semakin panas.

Tingkat pendidikan yang mula-mula dibuka ialah yang bisa menampung murid-murid umur belasan tahun. Guna sampingannya ialah sebagai pengkaderan pejuang muda agar kelak tampil membela dan membangun kemerdekaan. Maka, yang mula-mula dibuka ialah Sekolah Menengah Pertama dengan nama SMP Nasional. Sebagai direktur yang pertama ialah Dr. GSSJ Ratulangi sendiri, yang ketika itu adalah juga Gubernur Sulawesi. Dr. Ratulangi kemudian digantikan oleh Syam (1946) berhubung sang Gubernur itu tertangkap oleh aparat NICA.

62) *Ibid.* hal. 107-108.

Syam, pada tahun 1948 diganti pula sebagai kepala sekolah: Malajong Daeng Liwang.

Gedung yang ditempati anak murid SMP Nasional belajar, mula-mula pada bangunan darurat. Pada tahun 1948, isteri sang kepala sekolah Ny. Weleidah Malajong mengetuai pengadaan Pasar Malam Amal untuk mengumpul dana. Sempat dikumpulkan ketika itu sebanyak f.65.000,— suatu jumlah yang dapat digerakkan untuk memulai membangun sebuah gedung yang agak baik. Di atas tanah wakaf Daeng Tobo, didirikanlah gedung SMP Nasional, bertempat di Goaweg (kini Jalan Ratu-
langi).

Perguruan Nasional, dalam hal ini SMP Nasional, cukup terkenal dalam peranan para pelajarnya mempertahankan kemerdekaan. Dari sekolah tersebut muncul nama-nama: Wolter Monginsidi, Rivai Paerai, dan lain-lain. Mereka menjadi inti perjuangan menentang kekuasaan NICA, berikut negara boneka NIT. Ide-ide nasionalis republiken dipompakan kepada anak murid melalui pelajaran sejarah dan bahasa Indonesia.

Guru-guru yang memberi pelajaran umumnya bersifat sukarela, didorong oleh rasa pengabdian kepada proklamasi kemerdekaan. Dikenal guru-guru: Rugahan, B. Korompis, Ny. Weleidah Malajong, Ny. Silondae, Ny. Sabara, dan lain-lain. Di samping sebagai guru, mereka juga adalah terompet paham kesatuan bangsa, yang anti NIT.

Kepercayaan masyarakat kota Makasar yang republiken/negara kesatuan terhadap tujuan SMP Nasional menyebabkan perguruan itu bisa bertahan pada masa NIT. Sumbangan-sumbangan yang secara sukarela, semacam donatur, diperoleh dari masyarakat kota. Keadaan itu berlangsung hingga NIT lebur kedalam RIS, 1950. SMP Nasional bukan hanya sekedar tempat menimba ilmu, melainkan juga wadah pengkaderan nasionalis-nasionalis pembela kemerdekaan Republik Indonesia. Gejala ini memberi petunjuk peranan sekolah memasukkan ide tertentu ke dalam pikiran murid-muridnya.

Masa terakhir dari pada usia NIT, kekuatan kaum unitaris/ republiken dalam Parlemen bertambah kuat, dibawah pimpinan Arnold Mononutu. Penggabungan ke dalam RIS pada tahun 1950 amat melegakan masyarakat kota Makasar. Gedung-gedung sekolah seperti Perguruan Datumuseng menjadi tempat-tempat diskusi, dan atau pertemuan politik menyambut kesatuan politik kenegaraan Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Sekolah Islam itu dipergunakan para tokoh pergerakan pihak Islam. Keadaan yang sama terdapat pula pada SMP Nasional, dipakai sebagai tempat rapat membicarakan masalah kenegaraan yang baru bebas dari belenggu perangkap ketata negaraan model Dr. H J van Mook.

3.3 Pendidikan dan Pers sesudah Proklamasi 17-8-1945

Adanya sekolah-sekolah, baik yang diasuh pemerintah, maupun oleh badan-badan swasta menambah pengetahuan masyarakat kota Makasar. Penduduk mulai bisa membaca huruf latin, walau dalam prosentase yang sedikit, $\pm 30\%$. Dengan demikian, sejak kemerdekaan diperoleh, di Makasar didirikan pesurat kabaran sebagai bacaan umum/masyarakat.

Pertengahan tahun 1946, Dr. Ratulangi, gubernur Sulawesi yang pertama mencoba mendirikan usaha pesurat kabaran, dengan nama *Kebenaran*. Dr. Ratulangi kemudian menyerahkan palu pimpinan kepada Ince Saleh Daeng Tompo, dengan dibantu oleh rekan-rekannya: Sugardo, Pondaag dan Tobing. Mereka adalah kaum republiken yang berusaha memberikan pendidikan politik kepada pembacanya, terutama yang berdiam di kota Makasar.

Usaha mempengaruhi masyarakat kota, atau pembaca surat kabar itu pada umumnya, nampak pada pengungkapan ucapan Andi Mappanyuki, yang dimasukkan dalam tulisan surat kabar *Kebenaran*. Ditulis dalam surat kabar itu suatu ucapan tajam raja Bone, Andi Mappanyukki, yang ditujukan terhadap pihak yang mengusahakan agar sang raja tidak melibatkan diri dengan gerakan kemerdekaan. Tertulis: "Aku tidak akan buta

dengan mentega, dan mulut saya tidak dapat ditutup dengan roti, dan tidak bisa saya menjadi licin dengan susu'⁶³) Nada ucapan yang tajam itu menyebabkan surat kabar Kebenaran sekali saja terbit, dibreidel oleh NICA.

Pada bulan Maret 1947, masyarakat kota Makasar bisa lagi membaca lewat surat kabar yang dibuka oleh L E Manuhua, meskipun masih dalam bentuk stensilan. Surat kabar itu diberi nama: Pedoman (Harian Pedoman) dengan oplag 550 eksemplar. Harga langganan sebulan sebanyak Rp. 2,50.

Di kota Makasar hingga tahun 1950, terdapat sembilan surat kabar, dengan jumlah oplag sekitar 3000 eksemplar, cukup banyak untuk penduduk kota masa itu.

3.4 Organisasi Wanita

Tradisi suku Makasar dan Bugis menempatkan wanita pada posisi lemah, yang perlu dilindungi oleh pihak pria. Masalah wanita seringkali muncul dan menjadi penyebab masalah *siri'* (sering ditulis: sirik).⁶⁴) Karena itu, dari pada menimbulkan masalah, lebih baik mereka mengurangi komunikasi dengan lingkungan luar rumah. Dengan demikian, wanita suku Makasar dan Bugis agak menutup diri dari pergaulan, tidak sama dengan kebebasan kaum pria.

Penduduk kota Makasar, yang umumnya terdiri dari suku Makasar dan Bugis, sebelum munculnya pendidikan asuhan pemerintah kolonial, kaum wanitanya agak kurang bebas. Kaum hawa itu menjadi penghuni rumah, mengerjakan berbagai urusan rumah tangga. Dipundak mereka terpikul beban tanggungjawab menyelesaikan segala urusan dapur, mulai dari mengambil

63) Kementerian Penerangan RI, Republik Indonesia, Propinsi Sulawesi, Makasar, 1953, hal. 367.

64) *Siri'* : suatu yang bisa disamakan dengan rasa malu yang mendalam, sehingga menimbulkan tanggungjawab untuk menebusnya, kadang-kadang dengan membunuh pihak lawan.

air minum/masak, mencuci pakaian/alat pelengkap dapur, menumbuk padi hingga bisa disajikan di meja makan, dan sejumlah pekerjaan ringan dalam rumah.

Sejak anak-anak mereka ada yang masuk sekolah rakyat (*Volkschool*), mulailah terjadi perubahan sikap terhadap wanita. Anak-anak wanita, meskipun jauh lebih kurang dari anak-anak pria, yang sempat bersekolah, mulai keluar dari kungkungan rumah. Hingga menjadi gadis, anak-anak itu berani meninggalkan rumah, dalam batas-batas yang tidak menimbulkan masalah keluarga.

Para orang tua yang pernah menikmati pendidikan formal, minimal *Volkschool*, terdapat perubahan mengenai pandangan terhadap anak wanita. Berbeda dari penduduk yang sama sekali tidak pernah bersekolah pada lembaga pendidikan umum asuhan pemerintah. Perubahan nampak pula dalam berpakaian, dengan meniru wanita-wanita Belanda yaitu dengan memakai rok sebagai pengganti sarung. Alat kecantikan bukan lagi bedak kuning dari beras yang dikunyah bersama kunyit, melainkan bedak dari dos yang dibeli di toko. Sudah ada pula yang mengeriting rambut, walau mendapat tantangan dari pemuka agama yang amat fanatik. Lewat sekolah, para orang tua murid tradisional menjadi agak gusar dengan perubahan tingkah laku anak-anak mereka. Hanyalah dengan alasan, karena masih anak-anak, pukulan tidak hingga di punggung mereka.^{6 5)}

Suatu perubahan yang cukup berarti di kalangan wanita suku Makasar, ketika anak Jaksa Sonda, Weleidah, masuk belajar pada *Eropesche School*, 1930-an. Tamat dari sekolah mewah itu, puteri Weleidah melanjutkan pelajarannya ke *Frobel School* di Bandung. Terdapat juga anggota keluarga terdekat yang melarang Weleidah ke Bandung, tetapi keinginan sang puteri lebih kuat, akhirnya cita-cita menginjak kota Bandung terlaksana. Akhirnya, ketika tamat, orang tua yang semula menentang me-

65) M. Ardani. *Wawancara* tanggal 23 September 1983.

rubah sikapnya menjadi bangga atas keberhasilan Weleidah. Niscaya, tidak sedikit para orang tua yang serupa dengan kasus demikian ini.

Pergaulan antar sesama wanita, antara wanita suku Makasar dengan wanita asal Menado, Ambon, Jawa, dan lain-lain, ikut mempercepat perubahan sikap para wanita suku Makasar dan Bugis. Teman sesama wanita di sekolah, dilanjutkan dalam masyarakat. Pada akhirnya, kaum wanita suka berkumpul-kumpul antar sesamanya, membuahkan perkumpulan yang terorganisir. Maka, terciptalah organisasi wanita.

Pada bulan September 1945, sebuah organisasi wanita skala besar didirikan oleh Nyonya Ratulangi, isteri gubernur Sulawesi. Organisasi itu bernama: *Wanita Penolong*, bertujuan membantu kesulitan-kesulitan hidup, terutama di kalangan kaum wanita. Pada tahun 1946, organisasi itu berubah namanya menjadi: *Perkumpulan Wanita Penolong Sosial*. Menurut laporan pengurus, jumlah anggotanya sekitar 2000 orang.⁶⁶)

Wanita-wanita asal Maluku yang berdiam di Makasar membentuk pula perkumpulan. Organisasi yang bernama Persatuan Wanita Maluku, diresmikan tanggal 10 Nopember 1946 di Makasar, yang diketuai Ny. Pattileuw. Pekerja-pekerja wanita, baik yang bekerja di kantor pemerintah, atau badan-badan swasta, dan perusahaan, menyatukan diri dalam Serikat Buruh Wanita Indonesia. Ketuanya: Nona Bansuhari. Serikat Buruh Indonesia pimpinan Nona Bansuhari diresmikan pada tanggal 20 Maret 1947.

Sebuah organisasi yang lebih kuat, didirikan oleh Ny. Towoliu, pada bulan Pebruari 1947. Nama organisasi ialah GOWANI (Gabungan Organisasi Wanita Indonesia), menghimpun perkumpulan-perkumpulan wanita yang seide, tidak membedakan aliran agama/kepercayaan, garis politik, dan suku. Dengan cepat GOWANI mendapat tempat di hati kaum wanita di Makasar,

66) Drs. Sarita Pawiloy, *op.cit.* hal. 171.

suatu bukti bahwa mereka pun aktif dalam mempersatukan bangsa Indonesia.

Dari kalangan jamaah wanita Islam, peranan Muhammadiyah cukup penting. Dalam badan yang khusus menampung aktipitas kewanitaan, perkumpulan Muhammadiyah membentuk anak organisasi yang bernama Aisyiah (1930-an). Anggota Aisyiah mula-mula mendirikan "Menyesal School" (lihat bagian terdahulu tulisan ini), kemudian mereka yang tamat Muallimin, mendirikan Taman Kanak-Kanak. Hingga sekarang Taman Kanak-kanak asuhan Aisyiah cukup menonjol aktivitasnya di Makasar (Ujung Pandang).^{6 7})

Kegiatan kaum wanita yang cukup penting masa Revolusi Fisik, ialah didirikannya Palang Merah Indonesia (PMI) pada tanggal 27 Oktober 1945 di Makasar. Organisasi itu dipelopori oleh Inez Manoroinsong dan Suprapti. Kedua petugas kesehatan itu bekerja pada rumah sakit Stella Maris, milik Apostolik Katolik Makasar. Organisasi itu mempunyai peranan penting dalam arena juang di Sulawesi Selatan, khususnya pusat-pusat perjuangan sekitar kota Makasar.

3.5 Pendidikan pada masa awal RIS

Pada awal bulan Oktober 1950, Mr. Hadi, Sekretaris Jenderal Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan berkunjung ke Makasar. Kunjungan tersebut memberi harapan baik bagi masyarakat, para orang tua murid. Sebelumnya, para orang tua/wali murid merasa ragu masa depan pendidikan anak-anak mereka dengan perubahan struktur administrasi pemerintahan. Kekhawatiran berakhir dengan datangnya Mr. Hadi di Makasar, pusat pendidikan dan pemerintahan di Sulawesi Selatan.^{6 8})

Pada masa pemerintahan NIT, sistem pengajaran niscaya berbeda dari yang terdapat di pusat RI, begitu pula pada daerah-daerah lainnya. Munculnya negara kesatuan meskipun masih

67) Ny. Ardani, 65 tahun. Bekas pengurus Aisyiah Makasar. *Wawancara* tanggal 27 Oktober 1983 di Ujung Pandang.

68) Kementerian Penerangan RI, *op.cit.* hal. 486.

dalam bentuk serikat, menuntut adanya kesatuan pula dalam sistem pendidikan. Guru-guru sekolah pun ikut merasa lega dengan tibanya Mr. Hadi dari Departemen PKK Pusat, Jakarta.

Hasil kunjungan Mr. Hadi di kota Makasar yang mula-mula dirasakan masyarakat pencinta pendidikan, ialah pembentukan Kantor Inspeksi Sekolah Rakyat Daerah X, meliputi seluruh daerah-daerah yang tercakup dalam propinsi Sulawesi. Sekolah Rakyat tingkat dasar menjadi perhatian utama pada masa itu.⁶⁹⁾

Pelaksanaan pendidikan bagi penduduk masyarakat kota Makasar 1950-an diatur sebagai berikut:

- (1) Badan Penyelenggara Sekolah Rakyat, bertanggungjawab melaksanakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah-sekolah pemerintah;
- (2) Inspeksi aparat Sekolah Rakyat, bertugas mengawasi penyelenggaraan persekolahan tersebut.

Dengan terbentuknya Kantor Inspeksi Sekolah Rakyat Daerah X, yang dilengkapi dua badan pelaksana, amat melegakan masyarakat kota Makasar. Kekhawatiran akan terbelenggalnya pendidikan anak-anak mereka pada akhirnya dihapus oleh kegembiraan menyambut kebijaksanaan pemerintah itu.

Nampaklah, bahwa dari tahun 1876, mula berdirinya *Kweekschool* asuhan Benjamin Frederik Matthes, hingga tahun 1950, awal munculnya kesatuan politik Indonesia merdeka, masyarakat kota Makasar mendapat "daya" dalam memperluas horizon pandangan, begitu pula lapangan kerja mereka.

69) Drs. Mardanas Safwan, et al. (ed) *op.cit.* hal. 112-113.

BAB V P E N U T U P

Murid-murid Sekolah Rakyat (SR=SD, sekolah dasar) pada tahun 1950-an tentu pernah belajar menulis dan membaca aksara Bugis-Makassar; untuk mata pelajaran ini La Side, seorang budayawan berjasa asal Sulawesi Selatan telah menyumbangkan karyanya yang penting buat pelajaran ini. Beliau menulis sebuah buku berjudul: *Pau-pau ri Kadong* yang digunakan bahan bacaan bagi murid-murid kelas tiga ke atas. Salah satu bagian dari buku itu menceritakan seorang anak desa, La Mappa, dari Soppeng berkunjung ke Ujung Pandang (waktu itu masih bernama Makassar, tetapi di dalam buku La Side tetap menggunakan nama Juppandang karena memang itu yang digunakan oleh orang Bugis di dalam menyebut kota ini) dalam rangka mengisi hari liburnya.

Sesampai di kota Juppandang La Mappa yang anak desa itu terbungong-bungong melihat suasana kota besar itu; terbungong melihat keramaian kota itu. Ia bereaksi di dalam hatinya betapa ramainya kota ini. Jauh lebih ramai dari Pare-Pare, kota yang juga pernah dikunjunginya sebelum melihat kota Juppandang ini. Ia bungong tetapi juga kagum; La Mappa tertarik akan suasana Juppandang yang tidak pernah diperolehnya di desanya. Malam hari yang terang, yang tetap hampir sama dengan

siang hari. Ramainya orang hilir mudik; hiburan yang beragam, termasuk bioskop dan lain-lain.

La Side memang tidak menyebutkan ceriteranya tentang masa dewasa La Mappa dan tempat tinggal selanjutnya. Tetapi tidak mustahil bahwa seorang La Mappa akan mengakhiri "kebengongannya" dengan kembali menetap di kota yang pernah dikunjunginya ketika masih kanak-kanak itu. Ingatan-nya, betapa "enak-santainya" orang hidup di kota, mendorong-nya untuk mengadu nasib di kota yang memang memiliki serba kemungkinan, daripada menetap di desanya yang tetap berwajah muram tanpa pekerjaan alternatif. Tidak sedikit orang kota yang pada mulanya "bengong" bercampur kagum mencoba melanjutkan pencaharian hidupnya di kota; terjadilah urbanisasi, arus penduduk desa ke kota.

Dari uraian yang telah disajikan pada bab-bab terdahulu, nampak bahwa kota Ujung Pandang telah mengalami suatu pertumbuhan yang cukup pesat dan itu menyangkut pada semua aspek. Tampak adanya perubahan-perubahan yang mendasar dan membuka jalan bagi terjadinya mobilitas sosial di kota tersebut. Pola pemukiman telah berkembang dan mengalami perubahan; pola pemukiman itu telah memekar yang menyebabkan wilayah kota ini makin bertambah luas pula. Pendidikan yang telah diintrodusir oleh pelbagai pihak juga telah membuka peluang terjadinya mobilitas sosial, baik vertikal maupun horizontal. Artinya atribut-atribut tradisional telah ditinggalkan karena adanya pengaruh pendidikan. Dengan pendidikan yang diperolehnya, orang-orang yang bersangkutan berhasil memperoleh kedudukan-kedudukan tertentu di dalam masyarakat; kedudukan dan penghargaan yang tidak akan mungkin diperolehnya tanpa melalui jenjang pendidikan yang telah dilaluinya.

Urbanisasi juga telah menyebabkan terjadinya mobilitas di kota Ujung Pandang. Banyak penduduk "pendatang" telah memperoleh kesempatan yang lebih baik daripada penduduk "asli". Juga pekerjaan-pekerjaan tertentu di kota itu telah menjadi pekerjaan yang dimonopoli oleh pendatang tertentu. Orang-

orang Toraja misalnya, dapat dikatakan telah memonopoli pekerjaan "tukang sepatu".

Persoalan urbanisasi, sebagaimana halnya di kota-kota besar lainnya, akan tetap merupakan persoalan yang akan dihadapi oleh kota Ujung Pandang. Pertumbuhannya, dari tahun 1950-an sampai kini, yang juga telah berjalan demikian pesat akan tetap merupakan daya tarik pada orang-orang "desa", baik yang berasal dari wilayah Sulawesi Selatan sendiri, maupun dari wilayah Indonesia Timur pada umumnya. Tentu pelbagai faktor yang membuka jalan ke urbanisasi itu; fasilitas-fasilitas dari pelbagai aspek kehidupan yang tersedia di ibukota propinsi ini merupakan salah satu daya tarik untuk mobilitas penduduk dari daerah lain ke Ujung Pandang. Pendidikan dapat dikatakan sebagai salah satu faktor "yang tetap".

Dapat dikatakan bahwa jumlah fasilitas pendidikan di kota Ujung Pandang, tersedia dengan memadai dan bervariasi jenisnya; selanjutnya tiap tahun berkembang menuju ke jumlah yang makin banyak jenisnya. Dengan demikian untuk bidang pendidikan tersedia pilihan-pilihan bagi mereka yang akan melanjutkan pendidikannya. Hal ini makin akan kelihatan jika kita memperhatikan minat untuk melanjutkan pendidikan tingkat pendidikan tinggi. Universitas Hasanuddin makin berkembang ke arah yang "lebih baik kualitasnya", dan ternyata bahwa untuk Indonesia Timur universitas ini cukup mampu memancing para pemuda yang akan melanjutkan pendidikannya. Kalau gagal memasuki Universitas Hasanuddin, masih tersedia alternatif lainnya berupa pendidikan tinggi tingkat Akademi yang juga jenisnya bermacam-macam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada setiap tahun, kota Ujung Pandang tidak bisa tidak harus dapat menampung ribuan mahasiswa yang akan melanjutkan pendidikannya di kota ini. Dan ternyata tidak hanya untuk tingkat pendidikan tinggi, melainkan juga untuk tingkat pendidikan sekolah menengah.

Terjadinya pertambahan penduduk baik disebabkan oleh karena jumlah kelahiran maupun oleh karena mengarusnya pen-

duduk desa/kota lain ke Ujung Pandang, tentu membawa pula pelbagai persoalan yang harus diatasi oleh pemerintah kota. Perumahan, lapangan kerja, transportasi, air bersih dan lain-lain, hanya merupakan sebagian dari permasalahan yang dengan segera harus di atasi. Di sinilah kita melihat betapa pentingnya "perencanaan" pembangunan kota. Walaupun kita telah dengan giat berusaha menekan jumlah kelahiran, namun kelahiran akan tetap terjadi — terlepas dari adanya pengaruh terhadap bertambahnya jumlah penduduk itu sendiri dan pasti akan menyebabkan dibutuhkannya fasilitas-fasilitas hidup bagi mereka; sejak awal kelahirannya sampai saat akhir hayatnya. Demikian pula urbanisasi. Adalah perbuatan sia-sia untuk menutup kota dari arus kedatangan orang-orang desa/kota lainnya ke Ujung Pandang, selama daya tarik fasilitas hidup di Ujung Pandang baik; alternatif-dengan itu— untuk "memperbaiki" keadaan hidup lebih terbuka, sehingga dapat dihempang. Alternatif untuk membuat sebuah kota sebagai *kota tertutup* dengan sendirinya adalah merupakan perbuatan yang keliru pula; malah dapat dikatakan sebagai suatu bentuk "pelanggaran hak azasi" warganegara. Bukankah kehendak untuk mencari suatu perbaikan kehidupan adalah hak yang paling azasi dari setiap manusia?

Pengalaman Jakarta pada periode pemerintahan Gubernur Ali Sadikin, ketika dijadikan sebagai kota tertutup, adalah merupakan contoh yang patut direnungkan. Peraturan penutupannya hanya ada di atas kertas; manusia dari propinsi/kota lainnya tetap mengarus ke Jakarta.

Ujung Pandang akan tetap berkembang sejalan dengan pertumbuhan pembangunan yang sedang berjalan. Karena itu keharusan akan adanya suatu perencanaan pembangunan kota ini merupakan suatu hal yang sangat perlu. Ke arah mana kota ini akan dibentuk, tentu akan ditentukan oleh perencanaan yang menjadi pegangan pembangunan kota itu sendiri. Jika, misalnya, kota ini direncanakan sebagai *kota taman*, maka pengertian kota taman itu harus dijelaskan; karena taman di sini tidaklah identik dengan hanya sekedar semaraknya kota dengan pelbagai

jenis tanaman kembang belaka. Demikian pula halnya dengan keinginan untuk menjadikannya sebagai kota pendidikan untuk Indonesia Timur, tentu tidak sekedar akan bertumbuhnya gedung-gedung sekolah bertebaran di seantero kota. Ia tentu menyangkut dengan jenis sekolah yang akan didirikan, jumlahnya, gurunya, fasilitasnya dan semacamnya.

Jika perencanaan dilakukan dengan seksama, maka La Mappa yang terheran-heran ketika untuk pertama kali melihat kota Juppandang, jika kembali ke kota itu untuk menetap, akan memperoleh kesempatan untuk melanjutkan hidupnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Atau La Mappa akan kembali ke desanya karena ia tidak mampu menghadapi kenyataan kehidupan di kota besar ini. Ia tidak memiliki ketrampilan, baik material maupun psikis, untuk menetap di kota ini. Karena itu La Mappa akan kembali ke desanya dengan kesadarannya sendiri, tanpa dipaksakan oleh suatu peraturan penutupan kota besar, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh DKI Jakarta itu.

Demikianlah, kota besar Ujung Pandang akan tetap berkembang, dan di dalamnya pergumulan hidup penghuninya akan tetap berjalan; mobilitas sosial pun akan tetap berjalan pula.—

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdurrahim, "Kedatangan Orang Melayu di Makassar", *Buku Peringatan Persatuan Tionghoa Indonesia Peranakan (PERTIP) Makasar 1946-1953*, Makassar, 1953.
- Adi Negoro, *Ensiklopedi Umum*, Bulan Bintang, Jakarta, 1954.
- Barnadib, Imam, *Sejarah Pendidikan di Indonesia*, FIP-IKIP. Yogyakarta, Yogyakarta, 1977.
- Bohannan, Paul, *Social Anthropology*, Holt, Rinehart and Winston, London, 1969.
- Burger, D.H., *Sejarah Ekonomi Sosiologis Indonesia*, Saduran Prajudi Atmosudirdjo, Pradnyaparamita, Jakarta, 1962.
- De Buitenbezittingen 1904 tot 1914*, Koleksi Buku Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan di Ujung Pandang.
- de Klein, J.W., *Bestuursmemorie van de Onderafdeeling Makassar*, 1947, Koleksi Arsip Perwakilan Arsip Nasional RI. Sulawesi Selatan di Ujung Pandang.
- de Quarles, A.J. Baron, *Memori van Overgave van den Aftredenden Gouverneur van Celebes Onderhoorigheden*, 1929, Koleksi Arsip Perwakilan Arsip Nasional RI. di Ujung Pandang.
- Eerdmans, *Het Landschap Gowa*, VBGW., Amsterdam, 1897.

- Eerenbeemt, T.P.C. van den, *Sejarah Gereja Katholik di Wilayah K euskupan Ujung Pandang*, Percetakan Frater, Ujung Pandang, 1971.
- Evers, Hans-Dieter, *Sosiologi Perkotaan, LP3ES.*, Jakarta, 1982.
- Hamid, Abu, dkk., *Penelitian Potensi Perekonomian Daerah Sulawesi Selatan*, Suatu Studi Identifikasi Sosio-Antropologi Ekonomi tentang Tanah Wiraswasta dan Migrasi ke Luar, LEKNAS-LIPI., UNHAS., Ujung Pandang, 1979-1980.
- Kadir, Harun, *Sejarah Daerah Sulawesi Selatan*, Proyek Inventarisasi Kebudayaan Daerah, 1976-1977.
- Kartodirdjo, Sartono, dkk. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid III, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1977.
- Kementerian Penerangan RI., *Republik Indonesia, Propinsi Sulawesi*, Makassar, 1953.
- Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*, Cetakan Pertama, Dian Rakyat, Jakarta, Agustus 1965, hal. 174 dan 178.
- Lahade, Saleh, *Korban 40.000 Jiwa di Sulawesi Selatan dan Artinya bagi Perjuangan Kemerdekaan RI.*, Makalah yang diajukan pada Seminar Sejarah Perjuangan Rakyat Sulawesi Selatan Menentang Penjajahan Asing, Ujung Pandang 8-11 Desember 1982.
- Lineton, J.A., "An Indonesian Society and Its Universe: A Study of the Bugis of South Sulawesi (Celebes) and Their Role Within A Wider Social and Economic System", *Ph.D. Dissertation*, School of Oriental and African Studis, University of London, London, 1975.
- Mangemba, H.D., *Kota Makassar Dalam Lintasan Sejarah*, Lembaga Sejarah Fakultas Sastra UNHAS., Makassar, 1972.
- Mattulada, "Latoa", Satu Lukisan Analitis terhadap Antropo-

- logi Politik Orang Bugis. *Disertasi Doktor*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1975.
- Mattulada, *Agama Islam di Sulawesi Selatan*, Fakultas Sastra UNHAS., Ujung Pandang, 1976.
- Mattulada, *Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah*, Departemen Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan FIISBUD – UNHAS., Ujung Pandang, 1978.
- Memperkenalkan Kota Makassar "Jumpandang"*, Penerbit Tri-bakti, Makassar, 1957.
- Moentoe, H.D., *Langkah dan Usaha Kami*, Groep Muhammadiyah Labakkang, Makassar, 1942.
- Mudiyono, *Tesang*, Studi tentang Struktur Hubungan Kerja Petani di Lakatong, PLPIIS–UNHAS., Ujung Pandang, 1978.
- Mukhlis, "Struktur Birokrasi Kerajaan Gowa, Jama Pemerintahan Sultan Hasanuddin (1653–1669)", *Skripsi Sarjana*, Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1975.
- Naim, Mochtar, "Besarnya Migrasi Sukubangsa Minangkabau dan Sukubangsa-Sukubangsa Lain di Indonesia. Beberapa Perkiraan Statistik Masyarakat Indonesia", *Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia*, Nomor 1 dan 2, Tahun IV, LIPI, Jakarta, 1977.
- Naim, Mochtar, "Perantauan Masyarakat Minang dan Kaitannya dengan Kewiraswastaan", *Majalah Prisma*, Nomor 9, Tahun VII, LP3ES., Jakarta, 1978.
- Naim, Mochtar, *Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1979.
- Oosthoek Geillustreerde, *Encyclopaedie*, Deel VIII, 1922.
- Pabittei, Aminah, *Benteng Ujung Pandang*, Kantor Cabang II Lembaga Sejarah Antropologi, Ujung Pandang, 1975.

- Patang, Lahadjji, *Sulawesi dan Pahlawan-Pahlawannya*, Yayasan Kesejahteraan Generasi Muda Indonesia (YKGMI), Jakarta, 1976.
- Pawiloy, Sarita dan Muhammad Abduh, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945–1949) Daerah Sulawesi Selatan*, Proyek IDKD. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1979 – 1980.
- Pawiloy, Sarita, dkk., *Sejarah Pendidikan Sulawesi Selatan*, Proyek IDKD., Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 1980–1981.
- Pedoman Rakyat*, Surat Kabar Harian, Firma Perak, Ujung Pandang, 2 Agustus 1983.
- Pepelmima, C.G., *Mandar Menyambut 17 Agustus 1962 di Majene*, C.G. Pepelmima, 1962.
- Publikasi van wege in naam Des Konings, De Minister van Staat, Gouverneur van Nederlandsch - Indie, 1846*, Koleksi Arsip Perwakilan Arsip Nasional RI. Sulawesi Selatan di Ujung Pandang.
- Razak Daeng Patunru, Abd., *Sejarah Gowa*, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, Makassar, 1969.
- Razak Daeng Patunru, Abd., *Sejarah Wajo*, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, Makassar, 1964.
- Sarira, J.A., *Benih Yang Tumbuh, Sketsa Pendidikan Kristen Tana Toraja (1913–1967)*, Panitia Dasa Warsa Pendidikan Kristen Toraja, Makale, 1967.
- Schrieke, B., *Indonesian Sociological Studies*, Vol I, the Hague – Bandung, 1955.
- Staatsblad*, 1903 No. 137, 1906, 1938 No. 718.
- Suratha, I.C.W., *Tukang Mebel Toraja di Ujung Pandang*, PLPIIS–UNHAS., Ujung Pandang, 1977.
- Tachya, A., *Pagandeng dan Pajama, Pedagang Keliling dan*

- Pekerja Kecil di Kelurahan Tetebatu Gowa, Ringkasan Hasil Penelitian, PLPIIS-UNHAS., Ujung Pandang, 1983.*
- Teng Tjong Hae, "Riwayatnya Kelenteng-Kelenteng Tionghoa di Makassar", *Buku Peringatan Persatuan Tionghoa Indonesia Peranakan (PERTIP) Makassar 1946-1953*, Makassar 1983.
- Tobing, P.O.L., *Hukum Pelayaran dan Perdagangan Ammanna Gappa*, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, Ujung Pandang, 1977.
- Traanslaat Maleijds Geschrift voor Zien van en Kap van den Capitein Maleijdsch Moehamat Hasjang geboek in de Register van Kampong Malajoe onder No. 262, 1814*, Makassar, 1814, Koleksi Arsip Perwakilan Arsip Nasional RI. Sulawesi Selatan di Ujung Pandang.
- van den Brink, Ds.H., *Dr. Benjamin Frederik Matthes, Zijn leven en den arbeid in dienst van het Bijbelgenootschap. Amsterdam, 1942.*
- Volkstelling, 1930, IV.*
- Walinono, Hasan, dkk., *Laporan Penelitian Sebab Musabab Outflow Penduduk Sulawesi Selatan*, Lembaga Kependudukan UNHAS., Ujung Pandang, 1974.
- Wolhoff, G.J. dan Abdurrahim, *Sejarah Gowa*, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan dan Tenggara, Makassar.
- Yatim, Nurdin, "Subsistem Honorifik Bahasa Makassar", Sebuah Analisis Sosiolinguistik, *Disertasi Doktor*, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, 1982.
- Zainal Abidin, Andi, *Persepsi Orang Bugis, Makassar tentang Hukum Negara dan Dunia Luar*, Alumni, Bandung, 1983.

DAFTAR SUMBER

- Abdullah, 53 tahun, buruh harian, Jalan Mangadel RT. DRK. 5 Kelurahan Kalukuang Ujung Pandang.
- Amdan, Azis: 40 tahun, Lurah Kelurahan Rappojawa Kota Madya Ujung Pandang, Kelurahan Rappojawa Ujung Pandang.
- Ardani, Muhammad: 68 tahun, bekas pengurus Muhammadiyah masa Negara Indonesia Timur (NIT) di Makassar, Ujung Pandang.
- Ardani, Ny.: 65 tahun, bekas pengurus Aisyiah Makassar, Ujung Pandang.
- Arsyat, M.: pegawai Perguruan Muhammadiyah Ujung Pandang, 72 tahun, Ujung Pandang.
- Arsyat, Ny.: 65 tahun, Ujung Pandang.
- Eerenbeemt, 70 tahun, Pastor, Malino Kabupaten Gowa.
- Husain, Haji; 70 tahun, pedagang, Jalan Diponegoro Ujung Pandang.
- Kasim, Remba; 65 tahun, bekas tokoh pergerakan Syarikat Islam di Makassar, Ujung Pandang.
- Makkulau, Andi, gelar Opu Daeng Parebba: 70 tahun, Ujung Pandang.

- Maladjong, Weleidah, Ny.: 60 tahun, tammatan Europeasche Lagere School 1941 di Makassar, Ujung Pandang.
- Muhayyang Daeng Situju, 68 tahun, bekas Kepala Kampung Melayu, Jalan Diponegoro Ujung Pandang.
- Rauf, Abdul, Haji: 65 tahun, Lektor Kepala pada IKIP-Negeri Ujung Pandang, sebelum perang (1942) sudah jadi guru di Makassar, Ujung Pandang.
- Salam Daeng Sekre, 67 tahun, bekas Gallarrang Rappojawa yang terakhir, pensiunan pegawai Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang, Ujung Pandang.
- Sutte, Daeng: 68 tahun, pensiunan pegawai Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, Perumnas Blok III Ujung Pandang.
- Tima, 70 tahun, janda Veteran Pejuang Kemerdekaan R.I., Jalan Pongtiku Lorong 22 Ujung Pandang.
- Udin, M.: 50 tahun, Staf Kantor Camat Ujungtanah Kota Madya Ujung Pandang, Ujung Pandang.
- Yahya, Muh. Kasim: 65 tahun, pengurus Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, pensiunan Kantor Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan, Ujung Pandang.
- Zainuddin Daeng Manye, 70 tahun, karyawan PT. Pengangkutan Pelayaran Sulawesi Selatan (PT. PPSS) Ujung Pandang, sebelum Jepang telah bekerja di pelabuhan Makassar, Kelurahan Rappojawa Ujung Pandang.

SEJARAH SOSIAL DAERAH SULAWESI

Perpustakaan
Jenderal Ke

959.
MU
s